

**IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT* DI BIDANG LINGKUNGAN**

**(Studi Tentang CSR *Joint Operating Body* Pertamina-PetroChina *East Java*
di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RIFKA AULYA
NIM. 105030100111137**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

“Yesterday is an experience, today is a reality, and tomorrow is an expectation.. learn from your mistakes yesterday, get the experience that you faced today, and bring them to achieve your best future...”

(Rifka Aulya)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility*
Dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Development* di
Bidang Lingkungan (Studi Tentang CSR *Joint Operating*
Body Pertamina-PetroChina East Java di Desa Rahayu,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban)

Disusun oleh : Rifka Aulya

NIM : 105030100111137

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

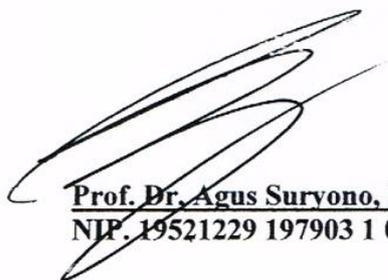
Konsentrasi : -

Malang, 08 April 2013

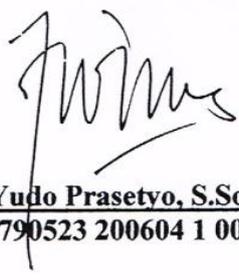
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Agus Suryono, M.S.
NIP. 19521229 197903 1 003



Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP
NIP. 19790523 200604 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : 162-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2014
Jam : 12.00 - 13.00 WIB
Skripsi atas nama : Rifka Aulya
Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* Dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Development* di Bidang Lingkungan (Studi Tentang CSR *Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java* di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota

Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002

Anggota

Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 14 April 2014



Nama : Rifka Aulya

NIM : 105030100111137

RINGKASAN

Rifka Aulya, 2014, **Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan** (Studi tentang CSR *Joint Operating Body* Pertamina-PetroChina *East Java* di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban), Prof. Dr. Agus Suryono, MS sebagai Dosen Pembimbing I, dan Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP sebagai Dosen Pembimbing II

Prinsip *Corporate Governance* telah diadopsi di beberapa perusahaan termasuk salah satunya adalah *Joint Operating Body* Pertamina-Petrochina *East Java* (JOB P-PEJ). Sebagai BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam minyak dan gas bumi, JOB P-PEJ telah menerapkan prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* yang salah satunya adalah *responsibility*. Prinsip ini kemudian melahirkan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR di perusahaan ini juga mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang CSR yang kemudian diimplementasikan oleh perusahaan melalui pelaksanaan program-program CSR.

Kegiatan operasional JOB P-PEJ menimbulkan adanya *Flare* (api panas) yang dampaknya secara langsung menimpa lingkungan di Desa Rahayu yang merupakan lokasi perusahaan ini berdiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR melalui kegiatan yang *real* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya di Desa Rahayu dalam rangka mewujudkan *sustainable development* di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang implementasi program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu dalam mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program CSR tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman. Dalam metode analisis ini terdapat tiga tahapan penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi program CSR di JOB P-PEJ melalui beberapa tahapan yaitu proses perencanaan, penentuan implementor (pelaksana), *target group* (kelompok sasaran), hasil pelaksanaan, serta *outcome* atau dampaknya terhadap masyarakat di Desa Rahayu. Adapun program CSR yang dilaksanakan meliputi enam bidang yaitu bidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kompensasi dan rekonsiliasi, dan *government and public relation* (kehumasan). Keenam bidang ini banyak membawa dampak positif atau manfaat bagi masyarakat di Desa Rahayu khususnya.

Program CSR yang berbasis lingkungan juga telah diimplementasikan oleh JOB P-PEJ mengingat kegiatan operasional perusahaan tersebut secara langsung berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Beberapa program tersebut telah mampu mewujudkan *sustainable development* di Desa Rahayu serta pelaksanaannya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi program CSR JOB P-PEJ dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung serta penghambat. Adapun faktor pendukung berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Sedangkan faktor penghambat juga dipengaruhi oleh internal dan eksternal perusahaan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya manajemen yang lebih baik dari segi internal maupun eksternal serta hubungan yang lebih baik antar semua aktor yang terlibat dalam implementasi program CSR di JOB P-PEJ agar CSR yang dilaksanakan dapat berhasil dan tepat sasaran.



SUMMARY

Rifka Aulya, 2014, **Implementation of Corporate Social Responsibility Program in Order To Achieve Sustainable Development in the Field of Environment (Studies on CSR Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java in Rahayu village, District Sokom Tuban)**, Prof. Dr. Agus Suryono, MS as Counselor Lecture I, and Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP as Counselor Lecture II.

Principles of Corporate Governance has been adopted in several companies including one of which is the Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ). For companies involved in the field of natural resources of oil and gas, JOB P-PEJ has applied the principles of corporate governance in which one of them is a responsibility. This principle gave birth to the existence of Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate responsibility towards stakeholders. Implementation of CSR in these companies also refers to the laws and regulations governing CSR is then implemented by the company through the implementation of CSR programs.

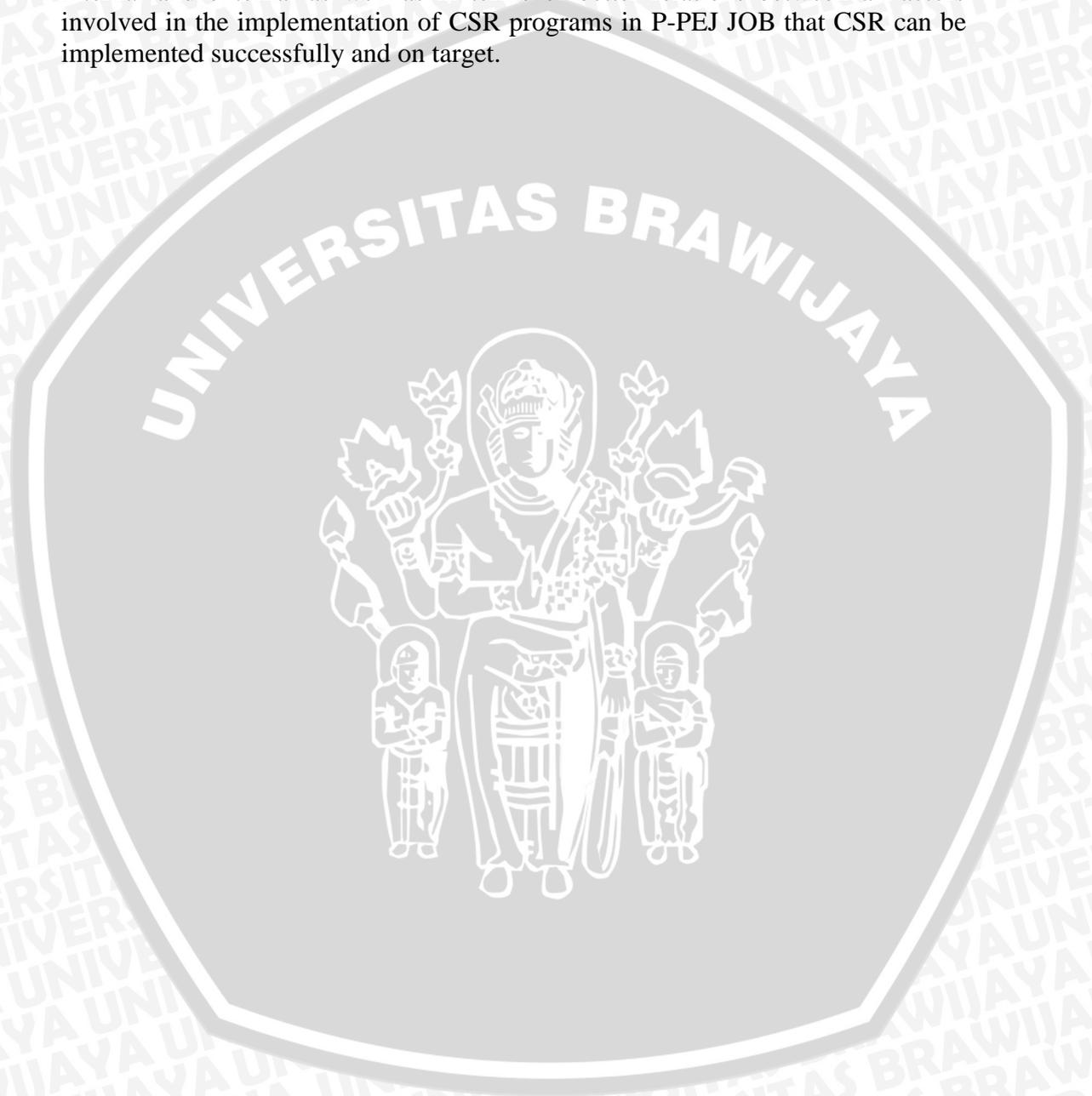
JOB P-PEJ operational activities gave rise to the Flare (fire hot) which directly impact on the environment override Rahayu village, the site of its formation. Therefore, it is the duty of the company to implement CSR programs through the estate as a form of social and environmental responsibility especially in Rahayu village in order to realize sustainable development in the village.

Based on the above, the purpose of this study is to investigate, describe, and analyze on the implementation of CSR programs JOB P-PEJ Rahayu village in realizing sustainable development and the environment in Bisang describe and analyze the factors that support and hinder the implementation of the CSR program. In this study, researchers used a type of qualitative research methods with a descriptive approach. The analytical method used is through an interactive method of Miles and Huberman. In this analysis method, there are three stages of research, namely data reduction, data display and conclusion drawing / verification.

Based on the results of the study, it was found that the implementation of CSR programs in JOB P-PEJ through several stages of the planning process, the determination of the implementor (executor), target group (target group), the results of the implementation, and the outcomes or impact on society in Rahayu village. The CSR program is implemented covering six areas: socio-economic, education, health, infrastructure, compensation and reconciliation, and government and public relations (PR). The sixth field is a lot of positive impact or benefit to society in particular Rahayu village.

CSR programs are based environment has also been implemented by P-PEJ JOB considering its operating costs are directly related to natural resources and the environment. Some of these programs have been able to realize sustainable development in the Village Rahayu and their implementation on an ongoing basis.

Successful implementation of CSR programs JOB P-PEJ influenced by several factors supporting and inhibiting. The supporting factors derived from the company's internal and external. While inhibiting factors also influenced by internal and external company. Therefore, it is necessary to better management of internal and external as well as in terms of better relations between all actors involved in the implementation of CSR programs in P-PEJ JOB that CSR can be implemented successfully and on target.



HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU UNTUK KEDUA
ORANGTUAKU TERCINTA,
BAPAK H. ACHMAD ZUHRI DAN IBU SITI
CHAMIDAH

....

UNTUK KAKAK-KAKAKKU DAN ADIKKU
TERSAYANG

....

UNTUK SAHABAT DEKATKU "KELUARGA Griya Shanta
M418" YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN
DAN SEMUA TEMAN-TEMANKU FIA PUBLIK, FIA BISNIS, FIA
PEMERINTAHAN, FIA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, FIA
PERPAJAKAN ANGKATAN 2010.

I LOVE YOU GUYS ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Siti Chamidah dan Bapak H. Achmad Zuhri selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan seta memberikan masukan agar skripsi ini lebih sempurna dan selalu memberikan nasihat.

6. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik sekaligus sebagai Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran, kritik, serta masukan untuk perbaikan skripsi.
7. Bapak Mohammad Nuh, S.IP, M.Si sebagai Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran, kritik, serta masukan untuk perbaikan skripsi
8. Bapak Dodi Ibnu Fajar selaku Dosen Pembimbing Lapangan sekaligus sebagai *Sr. Government and Public Relation Supervisor* dan Bapak Yoga S. Utomo selaku *Sr. Security and Relation Supervisor* JOB P-PEJ yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama penelitian di perusahaan tersebut.
9. Seluruh staff bidang Govrel dan PR di JOB P-PEJ yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh keluargaku, khususnya kakak-kakaku dan adikku yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
11. Seluruh teman-temanku khususnya Fadhil, Mumun, Mela, Tiara, Yeni, Nancy, Linda, Tomy, Adit, Fatin, Nila, Novinaz, Ari Ziady, Bayu, Viska, dan semua teman-temanku FIA Publik angkatan 2010 yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2014

Penulis

Rifka Aulya

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	15
1. Definisi Administrasi Publik	15
2. Administrasi Lingkungan	16
B. Kebijakan Publik	19
1. Implementasi Kebijakan	20
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	23
3. Impelementasi Program	26
D. <i>Governance</i>	28
1. Definisi <i>Governance</i>	28
2. <i>Corporate Governance</i>	29
3. <i>Good Corporate Governnce</i>	30
4. Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	31
E. <i>Coorporate Social Responsibility (CSR)</i>	32
1. Definisi CSR	33
2. Manfaat CSR	34
3. Prinsip-Prinsip CSR	35
4. Bentuk dan Program CSR	37
5. Tahap Implementasi CSR	40
6. Anatomi <i>Triple Bottom Line</i> dalam CSR	42
7. ISO 26000 sebagai Pedoman CSR dalam mewujudkan <i>Sustainable Development</i>	44

F. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	47
1. Definisi Pembangunan berkelanjutan	47
2. Dimensi dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	50
3. Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan	54
4. Posisi BUMN dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development</i>	59
G. Hubungan CSR dan <i>Sustainable Development</i>	61
1. <i>Sustainability</i> dan <i>Sustainable Development</i>	63
2. <i>Sustainability</i> sebagai Tujuan Akhir CSR	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	66
B. Fokus Penelitian	67
C. Lokasi dan Situs Penelitian	68
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Instrumen Penelitian	72
G. Analisis Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	76
1. Profil Perusahaan	76
2. Visi dan Misi Perusahaan	79
3. Kebijakan JOB Pertamina-PetroChina <i>East Java</i>	79
4. Struktur Organisasi Perusahaan	81
5. Jumlah Pekerja	82
6. Penghargaan	83
7. Profil Desa Rahayu	84
8. Struktur Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Pekerjaan	85
9. Potensi Desa Rahayu	87
B. Penyajian Data Fokus	
1. Implementasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu.....	89
a. Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ	95
b. Implementor Program CSR JOB P-PEJ	100
c. Sasaran Implementasi Program CSR	104
d. Hail Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu	107
e. <i>Outcomes</i> Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu.	114
2. Implementasi Program CSR JOB P-PEJ dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development</i> Bidang Lingkungan di Desa Rahayu.....	125
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program CSR JOB P-PEJ	135
a. Faktor Pendukung Internal.....	136
b. Faktor Pendukung Eksternal	137
c.. Faktor Penghambat Internal	138
d. Faktor Penghambat Eksternal	143

C. Pembahasan	149
1. Analisis Implementasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu.....	149
a. Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ	155
b. Implementor Program CSR JOB P-PEJ	157
c. Sasaran Implementasi Program CSR	158
d. Hail Pelaksanaan Program CSR di desa Rahayu	159
e. <i>Outcomes</i> Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu.....	164
2. Analisis Implementasi Program CSR JOB P-PEJ dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development</i> Bidang Lingkungan di Desa Rahayu	166
3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program CSR di JOB P-PEJ	184
a. Faktor Pendukung Internal.....	184
b. Faktor Pendukung Eksternal	186
c. Faktor Penghambat Internal	186
d. Faktor Penghambat Eksternal	189
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	197
B. Saran	200
 DAFTAR PUSTAKA	203
DAFTAR LAMPIRAN	207



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Wilayah Lapangan yang di garap JOB P-PEJ	78
2.	Silsilah Kepemimpinan Desa Rahayu	85
3.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rahayu	86
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Rahayu	86
5.	Jenis Potensi Sumber Perekonomian Desa Rahayu	89
6.	Skema Tahapan Implementasi Program CSR JOB P-PEJ.....	93
7.	Cakupan Wilayah Program CSR JOB P-PEJ	105
8.	Realisasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu Tahun 2008 s/d 2012	108
9.	Dampak Program CSR Bidang Sosial-Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Rahayu	114
10.	Dampak Program CSR Bidang Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Rahayu	115
11.	Perubahan Insfrastruktur Kesehatan di Desa Rahayu	118
12.	Dampak Program CSR Bidang Kesehatan di Desa Rahayu	119
13.	Dampak Program CSR Bidang Infrastruktur di Desa Rahayu	120
14.	Dampak CSR Bidang Kompensasi dan Rekonsiliasi di Desa Rahayu.....	124
15.	Realisasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu Tahun 2008 s/d 2012 yang berorientasi Lingkungan	127
16.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program CSR JOB P-PEJ	135
17.	Analisis dan Interpretasi Data Fokus Penelitian	190

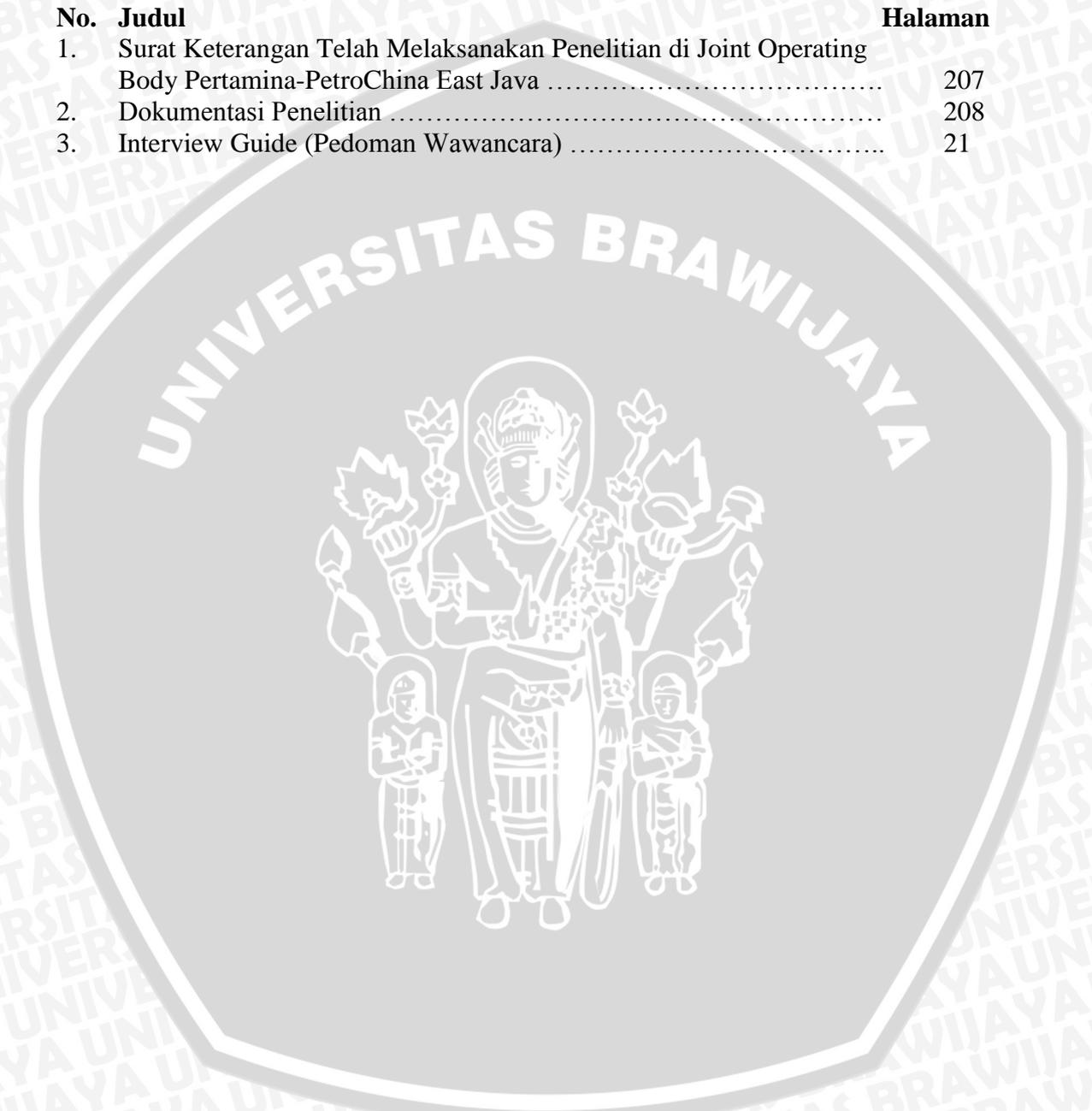
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Kesesuaian Implementasi Program (Korten)	29
2.	Hubungan antar Triple “P”	44
3.	Poin Penting Penerapan CSR dalam ISO 26000	48
4.	Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	52
5.	<i>Sustainable development triangle – key elements and interconnections</i>	53
6.	Peta lokasi lapangan minyak mudi di Kabupaten Tuban	78
7.	Struktur Organisasi JOB P-PEJ	81
8.	Jumlah Karyawan JOB P-PEJ sampai dengan 10 April 2010	82
9.	Penghargaan yang pernah di raih JOB P-PEJ	83
10.	Mekanisme Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ	95
11.	MCK Umum di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu	122
12.	Saluran Sanitasi yang dibangun dari dana CSR	122
13.	Lokasi SDN Rahayu 1 dan 2 yang berada di dekat lokasi CPA	129
14.	Relokasi Pembangunan Gedung SDN 1 dan 2 Rahayu	129
15.	Tandon air di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu	130
16.	Program pembangunan saluran sanitasi 2012 yang telah diselesaikan di tahun 2013	132
17.	Penghijauan di sepanjang jalan Desa Rahayu	134
18.	Skema urgensitas implementasi CSR JOB P-PEJ	170
19.	Flare CPA di Desa Rahayu	171



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java	207
2.	Dokumentasi Penelitian	208
3.	Interview Guide (Pedoman Wawancara)	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan suatu negara, setidaknya terdapat tiga aktor yang memiliki peran penting dan menjadi tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pemerintah (*government*), sektor bisnis (*private sector*), dan masyarakat (*society*) yang sering dikenal dengan istilah *governance*. *Governance* sendiri menekankan hubungan, kolaborasi, serta *networking* antara ketiga aktor dalam suatu negara. Ketiga aktor tersebut harus bekerjasama secara sinergis, selaras, dan seimbang agar mampu menjalankan perannya masing-masing dengan optimal untuk mencapai tujuan negara secara efektif yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan tersebut meliputi pengelolaan untuk sektor publik (*public governance*), tata kelola dalam *society*, dan tata kelola pada sektor swasta atau perusahaan yang dikenal dengan istilah *corporate governance*. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu organisasi perusahaan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* yang menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*shareholders*)” (Tjager, 2003:26).

Dalam menciptakan tata kelola yang baik khususnya pada sektor *private* atau swasta, sudah banyak perusahaan baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar pengelolaan serta manajemen dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan konsisten. GCG merupakan salah satu kunci sukses sebuah perusahaan untuk tumbuh, berkembang dan menguntungkan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, sekaligus untuk memenangkan kompetisi dalam persaingan global dan menjadikan perusahaan menjadi lebih transparan. Beberapa prinsip GCG seperti yang dikemukakan oleh Daniri (2005:9) meliputi *Transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Dari kelima prinsip GCG yang dikemukakan oleh Daniri, salah satunya adalah masalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Masalah pertanggungjawaban ini, salah satu wujud implementasinya adalah melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga eksistensinya dan sebagai *feedback* antara perusahaan dan lingkungan serta masyarakat yang berada di *ring area* atau wilayah di mana perusahaan tersebut berdiri. Hal ini sependapat

dengan pernyataan dari *The World Business Council for Sustainable Development* yang mendefinisikan bahwa:

“*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. (Budimanta, *et al*, 2005: 73).

Tanggung jawab sosial perusahaan ini sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan umpan balik yang baik antara organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitar dan masyarakat serta sebagai penentu kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah perusahaan dalam jangka panjang.

Pemerintah secara tegas telah mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan meregulasi aktivitas CSR ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam PP tersebut diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Undang-undang mengenai CSR yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya merupakan produk dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu dimulai dari perumusan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi. Salah satu aspek terpenting dalam sebuah kebijakan terletak pada implementasi atau pelaksanaannya. Karena pada kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut, tidak akan berguna jika itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi, suatu kebijakan tidak hanya ditetapkan kemudian dibiarkan begitu saja, melainkan harus diimplementasikan agar bisa diketahui apakah tujuan serta sasaran sudah tepat dan benar-benar sesuai rambu-rambu kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Udoji yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:59) dengan tegas mengatakan bahwa *“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”*. Yaitu pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Adanya program-program CSR yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan sendiri merupakan suatu bentuk realisasi implementasi dari produk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di mana suatu perusahaan juga harus memperhatikan sekitarnya dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar agar tidak ada pihak yang dirugikan atas dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Implementasi program CSR di Indonesia sudah mengalami perkembangan dan telah banyak diterapkan pada beberapa perusahaan baik perusahaan multi nasional, swasta nasional, maupun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih pada dunia bisnis yang kegiatannya bergerak dibidang dengan sumber daya alam. Umumnya, perusahaan ini sering melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti pada perusahaan pertambangan dan perminyakan. Adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ini tentunya membawa dampak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pihak perusahaan sudah semestinya memperhatikan kepentingan lingkungan serta masyarakat sekitar. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR agar eksistensi perusahaan tersebut tetap berlangsung dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena jika perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan eksploitasi sumber daya alam itu tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya, akan banyak menemui berbagai kendala misalnya sering di demo oleh masyarakat, bahkan ada kemungkinan perusahaan tersebut terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang karena banyak pihak yang dirugikan.

Adapun kebijakan CSR pada perusahaan yang bergerak pada sumber daya alam sendiri juga telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran. Sesuai isi PP tersebut, dapat diketahui bahwa perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar kegiatan operasional

perusahaan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pelaku bisnis yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia dan telah mengimplementasikan kebijakan CSR salah satunya adalah PT. Pertamina (Persero). Awalnya, Pertamina adalah gabungan dari perusahaan yang bernama Pertamina dan Permina. Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina). Kemudian pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. (www.pertamina.com). Pertamina pernah memonopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Aktivitas eksplorasi dan produksi dilakukan melalui operasi sendiri dan konsep kemitraan dengan pihak ketiga. Adapun pola kemitraan dalam bidang minyak dan gas salah satunya adalah dengan *Joint Operating Body* (JOB). Salah satu perusahaan yang bekerja sama melalui *Joint Operating Body* (JOB) ini adalah PetroChina. PetroChina sendiri merupakan perusahaan minyak bumi dan gas terbesar di China sekaligus firma energi paling bernilai kedua di dunia setelah Exxon Mobil, AS. Di Indonesia

sendiri, JOB Pertamina-PetroChina sudah berjalan di beberapa wilayah yakni, Jambi, Irian Jaya, dan Jawa Timur. *Joint Operating Body* Pertamina- PetroChina *East Java* (JOB P-PEJ) merupakan salah satu dari bentuk hubungan kerjasama dibidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang terdapat di Indonesia khususnya pada daerah Jawa Timur yang *officinya* terletak di desa Rahayu kecamatan Soko, kabupaten Tuban. *Joint Operating Body* PT. Pertamina di desa ini sudah berdiri sejak tahun 1988 dengan nama mitra perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian Juli 2002, Pertamina menandatangani kontrak dengan kontraktor perusahaan Petrochina sehingga bernama *Joint Operating Body* Pertamina-PetroChina *East Java* (JOB P-PEJ) hingga tahun 2018 mendatang. (sumber: *company profile* JOB P-PEJ)

Dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan minyak dan gas bumi, JOB P-PEJ juga memiliki beberapa kebijakan. Salah satunya adalah dengan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan sistem manajemen lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasi yang berkesinambungan dan menguntungkan guna mengendalikan dampak lingkungan serta resiko keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, JOB P-PEJ melakukan implementasi program CSR sebagai salah satu bentuk realisasi kebijakan yang telah ditetapkan. CSR Pertamina merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika. Prinsip-prinsip CSR Pertamina mengacu pada ISO 26000 yaitu, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan

kesejahteraan masyarakat; Mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholders; taat hukum dan konsisten dengan norma internasional; dan terintegrasi kedalam kegiatan bisnis. Dalam hal mengintegrasikan program CSR kedalam kegiatan bisnis korporasi, maka Pertamina berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan; memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan; serta meningkatkan reputasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha dan menerapkan mitigasi resiko bisnis (pertamina, *online*).

Beberapa program CSR yang ditetapkan oleh JOB P-PEJ meliputi pemberian bantuan pada bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, kompensasi dan rekonsiliasi, serta *government and public relation* atau yang sering dikenal dengan istilah bidang kehumasan. Bentuk CSR pada bidang kesehatan seperti pemberian bantuan dana pada pos-pos kesehatan desa dan pembuatan sumur. Sedangkan pada bidang pendidikan berupa pemberian dana bantuan pada yayasan atau sekolah-sekolah untuk perbaikan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Kemudian bentuk tanggung jawab perusahaan pada bidang kompensasi dan rekonsiliasi seperti pemberian kompensasi atas dampak Flare pada masyarakat yang berada disekitar wilayah pemrosesan (*Processing Area*). Pada bidang infrastruktur, pihak JOB-PPEJ juga memberikan bantuan untuk pembangunan kantor desa, pembangunan masjid, dan sebagainya. Sedangkan pada bidang kehumasan, pihak JOB-PPEJ juga melakukan bantuan berupa pemberian beras kepada himpunan nelayan kabupaten Tuban, sebagai sponsorship pada beberapa

acara di Kabupaten Tuban, dan sebagainya. (Sumber: data program CSR 2013 *Joint Operating Body (JOB) Pertamina-PetroChina East Java*)

Adapun tujuan dari pelaksanaan CSR di JOB P-PEJ salah satunya adalah untuk mewujudkan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) di mana pada saat ini mulai dikembangkan adanya pembangunan yang diarahkan pada *sustainable development*. Definisi pembangunan berkelanjutan di sini adalah menurut Budimanta (2005) adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Pembangunan berkelanjutan ini pada hakekatnya adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi generasi mendatang untuk mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Namun juga dikembangkan lebih luas lagi mencakup tiga aspek yakni: pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi (lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*). *Sustainability* inilah yang sudah seharusnya menjadi tujuan akhir dari sebuah perusahaan untuk tetap menjaga dan mengembangkan perusahaannya dengan memperhatikan aspek sekitarnya. Terlebih pada perusahaan atau perseroan yang bergerak pada bidang

sumber daya alam seperti pada JOB P-PEJ ini. Keberlanjutan (*sustainability*) ini dapat diwujudkan salah satunya dengan implementasi CSR JOB P-PEJ itu sendiri.

Dewasa ini, pihak dari JOB P-PEJ sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar pelaksanaan program CSR dapat di rasakan manfaatnya oleh semua pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar lingkaran area JOB P-PEJ. Namun, dalam implementasi program CSR yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut tentunya juga masih terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang secara langsung juga berpengaruh pada upaya mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan khususnya. Terlebih kegiatan yang dilakukan oleh JOB P-PEJ ini berhubungan langsung dengan lingkungan dan tentunya juga menimbulkan *impact* terhadap lingkungan di sekitarnya terutama di desa Rahayu yang menjadi wilayah ring 1. Seperti permasalahan yang pernah terjadi di bulan September tahun 2009 yakni adanya kenaikan produksi dari JOB P-PEJ mengakibatkan meningkatnya api flare dan tingkat kebisingan disekitar lokasi CPA (*Central Processing Area*). *Flaring* (pembakaran) sendiri dalam Kepmen LH No. 129 pasal 5 merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah dari usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang diolah secara thermal mengacu pada peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlaku. Akibat panasnya obor (*flare*), H₂S, dan kebisingan mengakibatkan tanaman palawija tidak bisa berbuah, serta terganggunya kegiatan belajar mengajar di SDN Rahayu yang berlokasi dekat dengan flare CPA karena suara bising, panas, dan bau (Sumber: Laporan Dampak Flare JOB P-PEJ 2009).

Kasus seperti ini sudah semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk lebih memperhatikan lagi kondisi lingkungan serta masyarakat yang berada di lingkaran area perusahaan terlebih di wilayah ring 1 di desa Rahayu yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan operasional dari JOB P-PEJ. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi program CSR yang dilakukan oleh JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan” (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-PetroChina *East Java* di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah implementasi program CSR JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *Sustainable Development* di bidang lingkungan di Desa Rahayu?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi program CSR JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *Sustainable Development* di bidang lingkungan di Desa Rahayu?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program CSR JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *Sustainable Development* di bidang lingkungan di Desa Rahayu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program CSR JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *Sustainable Development* di bidang lingkungan di Desa Rahayu.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh karyawan JOB Pertamina-PetroChina *East Java* untuk mengetahui implementasi program *corporate social responsibility* yang telah ditetapkan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi perusahaannya dengan memperhatikan lingkungan serta masyarakat sosial yang berada di wilayah operasionalnya serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Secara Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai studi implementasi implementasi program

corporate social responsibility pada JOB Pertamina-PetroChina East Java sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development*.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik serta dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang lalu dan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai isi dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan. Adapun teori yang digunakan meliputi teori *welfare state*, administrasi lingkungan, implementasi kebijakan, *governance*, *Corporate Social Responsibility*, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), serta hubungan antara CSR dan *Sustainable Development*.

BAB III Metode Penelitian

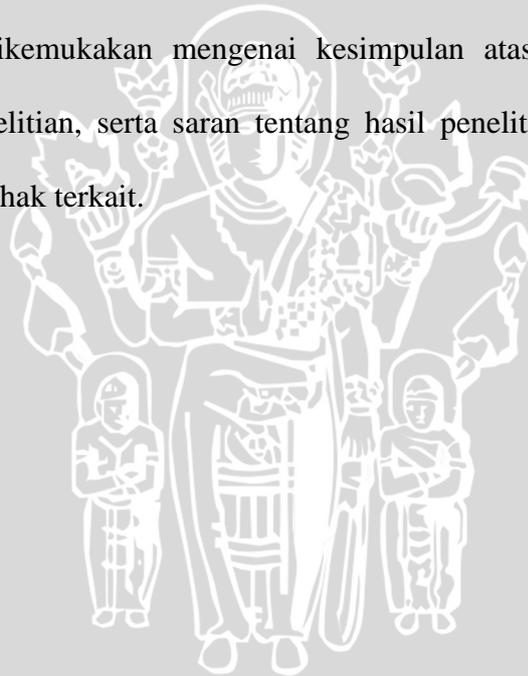
Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V Penutup

Pada bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan atas data yang telah dihasilkan dalam penelitian, serta saran tentang hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Menurut Herbert A. Simon dalam Thoha (1983: 11) mengatakan bahwa *“administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals”*. Yaitu, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Handyaningrat (1985:2) menjelaskan bahwa administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok-kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari *“Public Administrations”*. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah *Public Administration* itu di uraikan secara etimologis, maka *“Public”* berasal dari bahasa Latin *“Poplicus”* yang semula dari kata *“Populus”* atau *“People”* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. *“Administration”* juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“ad”* artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. Jadi, administrasi negara adalah pelayanan secara intensif terhadap rakyat. Menurut Waldo (1973:8) dalam bukunya *“Public Administration”* mengemukakan bahwa administrasi negara meliputi kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kelompok yang dimaksud di sini adalah pemerintah sebagai aparatur yang melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Administrasi Lingkungan

Pembangunan akan berhasil jika didukung oleh daya lingkungan karena pada hakekatnya, pembangunan sendiri mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan hidup. Soemarwoto (1989:146-147) menjelaskan bahwa:

“Pembangunan bertujuan tujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan justru kemerosotan”.

Untuk menjaga agar lingkungan tetap terjaga dalam suatu proses pembangunan, diperlukan sebuah pengelolaan yang baik supaya pembangunan tersebut tidak berdampak serius pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, adanya administrasi lingkungan menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam pembangunan.

Dalam memahami konsep administrasi lingkungan, setidaknya terdapat dua unsur di dalamnya, yakni administrasi dan lingkungan. Menurut Siagian (1994:3), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Sedangkan definisi lingkungan hidup sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan dua konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yaitu pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan bersama dengan memperhatikan lingkungan (berwawasan lingkungan). Sehingga akan terjalin suatu hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara kegiatan pemerintah dengan masyarakat.

Untuk menciptakan administrasi lingkungan yang baik, diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1997, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU nomor 23 tahun 1997 adalah:

- a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f) terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Soemarwoto (1989:86) menjelaskan bahwa:

“pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang luas dengan beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, ialah perencanaan dini pengelolaan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat, ialah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia”.

Makin meningkatnya upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka akan meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan untuk mengelola serta upaya pengendalian dampak serta resiko lingkungan hidup. Untuk itu, dalam mewujudkan administrasi lingkungan yang baik di negara Indonesia, maka setiap usaha yang akan berdiri harus memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sebagaimana pada pasal 16 ayat 1 UU nomor 23 tahun 1997 yang berbunyi bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Adapun pengertian AMDAL sendiri adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi lingkungan adalah suatu proses kegiatan dua orang atau lebih, yang dimaksud di sini adalah pemerintah beserta masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan tetap memperhatikan lingkungan. Sehingga kegiatan tersebut tidak membawa

dampak bagi kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan administrasi lingkungan tersebut, diperlukan upaya-upaya pengelolaan atau manajemen lingkungan hidup. Sebagai realisasinya, setiap badan usaha maupun kegiatan yang akan didirikan harus memiliki ijin analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan adanya AMDAL tersebut, maka resiko dan dampak yang akan ditimbulkan oleh usaha tersebut dapat diprediksi sejak dini, sehingga tercapai keseimbangan ekosistem.

B. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani. Akar kata *policy* dalam bahasa Yunani yaitu *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (Negara) dan pada akhirnya berkembang menjadi *policie* di masa Inggris pertengahan yang mempunyai arti menanggapi masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2000:51).

Pengertian kebijakan menurut Friedrich dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2004:3) dijelaskan bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Budiardjo (2009:20) mengatakan bahwa kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Sedangkan menurut pendapat Tangkilisan (2003:1) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi mengutip pendapat Thomas R. Dye yang mengartikan bahwa: *public policy is whatever governments choose to or not to do*. Yaitu, kebijakan publik adalah apapun yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

1. Implementasi Kebijakan

Suatu proses kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berakhir setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan disetujui melainkan ada tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Implementasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari sebuah kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak terutama masyarakat pada umumnya serta agar terwujudnya tujuan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang,

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden) (Wahab, 2004:64).

Pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

”Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137).

Menurut Widodo (2012:88) menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang

masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Pendapat Darwin yang dikutip oleh Widodo (2012:89) menyebutkan bahwa persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan serta *target group* atau kelompok sasaran.

Adapun unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan setelah kebijakan itu diformulasikan dan ditetapkan yang melibatkan sejumlah sumber-sumber serta unsur-unsur di dalamnya. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk semua kalangan yang menjadi sasaran dalam

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan perumusan yang sedemikian rupa tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan secara benar dan tepat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

(a) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102). Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- b) Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Faktor pendukung sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi. Apabila banyak terdapat faktor pendukung, maka proses implementasi akan dengan mudah dilaksanakan dan mampu mencapai target sasaran.

(b) Faktor penghambat implementasi kebijakan

Selain faktor pendukung, sebuah proses implementasi kebijakan tidak selalu berhasil dalam setiap pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Bambang Sunggono (1994:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson (dalam Sunggono, 1994:144-145) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sebuah kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan

oleh pemerintah atau negara. Jadi, jika perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka suatu kebijakan tersebut tidak efektif.

3. Implementasi Program

Implementasi adalah suatu program yang disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan menempuh langkah-langkah pokok, serta mencapai tujuan yang diharapkan (Djamarah, 2006). Adapun tahap-tahap dari implementasi adalah:

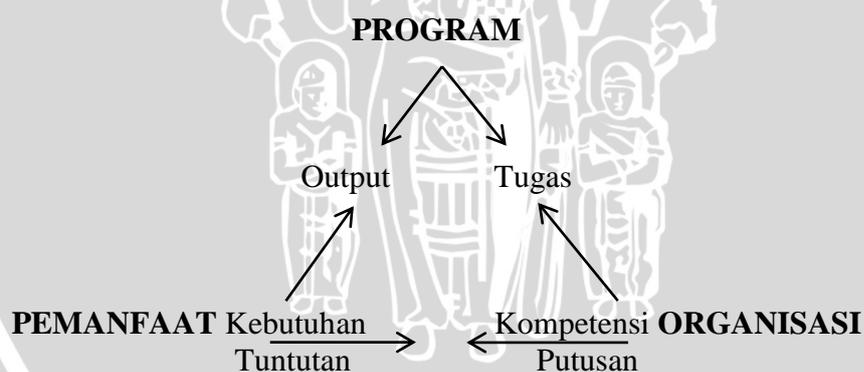
1. Perencanaan
Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Mengumpulkan dan menganalisa informasi.
2. Pengorganisasian
Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan mengadakan latihan dan pendidikan
3. Pengarahan
Membimbing dan memotivasi dan melakukan supervisi serta menyusun kerangka waktu.
4. Pengawasan
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibandingkan dengan dengan rencana menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi.

Adapun definisi program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Apabila dihubungkan dengan sebuah kebijakan, maka pada dasarnya kebijakan publik tersebut tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*. Sedangkan defisini program menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan;

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.

Maksud dari pendapat tersebut adalah bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (Akib dan Tarigan, 2000:12). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian implementasi program Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program (Korten)

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi

program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran (Akib dan Tarigan, 2000:12)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya implementasi adalah tahapan setelah program itu ditetapkan. Proses implementasi baru dapat dimulai jika tujuan serta sasaran dari sebuah program tersebut telah dibuat dan ditetapkan. Implementasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah ditetapkan tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk semua kalangan yang menjadi sasaran dari program tersebut.

D. Governance

1. Definisi Governance

Menurut Daniri (2005), *governance* kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks *good governance*, *governance* sering juga disebut tata pamong. Sementara itu, OECD (*Organizational for Economic Corporation and Development*) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :

“Governance is the systems by which organizations is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shareholders, society, and the other

stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization affairs. By doing this, it also provides this structure through which the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Definisi *governance* menurut OECD ini adalah melihat *governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, pengertian ini konsisten dengan Turnbull dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) seperti yang dikutip Tjager (2003:25-26) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegangn pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*shareholders*)”.

Dalam bukunya I Nyoman Tjager (2003:26-27), istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Dalam laporan ini mendefinisikan *corporate governance* sebagai “...*the system by which organisations are directed and controlled* (suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi)”. Adapun definisi lain dari

Cadbury Committee yang dikutip Tjager (2003:26-27) memandang *corporate governance* sebagai:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka)”.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“the structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja)” (Tjager, 2003: 27-28).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan pengaturan yang mengatur dan mengendalikan suatu organisasi perusahaan. Terutama hubungan para aktor yang berkepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal perusahaan. Adanya pengaturan ini adalah untuk mencapai tujuan perusahaan serta meminimalisir kesalahan-kesalahan serta penyimpangan pada perusahaan yang juga akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi perusahaan.

3. *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai sebuah konsep yang sedang berkembang dan populer di berbagai negara, teori GCG tidak hanya memiliki definisi tunggal. Ada banyak pendapat yang mengemukakan arti tentang GCG itu sendiri. Menurut Komite Cadbury

dalam Daniri (2005:6-7), GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada para *stakeholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggung-jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders*. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness* (Daniri, 2005:7).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan memenejemen sector bisnis dalam meningkatkan kemajuan usahanya serta akuntabilitas perusahaan yang juga menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entinitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

4. Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG)

Setelah definisi GCG yang dipaparkan di atas, maka berikut ini dibahas mengenai prinsip-prinsip yang dikandung dalam GCG. Di sini secara umum ada lima prinsip dasar yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Daniri (2005:9-12) memaparkan prinsip-prinsip dasar GCG sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan informasi)
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku.
4. *Independency* (Kemandirian)
Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)
Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan (Daniri, 2005:9-12).

E. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Salah satu prinsip dalam GCG adalah tentang *responsibility* atau pertanggungjawaban. Prinsip ini kemudian menelurkan gagasan CSR atau peran perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Adanya tanggung jawab ini dimaksudkan agar kegiatan perusahaan bisa tetap berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar (lingkungan dan sosial sekitar perusahaan) agar tidak menimbulkan dampak yang serius. Tanggung jawab perusahaan untuk meminimalisir akan dampak dari kegiatan serta bentuk apresiasi untuk sosial maupun lingkungan sekitar perusahaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan adanya kegiatan CSR yang sudah diprogramkan.

1. Definisi CSR

Konsep CSR sebenarnya memiliki definisi yang bervariasi dan sangat luas. Pengertian CSR menurut Lord Holme dan Richard Watt (dalam Hadi, 2011:46) yaitu: *“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large”*. Yaitu CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas.

Adapun pengertian lain dari CSR menurut Johnson dan Johnson (dalam Hadi, 2011:46) menyatakan bahwa: *“CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society”*. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebuah definisi yang lebih luas oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) menyatakan bahwa “CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* adalah suatu bentuk kontribusi dari organisasi perusahaan yang diberikan kepada masyarakat serta lingkungan sekitar atas dampak dari kegiatan yang dilakukan. Adanya CSR ini juga bertujuan untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup. CSR ini diharapkan mampu menjadi simbiosis mutualisme bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan sekitar.

2. Manfaat CSR

Adanya CSR membawa keuntungan serta manfaat bagi sebuah perusahaan untuk tetap menjaga dan mengembangkan eksistensinya dalam dunia bisnis. Suhandri M. Putri dalam (Untung, 2009:6-7) mengemukakan adanya 10 (sepuluh) keuntungan yang dapat diperoleh jika perusahaan melakukan program CSR, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Sedangkan pendapat lain tentang manfaat penerapan CSR ini juga dikemukakan oleh Radyati (2008:74) yaitu:

- a. Manfaat dalam jangka panjang adalah adanya berkesinambungan bisnis (*business sustainability*)
- b. Manfaat jangka pendek adalah perusahaan akan mendapat dukungan dari masyarakat, karena melalui kegiatan CSR perusahaan menjadi lebih dekat dengan masyarakat
- c. Adanya jaminan supply bahan baku
- d. Reputasi perusahaan membaik

Dari uraian di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa penerapan *corporate social responsibility* membawa banyak keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Adanya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga akan memunculkan *feedback* yang baik antar *stakeholders*. Dengan pelaksanaan CSR secara tepat, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan.

3. Prinsip-Prinsip CSR

Ranah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas. Di mana pelaksanaan CSR tersebut haruslah sesuai dengan aturan yang legal. Untuk itu, adanya prinsip menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan CSR itu sendiri. Banyak para ahli yang menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam CSR. Pendapat Alyson Warhurst (1998) yang dikutip oleh Hadi (2011:63) mengajukan prinsip-prinsip *corporate social responsibility*, sebagai berikut:

- 1) Prioritas korporat: Mengakui tanggungjawab sosial sebagai prioritas tertinggi perusahaan, sehingga gejala aktivitas (operasi) perusahaan tak dapat dilepas dari tanggungjawab social.
- 2) Manajemen Terpadu: Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi.
- 3) Proses perbaikan: Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kebijakan sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
- 4) Pendidikan karyawan: Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.
- 5) Pengkajian: Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyekbaru dan sebelum menutupsatu fasilitas atau meninggalkan lokasi proyek.
- 6) Produk jasa: Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negative terhadap lingkungan.
- 7) Informasi Publik: Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan tentang penggunaan yang aman, dan begitu pula dengan jasa .
- 8) Fasilitas dan operasi: Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian ampak lingkungan.
- 9) Penelitian: Melakukan atau mendukung penelitian dampak social bahan baku, produk, prosesesei dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana mengurangi dampak negatif.
- 10) Prinsip pencegahan: Modifikasi manufaktur, pemasaran atau menggunkan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah
- 11) Kontraktor dan Pemasok: Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, dismping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
- 12) Siaga menghadapi darurat: Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitaslokal. Sekaligus mengenalipotensi bahaya yang muncul.
- 13) Transfer *Best Practice*: Berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah sertalembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggungjawab sosial.
- 14) Memberi Sumbangan: Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggungjawab sosisal.

- 15) Keterbukaan: menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan member respons terhadap potensial hazard dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.
- 16) Pencapaian dan pelaporan: Mengevaluasi kinerja sosial melaksanakan audit social secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan criteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Sedangkan pendapat Crowther David yang dikutip oleh Nor Hadi (2011:59) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab social (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu: *sustainability*; *accountability*; dan *transparency*. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. *Accountabilty*, upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Sedangkan *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksrernal.

4. Bentuk dan Program CSR

Menurut Zimmerer yang dikutip oleh Suryana (2006:232) ada beberapa macam pertanggung-jawaban perusahaan, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.
2. Tanggungjawab terhadap karyawan. Menurut Ronal J. Ebert (Suryana, 2006:233) semua aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap karyawan.
3. Tanggungjawab terhadap pelanggan. Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronal J. Ebert (Suryana, 2006:233) ada dua kategori yaitu, (1) menyediakan barang dan jasa yang adil dan berkualitas, dan (2) memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar.
4. Tanggungjawab terhadap investor. Tanggungjawab terhadap investor adalah menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimalkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggungjawab untuk melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan setepat mungkin.
5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut berada.

Sedangkan Edi Suharto (2010:135) menjelaskan tentang program CSR yang meliputi:

1. CSR Bidang Pendidikan
Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan. Misalnya memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan yang menunjang pendidikan, dan lain sebagainya.
2. CSR Bidang Kesehatan
Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target Millenium Development Goals (MDGs). Dengan demikian, program-program CSR sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang kesehatan ini. Program-program CSR bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat. Misalnya memberikan pengobatan gratis, pemberian bantuan makanan tambahan untuk anak-anak dan balita, serta bantuan peralatan posyandu dan perbaikan infrastruktur Puskesmas di daerah operasional mereka dan lain sebagainya.

3. CSR Bidang Lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan seringkali dianggap berada dalam ranah publik. Di masa lalu, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang mengadopsi perilaku ranah lingkungan, baik melalui regulasi, saksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan. Namun, kecenderungan ini kini terbalik. Kiprah perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan global mulai nyata dan meluas. Esty san Andrew Winston (Suharto, 2010:149) berpendapat setidaknya ada dua sumber tekanan yang mempengaruhi perusahaan sadar akan lingkungan.

- a. semakin terbatasnya sumber daya alam di dunia ini, yang pada akhirnya dapat menjadi kendala utama bisnis dan kemungkinan besar dapat mengancam keberadaan spesies manusia.
- b. keterbatasan sumber daya alam ini kemudian menyetir arah pasar sehingga perusahaan dihadapkan pada banyak dan beragamnya pihak yang peduli terhadap lingkungan.

4. CSR Bidang Modal Sosial

Bidang sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

5. CSR bidang ekonomi dan kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan CSR.

Dalam Wahyudi dan Busyra (2008:36), setidaknya terdapat lima pilar aktivitas CSR yang dipromosikan dengan aktif oleh *Indonesia Business Links* (IBL) yaitu:

1. *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
2. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
3. *Assessing social cohesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging good governance* adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).

5. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk program CSR meliputi berbagai macam bidang dan bukan semata-mata hanya melaksanakan program CSR yang berorientasi pada keuntungan internal saja. CSR perusahaan harus dapat menyentuh semua *stakeholders* serta mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders* tersebut. Misalnya saja CSR suatu perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan, mampu meningkatkan kualitas SDM melalui program pemberdayaan, dan lain sebagainya.

5. Tahap Implementasi CSR

CSR sendiri diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta sebagai suatu program yang berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program tersebut tidak akan diketahui manfaatnya jika tidak diimplementasikan. Dalam implementasi CSR sendiri ada beberapa tahapan menurut Wibisono (2007: 121-125) adalah:

- a. Tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yakni:
 1. *Awareness building*
Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi, dan lain sebagainya.
 2. *CSR Assesment*
Merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
 3. *CSR manual building*
Merupakan pedoman implementasi dari hasil assesment yang telah dilakukan. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang

dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman, dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Tahap Implementasi.

Tahapan implementasi ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan.

2. Implementasi

Implementasi kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun.

3. Internalisasi

Adalah tahap jangka panjang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan seperti melalui system manajemen kinerja.

c. Tahapan evaluasi

Tahapan evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan dengan pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi juga bias dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan.

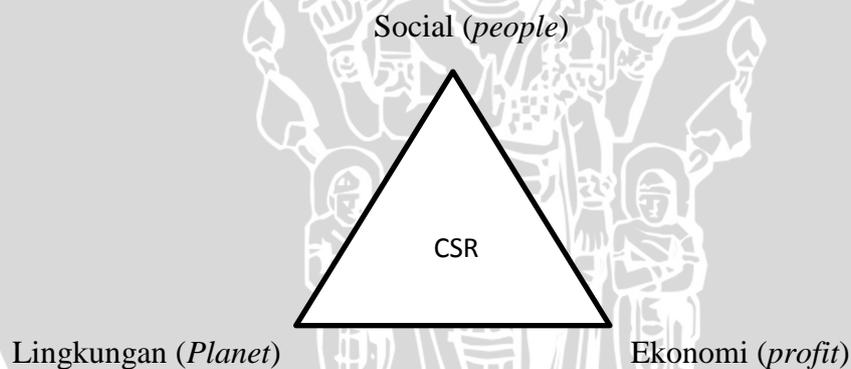
d. Tahapan pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi hasil untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Oleh karena itu selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder yang memerlukan informasi tersebut. Perusahaan bebas menentukan bentuk atau format reporting yang dibuatnya karena memang belum ada standart baku yang diberlakukan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi CSR suatu perusahaan, tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap awal (perencanaan) hingga evaluasi dan pelaporan. Struktur tahapan tersebut berurutan dan harus diikuti apabila ingin program CSR yang diimplementasikan tersebut berhasil dan sesuai sasaran.

6. Anatomi *Triple Bottom Line* dalam CSR

Paradigma mengenai *triple bottom line* menjelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan pada aspek *profit* (keuntungan) semata, melainkan juga meliputi aspek lingkungan dan sosial. Pendapat Elkington yang dikutip oleh Wahyudi dan Busyra (2008:134) yang mengatakan bahwa 3BL (*triple bottom line*) yang diinterpretasikannya menjadi *triple P* (3P) sebagai suatu persyaratan jika perusahaan yang ingin berkelanjutan. Aspek ekonomi diungkapkan dengan *profit*, aspek sosial diungkapkan dengan *people*, dan aspek lingkungan diungkapkan dengan *planet*. Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Hubungan antar *Triple “P”*
Sumber: Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri (2008:134)

Hubungan antar triple “P” berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa 3P tersebut adalah 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana yang di katakana oleh Wahyudi dan Busyra (2008:135) bahwa apabila perusahaan tidak mengimplementasikannya, hanya menekankan pada salah satu aspek saja, maka perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai bentuk

resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mampu beraktivitas secara berkelanjutan. Untuk memahami urgensi dari masing-masing aspek dalam 3P dalam implementasi CSR oleh perusahaan menurut Wahyudi dan Busyra (2008:135) dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Profit* (keuntungan)
Motivasi utama dari setiap kegiatan usaha jelas adalah mencari keuntungan (profit). Profit sendiri pada hakekatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
2. *People* (masyarakat)
Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholders penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan.
3. *Planet* (Lingkungan)
Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan profit dan people telah menjadi bagian dari suatu aktivitas dunia usaha, belumlah lengkap sebetulnya perusahaan memasukkan aspek lingkungan (planet) sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Namun demikian perlu dipahami juga apa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptabel untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawabnya kepada lingkungan.

Ketiga aspek yang meliputi *people*, *planet*, dan *profit* di atas merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep CSR yang nantinya wajib diimplementasikan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sebab jika hanya fokus pada salah satu aspek saja, maka keberlanjutan dari perusahaan juga dapat dikatakan tidak mampu bertahan lama. Hal ini seperti pendapat Wahyudi dan Busyra (2008:140) yang mengatakan bahwa apabila salah satu

komponen ditinggalkan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengubah paradigmanya menjadi *corporate image*. Sehingga akan berdampak pada jaminan kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas usaha suatu perusahaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan program CSR, perusahaan tidak hanya memberikan perhatian penuh kepada salah satu aspek saja. Namun ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi juga harus diperhatikan dan diimplementasikan secara seimbang, ini untuk menjaga kelangsungan perusahaan tersebut.

7. ISO 26000 sebagai Pedoman CSR dalam mewujudkan *Sustainable Development*

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Wahyudi dan Busyra (2008:142) menjelaskan bahwa tujuan dari ISO 26000 adalah memberikan bimbingan tentang implementasi dari *Social Responsibility* (SR). Diharapkan melalui bimbingan ISO 26000 ini akan mendukung pengembangan praktek SR dalam sektor swasta dan public. Semua itu dikembangkan untuk memperjelas unsur-unsur CSR yang dibakukan meliputi:

1. Prinsip-prinsip dan isu yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial;
2. Pengintegrasian, penerapan, dan mempromosikan praktek tanggung jawab sosial;
3. Mengidentifikasi dan menarik hati stakeholders;

4. Komitmen berkomunikasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial;
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui sampai tanggung jawab sosial (Wahyudi dan Busyra, 2008:142-143).

Dalam buku yang berjudul *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi* yang ditulis oleh Isa Wahyudi dan Busyra Azheri (2008:143-144) mengemukakan bahwa,

“ISO 26000 telah berusaha merumuskan tanggung jawab sosial yaitu “...*Social responsibility is the responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour...*”. Dalam terjemahan bebasnya pengertian tanggung jawab dari suatu organisasi atas dampak dari suatu keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang etis dan transparan. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka pengelola organisasi dan/atau perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam setiap kegiatannya, yakni:

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mempertimbangkan harapan *stakeholders*;
3. Mematuhi ketentuan hukum dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan
4. Organisasi yang terintegrasi”.

Bedasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa ISO 26000 memberi standart dan pedoman bagi perusahaan baik swasta maupun organisasi public lainnya untuk melaksanakan kegiatan CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa hal dalam setiap kegiatannya.

ISO 26000 dimaksudkan untuk membantu organisasi untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong mereka untuk melampaui kepatuhan hukum, mengakui bahwa sesuai dengan hukum adalah tugas pokok dari setiap organisasi dan merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial mereka. Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan pemahaman umum di bidang tanggung jawab sosial, dan untuk melengkapi

instrumen lain dan inisiatif untuk tanggung jawab sosial, bukan untuk menggantikan mereka.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational Governance*



Gambar 3. Poin Penting Penerapan CSR dalam ISO 26000
Sumber: (a-consultant, internet)

Berdasarkan konsep ISO 26000 yang digambarkan di atas, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya seperti aspek lingkungan, maka

perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosial. Misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Dalam menerapkan ISO 26000, disarankan bahwa organisasi mempertimbangkan sosial, lingkungan, keanekaragaman hukum, budaya, politik dan organisasi, serta perbedaan dalam kondisi ekonomi, sementara yang konsisten dengan norma-norma perilaku internasional. (Sumber: *a-consultant, internet*)

F. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Hubungan antara CSR perusahaan dengan *sustainable development* terkait dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya berdasar pada profit atau keuntungan yang nantinya akan diperoleh perusahaan semata. Tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Adanya CSR yang dijalankan oleh perusahaan adalah sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

1. Definisi Pembangunan berkelanjutan

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yang terus tereksplorasi. Pengertian dari tidak mengurangi dan

mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam dan juga memperhatikan generasi yang akan datang.

Pendapat Friedman yang dikutip oleh Agus Suryono (2010:20-21) mengemukakan bahwa ide dasar dari konsep *sustainable development* bermula dari “*The Club of Rome*” pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer para ahli ilmu teknik dan ilmuwan se-Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai “*the limits to growth*”. Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Definisi lain *sustainable development* yang terkenal adalah dari Burtland Report (*World Commission on Environment and Development*, 1987) yaitu: “*Sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi generasi mendatang untuk mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada definisi yang dikemukakan oleh WCED ini setidaknya terdapat dua hal domain yaitu menyangkut pembangunan jangka panjang serta pembangunan yang dapat di manfaatkan oleh generasi yang akan datang akan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

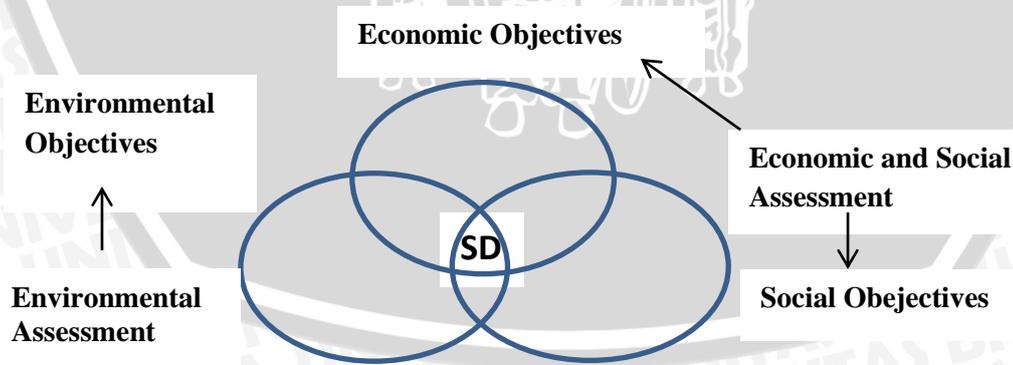
Sutamihardja (2004:43) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Jadi secara definisi, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu pembangunan yang tidak hanya mengacu pada ekosistem dalam lingkungan melainkan juga diarahkan pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

2. Dimensi dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

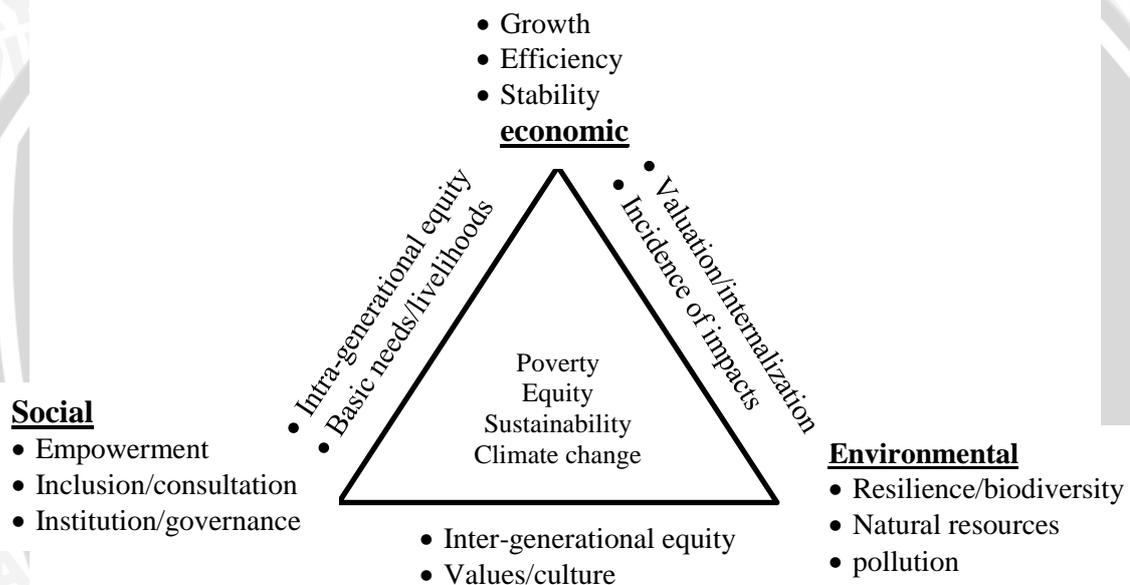
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus dalam ruang lingkup lingkungan saja, melainkan juga pada 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga hal ini merupakan dimensi yang berkaitan dan merupakan pilar pendorong dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Di bawah ini merupakan gambar hubungan ketiga dimensi dalam mewujudkan *sustainable development*.



Gambar 4. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: *Power Point section PR Supervisor JOB Pertamina-Petrochina East Java*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai *sustainable development* adalah dengan sinkronisasi ketiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut (Munasinghe, 2013) menjelaskan bahwa segitiga pembangunan berkelanjutan terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Gambar di bawah ini menunjukkan keterkaitan antar aspek dalam pembangunan berkelanjutan.



Gambar 5. Sustainable development triangle – key elements and interconnections

Sumber: (Munasinghe, 2013)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa dalam segitiga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam aspek ekonomi terdiri dari tiga variabel untuk menjadikan keberlanjutan ekonomi yaitu pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Sedangkan untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan, harus

menekankan pada tiga unsur yaitu biodiversitas, sumber daya alam, dan polusi. Untuk mencapai keberlanjutan sosial, harus mampu melakukan pemberdayaan, inklusi, dan institusi.

Munasinghe (2013) menjelaskan bahwa “*Economic progress is evaluated in terms of welfare (or utility) – measured as willingness to pay for goods and services consumed*”. Yaitu kemajuan ekonomi dapat dievaluasi pada tingkat kesejahteraan atau kebutuhan yang diukur sebagai ketersediaan untuk membayar barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, salah satunya bisa diukur dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kemampuan mereka untuk membayar barang dan jasa yang dikonsumsi.

Costanza yang dikutip oleh Munashinge (2013) mengatakan bahwa “*The environmental interpretation of sustainability focuses on the overall viability and health of living systems—defined in terms of a comprehensive, multi-scale, dynamic, hierarchical measure of resilience, vigor and organization*”. Dalam terjemahan biasa yaitu interpretasi dari keberlanjutan lingkungan berfokus pada kelangsungan hidup secara keseluruhan dan kesehatan sistem kehidupan—didefinisikan dalam istilah yang komprehensif, multi-skala, dinamis, ukuran hirarkis ketahanan, kekuatan dan organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai keberlanjutan ekologi, setidaknya fokus pada kelangsungan hidup dan terciptanya sistem kehidupan yang sehat. Pendapat Pimm yang dikutip oleh Munashinge (2013) juga menjelaskan bahwa “*Resilience is the potential of a system state to maintain its structure/function in the face of disturbance*”. Yaitu

ketahanan adalah potensi keadaan sistem untuk mempertahankan struktur/fungsi dalam menghadapi gangguan. Munashinge (2013) juga mengatakan bahwa “*Natural systems tend to be more vulnerable to rapid external changes than social systems*”. Yaitu sistem alam akan cenderung lebih rentan terhadap perubahan eksternal yang cepat dibandingkan dengan sistem sosial. Hal ini dapat pula diartikan bahwa sistem alam memiliki rentan terhadap perubahan eksternal yang lebih cepat daripada dalam sistem sosial, karena sistem sosial mampu melakukan adaptasi sedangkan sistem alam akan selalui mengikuti.

Sedangkan pada aspek sosial, Munashinge (2013) mengatakan bahwa “*Social development usually refers to improvements in both individual well-being and the overall social welfare*”. Yaitu pembangunan sosial biasanya mengacu pada perbaikan, baik pada kesejahteraan individu maupun kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Ketiga ruang lingkup di atas adalah poin penting dalam mewujudkan *sustainable development*. Sedangkan dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi menurut Djajadiningrat dan Famiola (2004) adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial. Strategi pembangunan harus dilandasi “premis” pada hal seperti: lebih meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan, dan pada pemerataan ekonomi yang dicapai harus ada keseimbangan distribusi kesejahteraan. Berarti, pembangunan generasi masa kini harus selalu mengindahkan generasi masadepan untuk mencapai kebutuhannya.
2. Pembangunan Berkelanjutan Menghargai Keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah persyaratan untuk memastikan bahwasumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang.
3. Pembangunan Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia

dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak.

4. Pembangunan Berkelanjutan Meminta Perspektif Jangka Panjang. Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

Berdasarkan pendapat tersebut, pembangunan berkelanjutan akan mampu diwujudkan apabila pihak yang melaksanakan memegang prinsip-prinsip sebagaimana yang dijelaskan di atas. Adapun prinsip ini menjadi sangat penting dan menjadi pedoman suatu organisasi untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

3. Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan

Surna T. Djajadiningrat (2005:123) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya (Sugandhy dan Rustam, 2009:22).

Pada hakekatnya, pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan aktivitas yang memanfaatkan seluruh sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan juga berupaya untuk memelihara keseimbangan antara lingkungan dan manusia sehingga keduanya tetap dalam keserasian dan seimbang. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itulah yang seharusnya menjadi dasar dari setiap pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan menjaga keberlanjutan fungsi alam.

Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bagian yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan pendapat Soemarwoto (1989:146) yang mengatakan bahwa:

“pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi Antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Oleh karena itu, tidak akan terjadi sebuah pembangunan dalam kehidupan manusia jika tidak ada lingkungan yang mendukung kearah terwujudnya pembangunan tersebut”.

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam (Soemarwoto, 1989:146). Lebih lanjut pendapat Emil Salim (1992:3) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan

antara ekosistem alam dengan manusia supaya sumberdaya alam tersebut tetap bisa di manfaatkan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terpeliharanya keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta anggota masyarakat, yang dapat di disalurkan melalui perseorangan, oraganisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mendukung yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya alam yang cukup, serta lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai (Soemarwoto, 1989:149).

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan social dalam

melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutannya merupakan tugas bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bertumpu pada kerjasama antar actor yang terlibat. Upaya untuk memperluas jangkauan dan kesadaran lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan agar dapat mengikat komitmen semua pihak yangn terkait guna terwujudnya pembangunan berlanjutan. Askar Jaya (2004) menegaskan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.
2. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan.

Secara ideal, pembangunan berkelanjutan membutuhkan pencapaian keberlanjutan ekologis, yakni akan menjamin eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain:

1. Memelihara (mempertahankan) itegrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
2. Memelihara integrasi tatanan lingkungan agar system penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin;
3. Memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan lingkungan.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan perlu ada indikator untuk mengukur apakah sudah sustainable atau belum. Redaksi (2009) mengungkapkan bahwa tolok ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
2. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya takterbarukan (*non-renewable resources*).
3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang lingkungan, terdapat tolok ukur yang menjadi acuan dalam mengelola lingkungan. Dari keempat tolok ukur yang disebutkan di atas, apabila suatu organisasi mampu dan berhasil mencapai keempat hal tersebut, maka secara langsung mereka telah mampu mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan atau *environmental sustainability*.

4. Posisi BUMN dalam Mewujudkan *Sustainable Development*

Sebagai sebuah negara yang berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, maka negara tersebut harus berperan aktif dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup warganya seperti pada teori yang dijelaskan di atas. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan, pengelolaan perekonomian, maupun kebijakan-kebijakan lain yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu realisasinya adalah dapat diwujudkan melalui badan-badan atau perusahaan milik negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah (negara). Sebagaimana pada pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Salah satu perusahaan (BUMN) yang sebagian besar modalnya dari pemerintah (negara) adalah Persero Terbuka (PT). Dalam konteks ini, PT.PERTAMINA adalah salah satu perusahaan milik negara yang sebagian besar modalnya berasal dari negara.

Pada dasarnya, kegiatan BUMN harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, ketentuan umum lainnya, maupun nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan dalam perusahaan milik negara seharusnya juga mendukung pembangunan. Menurut Agus Suryono (2010:98), tujuan dari pembangunan sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, memberi

ruang bagi nilai-nilai kepentingan serta aspirasi masyarakat sehingga menemukan kompromi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Fungsi dari negara seperti yang telah dijelaskan pada subbab di atas salah satunya adalah menjamin kesejahteraan warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya dengan membuat kebijakan serta peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan taraf hidup, menanggulangi kemiskinan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk nyata yang dapat dilakukan dengan menerapkan program-program pada perusahaan milik negara atau BUMN yang secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada dasarnya, posisi PT.Pertamina sebagai BUMN dapat dikategorikan sebagai implementor kebijakan negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui program-program yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Penetapan program yang menunjang *sustainable development* tersebut tentunya juga berdasarkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satu bentuk realita perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah melalui program CSR. Melalui program CSR yang diimplementasikan ini, maka eksistensi sebuah perusahaan akan dapat terus berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi eksternal perusahaan terutama lingkungan. Terlebih pada PT.Pertamina yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tentunya, kegiatan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan akan memberi dampak negatif pada ekologi.

Sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan perusahaan yang konsisten pada pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kewajiban.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi BUMN adalah sebagai implementor kebijakan pemerintah melalui program-program yang telah ditetapkan perusahaan yang berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata adalah program-program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai macam regulasi atas BUMN yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan juga telah ditetapkan oleh pemerintah.

G. Hubungan antara CSR dan *Sustainable Development*

Pembangunan yang berkelanjutan dengan CSR memiliki keterkaitan dalam hal tujuan perusahaan yang bukan semata-mata mencari keuntungan dan pertumbuhan berkonsekuensi penting. Perusahaan harus mengakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem lingkungan dan sistem sosial, oleh karena itu perlu juga mengakui adanya keterbatasan sumber daya alam dan mengasumsikan tanggung jawab bersama atas penggunaan dan pengembangan sumber daya sosial sehingga paham betul dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh setiap tindakan yang diambil (Sukada *et al.* 2007).

Pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan hanya akan dapat dipertahankan kalau ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang menguntungkan. Dengan begitu, kehadiran perusahaan terasa memberi manfaat bagi masyarakat disekitarnya dan menjadi bagian dalam

kehidupan mereka. (Ambadar 2008). Dalam segi pemberdayaan ekonomi, perusahaan melalui program CSR-nya dapat membantu mengurangi kemiskinan (Radyati 2008). Kinerja ekonomi perusahaan berkaitan dengan sejauh mana perusahaan mampu memberikan dampak ekonomi (langsung/tidak langsung) kepada masyarakat. Menurut *Brundtland Report* dari WECD dalam Radyati (2008) menyatakan bahwa menjaga keberlangsungan berarti memelihara dan memproduksi lagi sumberdaya yang telah dipergunakan. CSR merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan sosial perusahaan sehingga pengembangan masyarakat akan seiring dengan pengembangan perusahaan. (Ambadar, 2008).

Hubungan antara *corporate social responsibility* dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebagai roda dalam mewujudkan *sustainable development*. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan CSR. Karena sesuai dengan konsep, prinsip, dimensi CSR yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan CSR sendiri adalah mencapai *sustainability* (keberlanjutan) yang mencakup tiga aspek yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di mana ketiga aspek tersebut juga merupakan indikator yang terdapat dalam pembangunan berkelanjutan. Jika dalam CSR di kenal dengan 3 poin penting dengan istilah *triple bottom line* yang meliputi *people, profit, planet*, maka dalam pembangunan berkelanjutan juga terdapat dimensi di dalamnya yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dasarnya, CSR merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *sustainability*.

1. *Sustainability dan Sustainable Development*

Beberapa istilah berikut ini kadang membingungkan orang, yakni: *sustainability*, *sustainable development*, dan *sustainable future*. *Sustainability* dan *sustainable future* adalah tujuan akhir yang akan dicapai melalui proses yang disebut dengan *sustainable development*. Definisi tentang pembangunan berkelanjutan sendiri sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sedangkan *sustainability* dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai keberlanjutan.

Menurut John Elkington, *sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). *Sustainability* terletak pada pertemuan antara tiga aspek, *people-social*; *planet-environment*; dan *profit-economic*. Selanjutnya terdapat dua jenis keberlanjutan menurut Dunphy et al, yakni *ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi) dan *human sustainability* (keberlanjutan manusia). Keberlanjutan ekologi mencakup disain organisasi yang dapat memberikan kontribusi kepada *sustainable economic development* (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan), perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan pembaharuan biosphere (permukaan bumi dan atmosfer yang ditinggali makhluk hidup).

Sedangkan menurut Agus Suryono (2010:21), *sustainability* diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Keberlanjutan manusia adalah meningkatkan kemampuan dan keahlian manusia untuk kinerja perusahaan yang tinggi dan berkelanjutan serta untuk kesejahteraan sosial (*well-being*) dan ekonomi masyarakat. Sebuah organisasi yang berkelanjutan berarti organisasi yang menjalankan kegiatan dengan memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain (kelompok masyarakat, lembaga pendidikan dan agama, pekerja, dan masyarakat umum), serta meningkatkan jaringan kerja sama yang mempersatukan mereka semua. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang harus tercapai dalam keberlanjutan adalah kesejahteraan ekonomi, sosial, dan pelestarian serta peremajaan lingkungan hidup.

Dengan tercapainya *sustainability*, berarti generasi mendatang minimal akan mendapat kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti kita saat ini. Akan lebih baik lagi jika bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan kita sekarang. *Sustainability* ini akan terwujud dengan sendirinya jika *sustainable development* telah mampu diterapkan. *Sustainability* sendiri merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.

2. *Sustainability* sebagai tujuan akhir CSR

Menurut Gregory C. Unruh, *sustainability* harus merupakan tujuan akhir perusahaan. Tujuan akhir tersebut diantaranya adalah menyeimbangkan antara kinerja ekonomi, kesejahteraan sosial (*well-being*), dan peremajaan serta pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan-hidup melalui kegiatan *corporate social responsibility* ini. Jadi hubungan antara CSR dengan pembangunan berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa proses mencapai tujuan akhir disebut sebagai *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sedangkan CSR adalah “*vehicle*” (kendaraan) untuk mencapai tujuan akhir tersebut, jadi CSR merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Dan di dalam pembangunan berkelanjutan ini terdapat indikator yang sangat penting yakni tercapainya *sustainability* yang mencakup beberapa aspek di dalamnya. Untuk mencapai keberlanjutan, maka program dan komitmen perusahaan akan CSR harus diimplementasikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang implementasi program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu dalam mewujudkan sustainable development. Untuk memperoleh gambaran tersebut secara menyeluruh, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta fenomena yang terjadi.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam, berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar ilmiah, untuk mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari pemahaman yang terkandung dalam implementasi program CSR pada JOB Pertamina-PetroChina *East Java* di Desa Rahayu, kecamatan Soko dalam mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan.

B. Fokus Penelitian

Ditentukannya fokus penelitian yang jelas dan tepat dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dilakukan. Penetapan focus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bertujuan untuk memberikat batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan obyek penelitian dan akan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maksud ditentukannya focus penelitian adalah untuk membatasi studi dan memasukkan atau mengeluarkan suatu informan yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2000:62).

Adapun fokus penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program CSR JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *Sustainable development* di bidang lingkungan yang ditinjau dari:
 - a. Studi implementasi sesuai yang ada pada BAB II, yang meliputi:
 1. Perencanaan Program CSR
 2. Implementor
 3. Sasaran Implementasi Program CSR
 4. Hasil Pelaksanaan CSR di JOB P-PEJ di Desa Rahayu
 5. *Outcomes* Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu
- b. Implementasi program CSR pada JOB Pertamina-PetroChina *East Java* dalam mewujudkan *sustainable development* bidang lingkungan

di Desa Rahayu yang ditinjau dari indikator pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program CSR JOB-PPEJ dalam mewujudkan *sustainable development* di lihat dari segi:
 - a. Faktor pendukung internal
 - b. Faktor pendukung eksternal
 - b. Faktor penghambat internal
 - c. Faktor penghambat eksternal

C. Lokasi dan situs penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pada:

1. Kantor JOB Pertamina-PetroChina *East Java* yang terletak di lingkaran area JOB-PPEJ tepatnya di desa Rahayu nomor 24 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban
2. Desa Rahayu (Masyarakat dan perangkat desa, serta LPMD)

Alasan penelitian menentukan lokasi dan situs penelitian di JOB Pertamina-PetroChina *East Java* adalah karena wilayah tersebut berada di lingkaran area perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber

daya alam khususnya minyak dan gas bumi. Adanya JOB-PPEJ ini tentunya membawa pengaruh bagi lingkungan dan masyarakat sekitar di mana proses operasional dari perusahaan ini adalah berhubungan langsung dengan lingkungan dan tentunya membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, pihak JOB-PPEJ sendiri harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Alasan tersebut menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian pada JOB Pertamina-PetroChina *East Java* yang berada di desa Rahayu Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

D. Sumber Data

Moleong (2009:157) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang akan diteliti. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek atau sasaran penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data akan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Adalah data-data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film (Moleong, 2009:157). Selain itu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya, kemudian diamati dan dicatat atau merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Untuk itu data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program CSR di kantor JOB Pertamina-PetroChina *East Java*, serta masyarakat Desa Rahayu.

b. Data Sekunder

Menurut Surachmad (1993:163) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri walaupun dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Dokumen penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dengan demikian, maka data sekunder dalam penelitian ini adalah dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip, dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Dalam teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat-alat indera untuk dapat memperoleh data-data yang

dapat mendukung penelitian secara nyata. Menurut Sugiyono (2009:230), observasi mempunyai tiga tahapan yaitu:

- 1) Observasi deskriptif dilakukan pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut sebagai *grand tour observation*, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Bila dilihat dari segi analisis, maka peneliti menggunakan analisis domain, sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui.
- 2) Observasi terfokus dilakukan ketika peneliti sudah melakukan mini tour observation yaitu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu.
- 3) Observasi terseleksi dilakukan ketika peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan, dan kesamaan antar kategori serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009:231). Pengumpulan data dengan melalui teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dan tanya jawab secara langsung dengan sumber data dan informan yang dapat mendukung data penelitian yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan topik permasalahan.

d. Triangulasi

Sugiyono (2009:241) menjelaskan bahwa dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan sarana atau benda, sehingga kegiatan

penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Moleong (2009:168) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Peneliti sendiri

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisis data.

2. Pedoman wawancara

Merupakan daftar pertanyaan yang terarah pada konsep penelitian, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi.

3. Catatan Lapangan

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penyajian penelitian kualitatif.

G. Analisis data

Analisis merupakan suatu proses kegiatan penganalisisan dari data serta informasi yang telah dikumpulkan yang kemudian diuraikan, diinterpretasikan dan diverifikasi untuk menarik kesimpulan sehingga akan memperoleh makna

dan hasil sebagaimana mestinya. Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Miles dan Huberman (1984) yang diterjemahkan oleh Sugiyono, 2009:247-253, yaitu:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

b. *Data Display* (penyajian data)

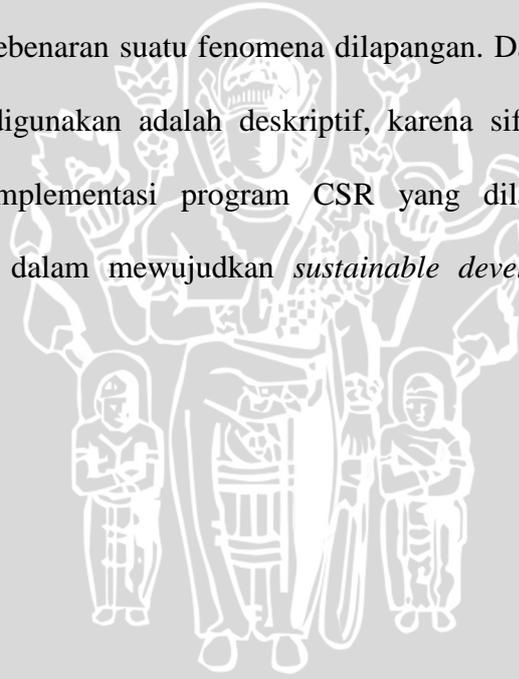
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/ verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis terhadap data-data ialah ketika peneliti berada dilapangan (bersamaan dengan pengumpulan data) sampai dengan pembuatan laporan penelitian, karena penelitian kualitatif adalah berbentuk siklus, yaitu setiap informasi baru harus diikuti perkembangannya sebagian data terbaru untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena dilapangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan adalah deskriptif, karena sifatnya memberikan penjelasan tentang implementasi program CSR yang dilakukan oleh JOB Pertamina-PetroChina dalam mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Perusahaan

Joint Operating Body Pertamina-Petrochina *East Java* merupakan salah satu bentuk hubungan kerja sama dibidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang terdapat di Indonesia khususnya pada daerah Jawa Timur yang terdapat di daerah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang berjarak 30 km disebelah barat daya kota Tuban atau 10 km di sebelah timur laut kota Bojonegoro. JOB Pertamina-Petrochina *East Java* (JOB P-PEJ) merupakan salah satu perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi (Migas). Berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 yang mengatur tentang kebijakan penanganan eksplorasi hasil sumber daya alam khususnya tentang perusahaan tambang minyak dan gas bumi yang mengeksplorasi tambang minyak bumi (*Mudi Field*). Maka pada tanggal 29 Februari 1988 Trend Internasional Ltd menandatangani kontrak bagi hasil dalam bentuk kontrak JOB Pertamina-Trend Tuban (JOB P-TT) dengan wilayah kontak Tuban Blok seluas 7.391 km² yang terdiri dari blok Tuban barat dan blok Tuban timur.

Tanggal 31 Agustus 1993 Surat Keputusan Dirut Pertamina, persetujuan peralihan konsensi dari Trend East Java ke Santa FE Energy Resources Java Ltd, JOB Pertamina-Trend Tuban berubah menjadi JOB Pertamina-Santa Fe Tuban. Berdasarkan SK Direktur Pertamina No. 620/ C00000/2001-S1 tanggal 2 Juli

2001, peralihan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) dari JOB Pertamina-Santa Fe Tuban menjadi JOB Pertamina-Devon Tuban.

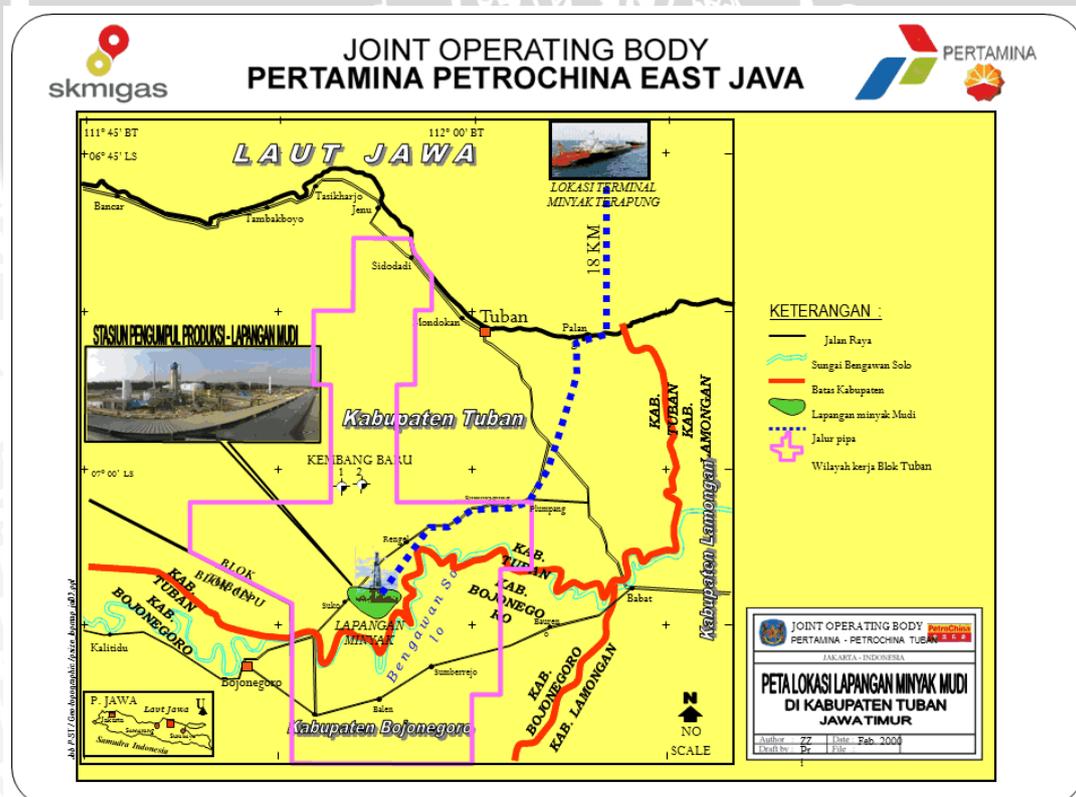
Peralihan kontraktor kontrak kerja sama berdasarkan surat Dirut Pertamina No. 553/ C00000/ 2002 –SI tanggal 27 Juni 2002 dan No. 562 / C00000/ 2002 tanggal 4 Juli 2001 TMT 1 Juli 2002. JOB Pertamina Devon Berubah menjadi JOB Pertamina-Petrochina *East Java*. Perusahaan ini mempunyai jenis kontrak yaitu *Production Sharing Contractor (PSC)*-JOB dengan masa kontrak selama 30 tahun. Seiring dengan peralihan konsensi, wilayah kerja JOB juga mengalami relinquishment (pelepasan/ pengembalian pada pemerintah). Pelepasan area pertama sebesar 25% dari wilayah semula pada tanggal 01 Maret 1993. Kemudian second area relinquishment sebesar 25% lagi pada 28 Agustus 1994. Dan last atau third area relinquishment sebesar 25% terjadi pada 28 Februari 1998. Saat ini JOB P-PEJ hanya mendapatkan 25% dari luas area semula yakni 1.478 km². Wilayah kerja JOB Pertamina – Petrochina *East Java* Blok Tuban yang awalnya meliputi 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto, saat ini hanya meliputi empat kabupaten yaitu Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik dengan beberapa lokasi lapangan yang disebutkan pada tabel di bawah ini. Untuk kepemilikan saham, 75% adalah milik Pertamina dan sisanya 25% milik perusahaan PetroChina. JOB Pertamina-Petrochina *East Java* memproduksi minyak mentah dengan jumlah produksi sekitar 40,323 barel per hari pada tahun 2012. Berikut adalah tabel yang menunjukkan wilayah lapangan yang digarap oleh JOB P-PEJ di Jawa Timur.

Tabel 1. Wilayah Lapangan yang di garap JOB P-PEJ

Tuban	Bojonegoro	Lamongan	Gresik
a. Mudi b. South West Mudi	a. Sukowati	a. Gondang 1 b. Gondang 2	a. Resik-1 b. Lengowangi 1 c. Bogomiring-1 d. South Bungoh-1 e. Lengowangi-2 f. South Bungoh 2 g. North West Lengowangi

Sumber: Data JOB Pertamina-PetroChina *East Java*

Untuk peta lokasi lapangan minyak mudi di Kabupaten Tuban bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Peta lokasi lapangan minyak mudi di Kabupaten Tuban

Sumber: Data JOB P-PEJ



2. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan perusahaan, secara umum JOB Pertamina-Petrochina *East Java* memiliki visi dan misi yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

a. Visi JOB Pertamina - Petrochina *East Java*

Visi perusahaan adalah “Diakui sebagai perusahaan energi terkemuka dengan integritas yang tinggi, ramah lingkungan dengan orientasi kepedulian sosial”

b. Misi JOB Pertamina-Petrochina *East Java*

Misi perusahaan adalah “Mencari dan mengembangkan sumber daya energi secara inovatif untuk meningkatkan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) dengan mengacu kepada standar etika dan aturan tentang kepedulian lingkungan, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada, selanjutnya berkembang bersama melalui proses kemitraan”

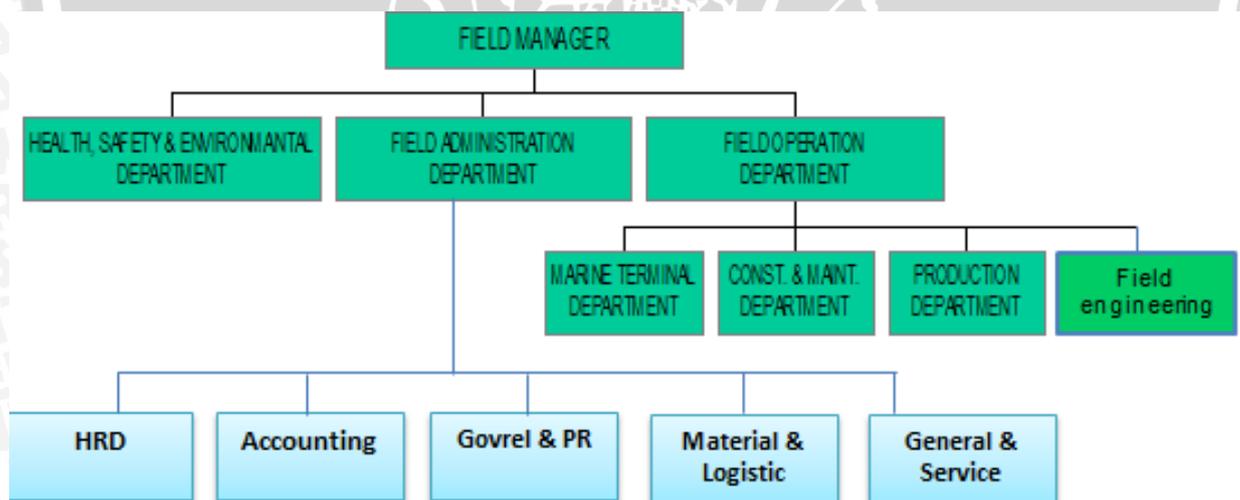
3. Kebijakan JOB Pertamina-Petrochina *East Java*

Joint Operating Body-Pertamina-Petrochina *East Java* telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasi yang berkesinambungan dan menguntungkan guna mengendalikan dampak lingkungan serta resiko keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerapan yang terfokus pada:

- a. Pemenuhan dan pentaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta persyaratan lain yang relevan dengan kebijakan perusahaan.
- b. Pencegahan terjadinya kebakaran, peledakan, kebocoran gas H₂S, tumpahan minyak, dan penyakit akibat kerja secara terus menerus melalui pengendalian aspek dan dampak lingkungan serta bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.
- c. Melaksanakan tujuan dan target yang berkelanjutan dengan penyediaan sumber daya yang memadai termasuk program pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, mengontrol pemakaian bahan-bahan yang berbahaya, perlengkapan alat pelindung diri serta mengusahakan tempat kerja yang aman, nyaman dan sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian semua karyawan dan pekerja kontraktor secara berkelanjutan dengan isu-isu lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja melalui pertemuan HSE (*Health, Safety, and Environment*) serta meningkatkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan.
- e. Mengkomunikasikan kebijakan HSE kepada pihak internal dan pihak eksternal yang berkepentingan.
- f. Melakukan seleksi, pembinaan dan penilaian kinerja mitra kerja yang bekerja sama atas nama JOB-PPEJ berdasarkan sistem penilaian HSE kontraktor yang berlaku.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam sebuah organisasi perusahaan khususnya, adanya struktur kepengurusan adalah sangat penting untuk diperhatikan. Di dalam struktur ini terdapat gambaran yang jelas mengenai berbagai macam tingkat hierarki atau tingkatan posisi yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi di sebuah perusahaan biasanya dibuat dalam struktur fungsional serta masing-masing posisi tersebut memiliki fungsi yang jelas serta kewenangan yang jelas. Di JOB P-PEJ sendiri dalam mengelola kegiatan perusahaan juga dibagi menjadi beberapa struktur organisasi dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan. Jabatan tertinggi di field JOB P-PEJ dikepalai oleh seorang FM (*Field Manager*). Gambar di bawah ini adalah bagan dari *organizational chart* di JOB P-PEJ.



Gambar 7. Struktur Organisasi JOB P-PEJ

Sumber : *Company Profile JOB Pertamina-PetroChina East Java*

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa dalam mengelola kegiatannya, JOB P-PEJ dikepalai oleh *Field Manager*, dengan

didukung oleh 3 bagian di bawahnya yaitu *Health, Safety and Environmental Department, Field Administration Department*, dan *Field Operation Department*.

Untuk bagian *Field Operation Department* juga membawahi 4 departemen yaitu: *marine terminal department, Construction and Maintanance Department, production department*, dan *Field Engineering*. Sedangkan untuk *Field Administration Department* membawahi 5 (lima) departemen yaitu: *HRD, Accounting, Govrel & PR, material & logistic*, serta *general & service*

5. Jumlah Pekerja

Adapun jumlah karyawan yang bekerja di JOB P-PEJ wilayah Tuban sampai dengan 30 April 2010 ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

DATA KARYAWAN JOB P-PEJ - TUBAN FIELD			
Sampai dengan 30 April 2010			
I	Karyawan JOB PPEJ	JML	%
	STAFF	52	29%
	NON STAFF	125	71%
	TOTAL	177	100%
	Karyawan JOB PPEJ	JML	%
	Tuban	35	20%
	Bojonegoro	20	11%
	Daerah lain Jatim	40	23%
	Prop. di luar Jatim	82	46%
	Expatriate	0	0%
	TOTAL	177	100%
II	Karyawan Kontrak Melalui Pihak Ketiga (PT NBM)	JML	%
	Tuban	196	57%
	Bojonegoro	85	25%
	Daerah lain Jatim	44	13%
	Prop. di luar Jatim	17	5%
	Expatriate	0	0%
	TOTAL	342	100%
III	GRAND TOTAL	JML	%
	Tuban	231	45%
	Bojonegoro	105	20%
	Daerah lain Jatim	84	16%
	Prop. di luar Jatim	99	19%
	Expatriate	0	0%
	TOTAL	519	100%

Gambar 8. Jumlah Karyawan JOB P-PEJ sampai dengan 10 April 2010

Sumber: *Company Profile JOB P-PEJ*

6. Penghargaan

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi, JOB P-PEJ juga sering mendapatkan penghargaan yang diantaranya adalah:

- Zero Accident Award dari Bupati Tuban
- Zero Accident Award dari Gubernur Jawa Timur
- Zero Accident Award dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
- *Patra Nirbhaya Karya Madya* untuk Produksi dari Menteri ESDM
- *Patra Nirbhaya Karya Madya* untuk Drilling dari Menteri ESDM
- PROPER – Blue Range
- *TRIR 0.2562*



Gambar 9. Penghargaan yang pernah di raih JOB P-PEJ

Sumber: Data sekunder (*Overview JOB P-PEJ*)

Penghargaan yang pernah diraih oleh JOB Pertamina-Petrochina sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki kompetensi dan kualitas dalam menjalankan kegiatan operasional yang salah satunya adalah mengenai keselamatan kerja. Hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan *Zero accident award* dari Bupati Tuban, Kementrans, dan Gubernur Jawa Timur.

7. Profil Desa Rahayu

Rahayu adalah nama salah satu desa di kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Desa ini terletak sekitar 3,7 km dari pusat pemerintahan kecamatan Soko. Asal usul desa Rahayu adalah berawal dari zaman kerajaan Majapahit. Saat itu terjadi pembabatan kayu secara besar-besaran oleh kerajaan Majapahit yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembuatan batu bata untuk pembangunan kerajaan. Ceritanya, salah satu petinggi dari kerajaan mengutus abdi dalem untuk mencari daerah yang banyak ditumbuhi kayu (pohonan) atau dalam bahasa jawanya adalah kekayuan. Pembabatan pohon (kayu) dalam jumlah besar tersebut kemudian mengubah hutan yang dulunya banyak ditumbuhi kekayuan tersebut menjadi lahan terbuka yang beralih fungsi untuk pemukiman warga hingga saat ini. Akhirnya, desa ini dinamakan kayunan. Seiring dengan perkembangan zaman, desa kayunan dan desa gandu melebur menjadi satu desa yaitu Rahayu hingga sekarang ini. Desa ini dikepalai oleh seorang kepala desa bernama Sukisno yang baru menjabat tahun 2013 lalu. Berikut adalah silsilah kepemimpinan di desa Rahayu:

Tabel 2. Silsilah Kepemimpinan Desa Rahayu

NO	Periode	Nama Kepala Desa
1.	<1963	Tamsiran
2.	1963-1991	Yasman Djojohardjo
3.	1991-1999	Winoto
4.	1999-2007	M. Solikin
5.	2007-2013	Imam Lughuzali
6.	2013-sekarang	Sukisno

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Adapun jumlah penduduk di desa Rahayu adalah sebanyak 3.581 jiwa yang tercatat dalam 1.039 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah ini dibagi berdasarkan jenis kelaminnya dengan hasil jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuannya. Sebesar 50,23% penduduk Desa Rahayu berjenis kelamin laki-laki (1.799) dan 49,77% lainnya berjenis kelamin perempuan (1.782 jiwa). Sebagian besar penduduk di desa Rahayu berada di usia produktif (sumber: Draft Laporan *Social Mapping* Unesa Tahun 2013).

8. Struktur Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Pekerjaan

Tingkat pendidikan masyarakat di desa Rahayu masih cukup rendah. Berdasarkan profil desa tahun 2012, sebagian besar penduduk (53,21%) hanya menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan bahkan masih ada penduduk yang tidak pernah mengecap pendidikan formal sama sekali yaitu sebanyak (3,67%). Sebanyak 6,01% pernah sekolah namun tidak sampai tamat SD. Meski demikian, masih ada penduduk yang melanjutkan pendidikan setelah

SMA yang jumlahnya hanya 1%. Prosentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya secara lengkap ditampilkan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rahayu

Tingkat pendidikan	Prosentase
Tidak Pernah Sekolah	3,67%
Tidak tamat SD	6,01%
SD/ sederajat	53,21%
SMP/ sederajat	27,17%
SMA/ sederajat	8,91%
D1/ sederajat	0,38%
D2/ sederajat	0,15%
S1/ sederajat	0,50%

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan 2012

Di samping tingkat pendidikan yang masih cukup rendah di desa Rahayu, sekitar 43,11% penduduk juga tergolong dalam kelompok miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sedangkan 37% penduduk masih berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000,00. Penghasilan itu masih di bawah UMR Kabupaten Tuban sebesar Rp 1.144.000,-. Adapun jenis pekerjaan penduduk di desa Rahayu mengalami perubahan dari setiap decade. Tabel 4.5 berikut memperlihatkan prosentase jenis mata pencaharian penduduk desa Rahayu.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Rahayu

Jenis pekerjaan	Prosentase
Petani	31,37%
Pegawai Swasta	24,42%
Pengrajin Industri Rumat Tangga	21,73%
Buruh Tani	13,85%

Pedagang Kecil	6,48%
Peternak	1,22%
PNS/TNI/POLRI	0,63%
Buruh Migran	0,29%

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian penduduk desa Rahayu adalah pekerjaan di bidang pertanian baik sebagai petani sendiri maupun buruh tani. Yaitu sebesar 31,37% penduduk desa Rahayu bermata pencaharian sebagai petani dan 13,85% penduduk bekerja sebagai buruh tani. Jenis pekerjaan di bidang pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan penduduk desa Rahayu ini dilatar belakangi karena faktor pendidikan yang rendah serta merupakan pekerjaan yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Meski demikian, jumlah penduduk yang menjadi pegawai swasta juga cukup besar yakni 24,42%. Ini dipengaruhi adanya perusahaan swasta seperti JOB P-PEJ dan juga PT.Gasoma yang berlokasi di desa Rahayu sehingga banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari penduduk desa Rahayu sendiri. Selain itu, 21,73% penduduk bermata pencaharian sebagai pengrajin industri rumah tangga, 6,48% bekerja sebagai pedagang kecil, 1,22% penduduk bekerja sebagai peternak, 0,63% penduduk bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI, dan 0,29% penduduk bermata pencaharian sebagai buruh migran.

9. Potensi Desa Rahayu

Sebelum tahun 1990, Desa Rahayu ini merupakan desa yang sangat tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Terlebih lagi hasil pertanian

yang didapatkan juga sangat kecil karena tidak didukung oleh keramahan alam. Kemudian, kondisi ini berubah di awal tahun 1991 ketika masyarakat sudah mengenal teknologi traktor dan diesel untuk dapat meningkatkan hasil panen. Selain itu, perubahan kondisi di Desa Rahayu juga berubah semenjak didirikannya JOB P-PEJ, di mana banyak penduduk yang menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut serta banyaknya tenaga kerja kasar musiman saat dilakukannya pengeboran. Terlebih lagi masuk pada tahun 2010-an ketika pabrik PT. Gasoma yang bekerja sama dalam pengolahan gas sisa kegiatan JOB P-PEJ, perubahan pada tingkat kesejahteraan penduduk di desa Rahayu ini semakin meningkat lagi. Karena banyak pula tenaga kerja yang direkrut perusahaan tersebut yang berasal dari penduduk setempat.

Potensi ekonomi penduduk desa Rahayu yang paling utama berasal dari potensi sumber daya alam, baik pertanian maupun peternakan, serta potensi ekonomi yang berasal dari keberadaan industri maupun pabrik di wilayah tersebut. Sedangkan untuk pertanian sendiri, produktivitas tertinggi adalah dari komoditi padi, karena wilayah ini memiliki lahan sawah yang sangat luas sehingga mampu menghasilkan luas panen terbesar dibandingkan jenis pertanian lainnya. Selain itu, tanaman palawija juga menjadi komoditi kedua di bawah produktivitas padi. Potensi perekonomian di Desa Rahayu tidak hanya meliputi aspek pertanian saja, tabel 5 berikut ini menunjukkan jenis-jenis potensi di desa tersebut.

Tabel 5. Jenis Potensi Sumber Perekonomian Desa Rahayu

Potensi Sumber Daya Alam	Jenis
Pertanian	Padi (dominan) Palawija (Kacang hijau, kedelai, jagung) Pedagang palawija
Perdagangan	Pedagang Prancangan/ Sembako Pedagang pupuk
Tambang	Tambang minyak JOB P-PEJ
Industri	Kerajinan anyaman untuk tembakau Kerajinan kayu limbah Kerajinan pembuatan tahu <i>*catatan: dulu desa Rahayu pernah membuat sepatu tetapi kendalanya di pemasaran sekarang tidak jalan. Bantuan alat dari JOB P-PEJ untuk membuat sepatu pada tahun 2008</i>
Perikanan	Pembibitan lele skala kecil (P. Sumantri)
Peternakan	Sapi, Kambing, ungags dimiliki secara pribadi dan skala kecil

Sumber: Draft Laporan Akhir *Social Mapping* LPPM Unesa Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa potensi yang ada di Desa Rahayu tidak hanya berasal dari sektor pertanian, melainkan juga berasal dari sektor perikanan, peternakan, tambang, industry, dan perdagangan. Namun, terlihat jelas bahwa sektor yang paling mendominasi adalah berasal dari pertanian karena wilayah ini memiliki lahan yang cukup luas untuk digunakan sebagai ladang pertanian.

B. Penyajian Data Fokus

1. Implementasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu

Sebagai salah satu perusahaan milik negara, sudah selayaknya dapat mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang mengolah minyak dan gas bumi, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menjaga hal-

hal yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Mengacu pada Undang-Undang yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yakni UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, ISO 26000 serta peraturan lain tentang CSR, di JOB P-PEJ sendiri telah menerapkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)-nya melalui implementasi program-program CSR yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. CSR yang diterapkan oleh JOB P-PEJ sudah berlangsung sejak pertama kali perusahaan ini berdiri, yaitu pada tahun 1988. CSR yang ada pada JOB P-PEJ sendiri ada berbagai macam istilah yang digunakan dalam implementasinya. Seperti pada tahun 2012, JOB P-PEJ menggunakan istilah PSPO (Program Sosial Penunjang Operasional), kemudian berubah menjadi PPO (Program Penunjang Operasional) di tahun 2013, dan PKPO (Program Kegiatan Penunjang Operasional) dan CR (*corporate responsibility*) adalah istilah dari implementasi tanggung jawab perusahaan yang digunakan di tahun 2014 ini. Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan program CSR atau PKPO sendiri adalah:

1. Didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
2. Aspiratif, melalui penelusuran kebutuhan masyarakat.
3. Partisipatif, yaitu melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses kegiatan.
4. Subjektif, yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
5. Kontributif, menumbuhkan kesadaran untuk membantu dirinya sendiri.

6. Demokratif, yakni mendiskusikan segala sesuatunya melalui musyawarah desa.
7. Koordinatif, dengan mengusahakan pelaksanaan program dalam bentuk kemitraan.
8. Tertib dan transparan, mengutamakan disiplin dan keterbukaan dalam setiap proses dan pelaporan dengan pendekatan P4E (Perencanaan- Pengorganisasian- Pelaksanaan- Pengendalian dan Evaluasi)

Adanya program CSR yang diimplementasikan oleh JOB P-PEJ bukan hanya sekedar untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat saja, melainkan sudah menjadi kewajiban dan etika perusahaan. CSR dilaksanakan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sekitar yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sesuai dengan konsep 3P (*people, profit, planet*) dalam CSR. Demikian halnya dengan CSR yang telah dijalankan oleh pihak JOB P-PEJ ini tidak terlepas dari ketiga aspek penting tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Yoga S. Utomo yang mengatakan bahwa,

“kami di sini bekerja tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, namun juga memperhatikan semua *stakeholder* di sini terutama masyarakat sekitar. Sudah menjadi etika, tanggung jawab dan kewajiban perusahaan ini untuk melaksanakan program yang mendukung kegiatan operasional serta program untuk masyarakat melalui kegiatan CSR ini. CSRnya sendiri meliputi bidang infrastruktur, sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, kompensasi dan rekonsiliasi, serta kehumasan”. (wawancara tanggal 22 Januari 2014)

Terbukti dengan adanya program yang ditetapkan sebagai CSR di JOB P-PEJ meliputi 6 bidang yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, kompensasi dan rekonsiliasi, *government and public relation* (kehumasan), infrastruktur, serta

sosial-ekonomi. Selain CSR, pihak JOB juga memberikan kompensasi tersendiri untuk masyarakat yang terkena dampak *flare* (api panas) yang berada di wilayah Ring satu, terutama di Desa Rahayu. Kompensasi ini diberikan per-KK (Kepala Keluarga) sebagai ganti rugi serta dana untuk pemeliharaan atas rusaknya tanaman akibat dampak flare yang ditimbulkan dari CPA (*Central Processing Area*). Program CSR yang telah dilaksanakan oleh JOB P-PEJ adalah sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada poin *responsibility* dan *fairness* khususnya. Secara tidak langsung, perusahaan melalui tanggung jawab (CSR) yang diimplemenasikannya tersebut telah memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul akibat kegiatan operasionalnya.

Program CSR yang telah ditetapkan oleh JOB P-PEJ tidak akan dapat diketahui manfaatnya apabila tidak diimplementasikan secara nyata melalui suatu aksi yang *real*. Seperti halnya teori implmentasi yang menjelaskan bahwa suatu proses kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berakhir setelah kebijakan tersebut ditetapkan, melainkan ada tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan. Implementasi atau pelaksanaan ini merupakan suatu proses untuk mewujudkan kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata serta untuk mengetahui hasilnya (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*) yang nantinya dapat dinikmati oleh kelompok yang menjadi sasaran. Dalam pelaksanaan program CSR di JOB P-PEJ, juga terdapat beberapa tahapan serta unsur dalam implementasi itu sendiri seperti pada teori implementasi yang

dijelaskan pada bab tinjauan pustaka. Yang diantaranya meliputi tahap perencanaan, kemudian implementor (pelaksana) yang terlibat, hasil pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan yang telah dijalankan. Tabel 6 di bawah ini menunjukkan alur proses implementasi program CSR JOB P-PEJ.

Tabel 6. Skema Tahapan Implementasi Program CSR JOB P-PEJ

	JOB P-PEJ	Villagers	Local Government
Planning	- Social Mapping - CSR/ CD blueprint - budget plan - KPI	- Key Stakeholders - Proposal	- RAPBDes/ RAPBD
Req. Identification/ Prioritisation	FGD (forum Group Discussion)		synchronize
Program & action plan	- WP&B Realization process	Joint program planning and review	
Implementation	- Financing Supervision	Joint action & partnership	
Monitoring	Joint monitoring based on KPI, objective, deliverable		
Evaluation	Joint reporting, evaluation aligning reccomendation		
Aligment- redesign program	Joint re-design program		
	Maintenance & development demo-plot		

Sumber: JOB P-PEJ

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR di JOB P-PEJ mulai dari tahap perencanaan hingga perancangan kembali program yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan evaluasi. Jika dilihat,

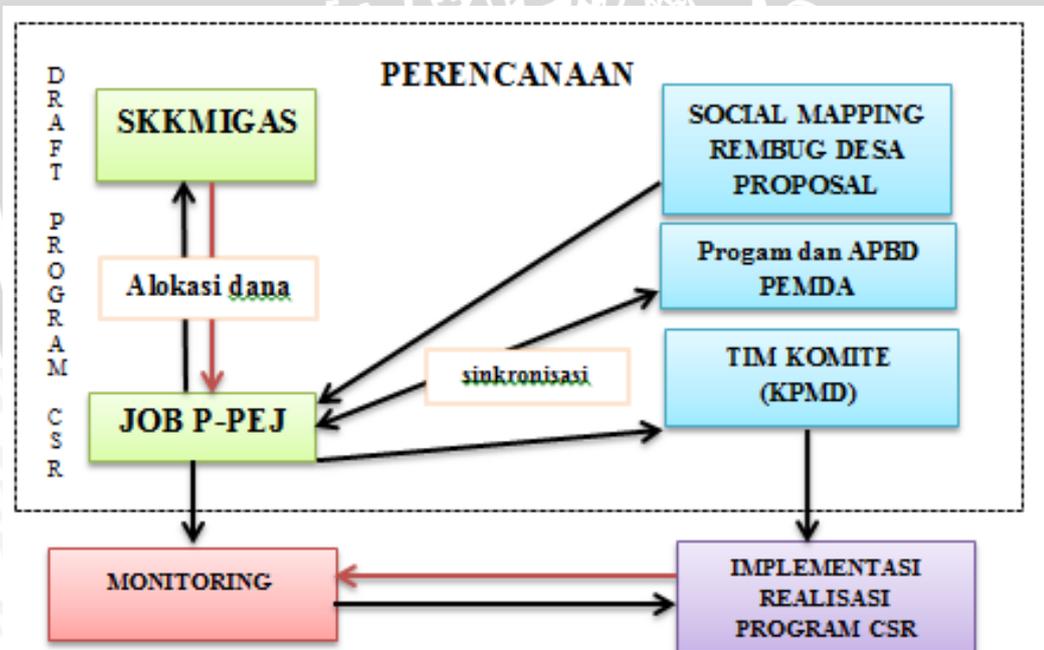
pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan ini melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu JOB P-PEJ sendiri, masyarakat desa, serta pemerintahan desa. Pada tahap perencanaan, perusahaan melaksanakan *social mapping* terlebih dahulu kemudian menyusun CSR *blueprint* yang meliputi rencana program beserta anggaran. Setelah itu dimusyawahkan dengan desa melalui rembug desa untuk disusun skala prioritas kebutuhan masyarakat. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara pihak masyarakat dan perusahaan, kemudian program tersebut di susun ke dalam *Work Plan and Budget* (WP&B) yang diusulkan ke SKKMIGAS. Setelah disetujui oleh perusahaan induk tersebut, program yang sudah ditetapkan tersebut bisa direalisasikan. Untuk tahap monitoring dan evaluasi sendiri, pihak JOB menerapkan *system joint monitoring based on KPI* (*Key Performance Indicator*), *objective*, dan *deliverable*. Maksud dari system ini adalah pengawasan yang didasarkan pada indikator kinerja utama yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan terhadap sasaran program kegiatan. Sedangkan tahap evaluasi dengan menggunakan *system joint reporting, evaluation aligning recommendation* yaitu suatu bentuk kerjasama dalam proses evaluasi serta pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya LPJ, kemudian dari laporan tersebut, pihak perusahaan akan mengevaluasi dan menyusun ulang rencana kegiatan yang direkomendasikan jika dinilai masih belum optimal.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai implementasi program CSR JOB P-PEJ, peneliti akan menyajikan tahapan mulai dari perencanaan hingga *outcome* atau dampak yang di rasakan oleh masyarakat, khususnya Desa Rahayu.

a. Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ

Program-program CSR yang telah ditetapkan oleh JOB P-PEJ ini pada dasarnya melalui beberapa tahapan. Dari perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, hingga dampaknya yang akan diterima oleh masyarakat sebagai sasaran (*outcomes*). Setiap tahapan memiliki mekanisme sendiri, mulai dari perencanaan yang melibatkan beberapa aktor, kemudian alokasi dan penyaluran dana CSR hingga program yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tahap perencanaan, dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut yang memperlihatkan mekanisme proses perencanaan program CSR di JOB P-PEJ.



Gambar 10. Mekanisme Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ

Sumber: data primer (olahan dari wawancara)

Berdasarkan gambar skema tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menetapkan program CSR yang akan dilaksanakan oleh JOB P-PEJ, pihaknya sendiri melakukan koordinasi sebelumnya dengan masyarakat setempat melalui

musyawarah desa atau rembung desa. Pertama, pihak JOB P-PEJ melakukan *CSR assesment* melalui *social mapping* atau pemetaan pada wilayah sasaran yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penetapan program yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Dari hasil *mapping*, pihak JOB P-PEJ mempunyai gambaran mengenai rencana program serta anggaran CSR yang akan digunakan untuk pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Sukisno selaku kepala Desa Rahayu,

“Sebelumnya pihak JOB P-PEJ melakukan *mapping* di desa kami, kemudian mereka akan membuat suatu program serta besaran anggaran yang kemudian ditawarkan pada kami untuk dimusyawarahkan dengan Komite dan masyarakat”. (wawancara pada tanggal 29 Januari 2014)

Mapping tersebut dilakukan oleh tim ahli dari JOB P-PEJ. Namun, baru-baru ini (tahun 2013), pihak JOB P-PEJ bekerjasama dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Jawa Timur yaitu Universitas Airlangga, UNESA, ITS, dan Universitas Brawijaya untuk melakukan *mapping* serta kajian *masterplan* yang nantinya akan menjadi bahan masukan untuk program dan kegiatan CSR yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoga S. Utomo,

“Untuk rencana program di 2014 ini, kami bekerja sama dengan 4 (empat) PTN di Jawa Timur yaitu UNAIR, UNESA, ITS, dan Unibraw dalam hal *social and environmental mapping* dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) universitas tersebut. *Mapping* ini dilakukan agar CSR yang kami tetapkan dan implementasikan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Kita membutuhkan tim-tim ahli diluar kepentingan (perusahaan maupun masyarakat) yang mampu melakukan penelitian dan terjun langsung untuk mengkaji fenomena dan potensi yang ada di lapangan. *Mapping* ini nantinya menjadi bahan masukan pihak JOB P-PEJ dalam menetapkan program-program CSRnya”. (wawancara tanggal 22 Januari 2014)

Adanya *mapping* yang dilakukan sebelumnya oleh JOB P-PEJ yang bekerjasama dengan tim ahli adalah supaya program yang ditetapkan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Setelah di laksanakan kegiatan *mapping*, selanjutnya pihak JOB P-PEJ membuat program-program beserta anggaran yang kemudian ditawarkan pada masyarakat desa melalui perantara pemerintahan desa.

Desa sendiri juga sudah membentuk lembaga yang dinamakan Komite Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan berubah nama menjadi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk Desa Rahayu. Fungsi dari lembaga ini adalah sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dan badan pelaksana program CSR dari JOB P-PEJ. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tarmuji selaku Ketua LPMD,

“Di desa telah dibentuk komite pemberdayaan masyarakat di bawah naungan Kepala Desa. Dan 5 (lima) bulan terakhir ini berubah nama menjadi LPMD. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana program dari JOB P-PEJ, selain itu juga sebagai badan pemelihara sekaligus”. (wawancara dengan Bpk. Tarmuji tanggal 4 Februari 2014).

LPMD beserta masyarakat dan pemerintahan desa ini kemudian melakukan musyawarah atau rembung desa untuk menindaklanjuti program yang telah ditawarkan oleh pihak JOB P-PEJ. Rembug desa ini dilakukan untuk menyinkronkan program CSR JOB P-PEJ dengan program yang diusulkan oleh masyarakat desa. Adanya sinkronisasi ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah untuk desa yang dimaksud. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoga S. Utomo bahwa,

“Program CSR kami berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh warga yang sebelumnya dilakukan melalui rembug desa untuk menyusun skala prioritas kebutuhan warga. Selain itu, kami juga menyinkronkan dengan program di desa tersebut yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Misalnya saja dalam bidang infrastruktur pembangunan jalan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dana APBD. Takutnya nanti jika program itu dikerjakan oleh pemerintah dan juga pihak JOB P-PEJ, maka dana yang diterima desa akan menjadi *double*, yaitu dari JOB P-PEJ dan pemerintah daerah. Ini akan menjadi sasaran *empuk* KPK. Sinkronisasi dan koordinasi dengan masyarakat mengenai program CSR JOB P-PEJ dengan program-program yang diusulkan oleh warga ini perlu dilakukan supaya sesuai dengan kebutuhan warga, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih dengan program dari pemda”. (wawancara tanggal 22 Januari 2014)

Program-program CSR yang ditetapkan oleh JOB P-PEJ tersebut juga disesuaikan oleh kebutuhan masyarakatnya dan tidak semata-mata mengacu pada kepentingan perusahaan. Melalui forum diskusi atau rembug desa yang dilakukan oleh KPMD akan dibahas mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kemudian oleh komite yang sudah dibentuk tersebut, akan disusun skala prioritas ke dalam bentuk proposal yang akan diajukan ke pihak JOB P-PEJ. Selanjutnya, proposal dari warga yang dikirim ke JOB P-PEJ tersebut akan diseleksi dan dipilih untuk diajukan lagi ke dalam sebuah WP&B (*Work Plan and Budget*) yang nantinya diusulkan SKKMIGAS. WP&B sendiri merupakan dokumen negara yang sangat penting dan bersifat rahasia, oleh karena itu, peneliti di sini hanya diperbolehkan mengetahui proses perencanaan melalui wawancara. Akan tetapi tidak semua program yang diajukan oleh warga tersebut bisa diterima oleh pihak JOB P-PEJ. Pada intinya, pihak JOB P-PEJ akan menyeleksi program apa saja yang sekiranya sesuai anggaran serta mampu dikerjakan oleh mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Yoga S. Utomo section Security Supv.,

“Sebelum kita menetapkan program-program CSR, pertama adalah proses pencarian sasaran. Tim kami akan turun ke desa langsung untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan menanyakan program-program apa saja yang kira-kira akan dilaksanakan di sana. Kemudian dari proposal program tersebut akan diseleksi dan dipilih untuk dibuatkan WP&Bnya. Namun tidak semua proposal tersebut bisa kami terima. Kami juga menyeleksi mana program yang bisa kami tangani dan mana program yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah”. (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Dalam hal ini, pihak JOB P-PEJ bukan sebagai pihak penyetuju apakah program yang telah diusulkan dapat diimplementasikan seluruhnya, melainkan hanya sebagai operator saja, persetujuan proposal tetap di tangani dan diproses oleh SKKMIGAS. Dimana lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak proposal untuk program CSR yang diajukan oleh JOB P-PEJ. Oleh karena itu, tidak semua program yang diajukan oleh JOB P-PEJ ke SKKMIGAS itu mendapatkan persetujuan karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan manfaat dari program tersebut. Apabila pihak SKKMIGAS menyetujui WP&B yang diajukan, maka anggaran untuk kegiatan CSR bisa cair dan pelaksanaan program-program tersebut dapat terealisasi. Seperti yang dikatakan Yoga S. Utomo,

“...dari proposal itu nanti bisa kita lihat anggarannya berapa yang kemudian bisa dimasukkan ke WP&B untuk diajukan ke SKKMIGAS. Namun di WP&B yang diusulkan tadi tidak semuanya mendapat persetujuan dari SKKMIGAS, tergantung budget yang disediakan berapa dan juga melihat manfaat dari program tersebut. Dan apabila WP&B yang diusulkan tadi disetujui, maka pelaksanaan program-program tersebut bisa segera terealisasi”. (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Implementasi program CSR oleh JOB P-PEJ melibatkan semua pihak, terutama masyarakat yang dikoordinir oleh tim komite (KPMD). Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan program CSR di JOB P-PEJ di mana pelaksanaan

yang bersifat partisipatif dan subjektif yaitu melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses kegiatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak tim LMPD Rahayu melalui wawancara ketua LPMD, Bapak Tarmuji yang mengatakan bahwa,

“kami melaksanakan kegiatan program CSR yang telah disetujui oleh JOB P-PEJ tidak sendiri (hanya tim LPMD), melainkan juga kerjasama dengan semua masyarakat. Saya mengapresiasi masyarakat setempat karena jiwa peduli dan gotong-royongnya yang tinggi. Sehingga kami tidak kuwalahan karena mereka selalu membantu setiap proses kegiatan” (wawancara tanggal 4 Februari 2014)

Berdasarkan proses yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan program CSR yang akan diimplementasikan, pihak JOB P-PEJ melakukan berbagai tahapan awal perencanaan program. Proses tersebut juga melibatkan berbagai pihak yaitu perusahaan sendiri, masyarakat setempat, pihak akademisi, dan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tujuan pelaksanaan CSR dapat terealisasi dan diterima oleh *target group*, serta kebermanfaatannya bagi semua *stakeholders*.

b. Implementor Program CSR JOB P-PEJ

Salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana atau implementor. Di JOB P-PEJ sendiri, unsur implementor dalam pelaksanaan program CSR-nya meliputi pihak JOB P-PEJ khususnya section PR dan Govrel, tim ahli dari berbagai universitas yang bekerjasama dalam hal *mapping* dan pembuatan *masterplan* CSR, masyarakat sendiri, SKKMIGAS sebagai pihak penyetuju, serta pemerintah daerah. Semua aktor tersebut harus dapat berkoordinasi dengan baik agar program CSR yang telah ditetapkan bisa berhasil

dan tepat sasaran serta tidak tumpang tindih dengan program dari pemerintah daerah.

a. JOB P-PEJ

Dalam hal ini, JOB P-PEJ khususnya section PR dan Govrel adalah menjadi implementor utama dalam pelaksanaan CSR. Mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan program, penentuan strategi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan CSR.

b. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan CSR juga menjadi prioritas utama pihak JOB P-PEJ. Karena yang menjadi sasaran utama pelaksanaan CSR adalah warga sekitar sehingga diperlukan masyarakat yang aktif baik dalam hal memberikan aspirasi maupun dalam implementasi CSR itu sendiri. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu komite yang dinamakan KPMD (Komite Pembersayaan Masyarakat Desa) yang akan menampung aspirasi dari masyarakat serta dapat berkoordinasi dengan pihak JOB P-PEJ dalam pelaksanaan CSR. Pembentukan komite ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh hasil evaluasi tim pelaksana yang dulu melaksanakan kegiatan CSR dari JOB P-PEJ, namun masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, komite ini dibentuk sebagai pihak pemegang pelaksana program CSR itu sendiri. Adapun tugas dari komite ini adalah: *pertama*, menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah program yang

nantinya diajukan baik ke Perusahaan (dalam hal ini adalah JOB P-PEJ) ataupun Pemerintah Daerah; *kedua*, mengimplementasikan program kegiatan; dan *ketiga*, memfasilitasi pelaksanaan program. Sedangkan fungsi dari komite ini sendiri adalah sebagai fasilitator masyarakat dan fasilitator perusahaan.

c. SKKMIGAS

Dalam hal ini, SKKMIGAS adalah sebagai aktor dalam pengambilan keputusan. Melalui persetujuan dari SKKMIGAS inilah yang nantinya pelaksanaan CSR tersebut bisa dilaksanakan. Jika WP&B yang diusulkan oleh JOB P-PEJ yang didalamnya terdapat program CSR tersebut disetujui, maka program tersebut bisa direalisasikan.

d. Akademisi

Implementasi program CSR JOB P-PEJ juga tidak lepas dari peran universitas khususnya LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Di sini, peran dari LPPM tersebut adalah bekerjasama dengan pihak JOB P-PEJ dalam hal *economic, social, maupun environmental mapping* serta penyusunan *masterplan* untuk program CSR JOB P-PEJ. Koordinasi dengan tim universitas ini baru dilakukan pada tahun 2013 lalu. *Mapping* ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, potensi, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program CSR nantinya. Melalui *mapping* ini diharapkan

akan ada rekomendasi-rekomendasi yang diajukan agar pelaksanaan CSR bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran dari pihak akademisi ini adalah untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan dari orang-orang tertentu, karena pada dasarnya, universitas adalah pihak yang independen dan bebas dari kepentingan, baik kepentingan JOB P-PEJ sendiri maupun masyarakat yang menjadi *target group* program CSR.

e. Pemerintah Daerah

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama di JOB P-PEJ, terlihat bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tuban dalam implementasi program CSR memiliki andil yang cukup sedikit, dikarenakan hampir keseluruhan kegiatan CSR dilakukan oleh pihak JOB P-PEJ dengan masyarakat. Namun, peran pemerintah masih terlihat dalam pemeliharaan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tarmuji selaku Ketua KPMD desa Rahayu,

“kami di sini diberikan kompensasi oleh pihak JOB P-PEJ sebagai bentuk CSRnya, dan kompensasi tersebut juga kami gunakan untuk biaya pemeliharaan tanaman di desa ini. Kami juga dibantu oleh dinas pertanian, misalnya saja ketika kami mengalami masalah dengan tanaman, kami meminta bantuan pada dinas pertanian untuk memberikan solusi serta gambaran bagaimana agar tanaman kami bisa berkembang”. (wawancara tanggal 4 Februari 2014)

Selain itu, pihak JOB P-PEJ juga bekerja sama sebelum menentukan kegiatan CSR yang akan dilaksanakan dengan pemerintah untuk menyinkronkan kegiatan apa saja yang nantinya menjadi tanggung jawab

pemerintah dan juga tanggung jawab JOB P-PEJ, sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih antara pemda dan perusahaan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Yoga S.Utomo selaku Supervisor PR and Security yang mengatakan bahwa,

“Sebelum menentukan kegiatan apa saja yang masuk dalam CSR perusahaan, kami juga melakukan sinkronisasi dengan pemerintah untuk mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh mereka, sehingga tidak ada kegiatan yang nantinya tumpang tindih. Maksud tumpang tindih di sini adalah tidak ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ dan Pemerintah daerah”. (wawancara tanggal 24 Januari 2014)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam implementasi program CSR di JOB P-PEJ sangat minim. Namun, peran pemerintah di sini tetap sebagai regulator dan mengawasi pelaksanaan kegiatan CSR JOB P-PEJ.

c. Sasaran Implementasi Program CSR

Dalam pelaksanaan atau implementasi program CSR, pihak JOB P-PEJ tentunya sudah menetapkan siapa yang menjadi objek dan sasaran dari implementasi tersebut. Program CSR dijalankan di beberapa regional wilayah yang merupakan daerah-daerah terkena dampak dan pengaruh dari kegiatan JOB P-PEJ. Untuk wilayah di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sendiri, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 42 (empat puluh dua) desa yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu wilayah yang menjadi pusat pengeboran dan sumur yang berstatus terdampak dan terdampak langsung (MUDI DA dan A), wilayah yang berpotensi sedang dikembangkan untuk area sumur dan pengeboran (SKWT DA

dan A), serta wilayah yang dilalui pipa kegiatan pertambangan. Tabel 6 berikut menunjukkan cakupan wilayah pelaksanaan program CSR JOB P-PEJ di Kabupaten Tuban & Bojonegoro.

Tabel 7. Cakupan Wilayah Program CSR JOB P-PEJ

SKWT	Nama Desa	Keterangan
Kecamatan Bojonegoro	Desa Mulyoagung	Desa Terdampak (A)
	Desa Campurejo	Desa Terdampak Langsung (DA)
	Kelurahan Ngrowo	Desa Terdampak (A)
	Desa Semanding	Desa Terdampak (A)
Kecamatan Kapas	Desa Ngampel	Desa Terdampak Langsung (DA)
	Desa Sambiroto	Desa Terdampak Langsung (DA)
MUDI	Nama Desa	Keterangan
Kecamatan Soko	Desa Rahayu	Desa Terdampak Langsung (DA)
	Desa Sokosari	Desa Terdampak (A)
	Desa Sumurcinde	Desa Terdampak (A)
	Desa Sandingrowo	Desa Terdampak (A)
Kecamatan Rengel	Desa Bulurejo	Desa Terdampak Langsung (DA)
	Desa Kebonagung	Desa Terdampak (A)
	Desa Karangtinoto	Desa Terdampak (A)
PIPA	Nama Desa	Keterangan
Kecamatan Grabagan	Desa Pakis	Desa dilalui pipa
Kecamatan Semanding	Desa Gesing	Desa dilalui pipa
Kecamatan Rengel	Desa Banjaragung	Desa dilalui pipa
	Desa Punggulrejo	Desa dilalui pipa
	Desa Sumberejo	Desa dilalui pipa
	Desa Rengel	Desa dilalui pipa
	Desa Sawahan	Desa dilalui pipa
	Desa Maibit	Desa dilalui pipa
Kecamatan Plumpang	Desa Sumberaung	Desa dilalui pipa
	Desa Ngrayung	Desa dilalui pipa
	Desa Plumpang	Desa dilalui pipa
	Desa Sumurjalak	Desa dilalui pipa
	Desa Kepohagung	Desa dilalui pipa
	Desa Kesamben	Desa dilalui pipa
	Desa Trutup	Desa dilalui pipa
Kecamatan Palang	Desa Karangagung	Desa dilalui pipa

	Desa Leran Kulon	Desa dilalui pipa
	Desa Glodog	Desa dilalui pipa
	Desa Palang	Desa dilalui pipa
	Desa Gresikharjo	Desa dilalui pipa
	Desa Cendoro	Desa dilalui pipa
	Desa Pucangan	Desa dilalui pipa
	Desa Ngimbang	Desa dilalui pipa
	Desa Kradenan	Desa dilalui pipa
	Desa Tasikmadu	Desa dilalui pipa
	Desa Panyuran	Desa dilalui pipa
	Desa Pliwetan	Desa dilalui pipa
Kecamatan Soko	Desa Mojoagung	Desa dilalui pipa
	Desa Kendalrejo	Desa dilalui pipa

Sumber: JOB P-PEJ

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa JOB P-PEJ dalam melakukan kegiatan CSR-nya tidak hanya berpusat di daerah yang secara langsung terdampa, namun juga di semua wilayah operasional atau wilayah yang dilalui oleh kegiatan JOB P-PEJ. Dari data di atas juga diketahui bahwa untuk wilayah desa yang terdampak secara langsung (DA) ada 3 (tiga) desa, yaitu Desa Rahayu, Desa Sambiroto, Desa Ngampel, Desa Campurejo, dan Desa Bulurejo. Sedangkan untuk wilayah yang terdampak (A) meliputi 8 (delapan) desa yaitu, Desa Mulyoagung, Kelurahan Ngrowo, Desa Semanding, Desa Sokosari, Desa Sumurcinde, Desa Sandingrowo, Desa Kebonagung, dan Desa Karangtinoto. Untuk daerah yang dilalui pipa kegiatan JOB P-PEJ ada 29 (dua puluh Sembilan) desa yang dibagi dari 6 (enam) kecamatan yaitu kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Semanding, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Palang, dan Kecamatan Soko.

Di kecamatan Soko sendiri yang notabene adalah sebagai pusat operasional JOB P-PEJ dan lokasi pabrik pengeboran, maka di wilayah ini secara langsung menerima dampak dari kegiatan tersebut. Wilayah di kecamatan Soko ini terbagi

menjadi 3 (tiga) ring, yaitu ring 1, ring 2, dan ring 3. Dalam hal ini, ring 1 meliputi Desa Rahayu (DA), Desa Bulurejo (DA), dan Desa Kebonagung (A) adalah menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan CSR di JOB P-PEJ. Mengingat tiga desa tersebut berada di wilayah yang paling dekat dengan JOB P-PEJ, maka diusahakan agar kehidupan masyarakat yang berada di desa tersebut sejahtera. Di tiga desa tersebut, perusahaan lebih memaksimalkan implementasi program CSRnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoga S. Utomo yang mengatakan bahwa,

”kita di sini lebih memprioritaskan wilayah ring 1, yaitu lokasi di mana pabrik ini berdiri, dikarenakan kami tidak mau melihat masyarakat yang berada dekat dengan wilayah JOB P-PEJ ini menderita. Jadi dengan adanya CSR yang diterima oleh masyarakat wilayah ring 1, diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keadaan lingkungan mampu menjadi lebih baik”. (Wawancara, Senin 27 Januari 2014).

Program CSR yang diimplementasikan oleh JOB P-PEJ tidak hanya berpusat di wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro saja (MUDI, SKWT, dan PIPA), melainkan juga di seluruh wilayah yang menjadi lokasi kegiatan operasional JOB P-PEJ seperti di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Gresik, Lamongan.

e. Hasil Pelaksanaan Program CSR di desa Rahayu

Sebagai wilayah yang menjadi sasaran utama dan lokasi pengeboran dari pabrik, JOB P-PEJ telah melaksanakan program CSR salah satunya di Desa Rahayu (DA). Tabel 7 berikut menunjukkan realisasi kegiatan CSR di JOB P-PEJ di desa Rahayu (DA) dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

BIDANG	2008	2009	2010	2011	2012
Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelatihan konveksi - Bantuan pelatihan memasak - Bantuan budidaya lele dan sapi kepada KUB Sarirejo 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan penguatan modal KUB 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan KUB 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan modal usaha pertanian, dan pedagang kecil menengah - Bantuan peralatan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan bagi UKM
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan bebas biaya sekolah untuk anak yang tidak mampu (SMP,SMA) 		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian beasiswa pada murid SD, SMP, SMA - Renovasi gedung TK PKK Harapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sekolah - Bantuan sarana dan prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sarana dan prasarana sekolah - Bantuan kegiatan karang taruna
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - pengobatan massal 	<ul style="list-style-type: none"> - pengobatan massal 	<ul style="list-style-type: none"> - pemberian makanan tambahan - bantuan peralatan puskesmas - bantuan operasi katarak - pengobatan massal 	<ul style="list-style-type: none"> - pemberian obat-obatan Ponkesdes 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian obat-obatan - Perbaikan sarana olahraga - Pembuatan sumur air bersih
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jalan di dusun Sarirejo, Desa Rahayu - Renovasi masjid dsn.Kayunan, Rahayu - Pembuatan saluran air Bersih Dsn.Sarirejo 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan dusun Sarirejo, Rahayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jalan di Dsn.Kayunan - Plengsengan - Penerangan jalan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kantor balai desa - Pembangunan tembok penahan jalan - perbaikan tanggul - Perbaikan jalan dan normalisasi sungai - Relokasi Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Renovasi kantor desa, pembangunan masjid dan sekolah - Pavingisasi jalan - Perbaikan saluran air
Kompensasi dan	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak flare CPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak flare 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak flare CPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak flare CPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak

<p>Rekonsiliasi</p>		<p>CPA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana, prasarana kesehatan - Bantuan sarana olahraga - Penghijauan/ penanaman pohon 	<p>flare CPA</p>
<p>Government/ Public Relation</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorship kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorship kegiatan - Bantuan material pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorship kegiatan - Bantuan material pembangunan - Sedekah kepada masyarakat tertentu - Bantuan korban banjir - Donasi untuk bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorship kegiatan - Bantuan material pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorship kegiatan - Bantuan material pembangunan

Sumber: Data Sekunder JOB P-PEJ

Berdasarkan hasil tabel tersebut, program CSR yang telah dilaksanakan di Desa Rahayu selalu ada tiap tahun dan hampir tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun. Program yang dilaksanakan meliputi 6 bidang yaitu bidang sosial dan ekonomi, bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, kompensasi dan rekonsiliasi, dan *government and public relation*. Untuk CSR di bidang lingkungan, tidak ada nama yang spesifik khusus lingkungan dalam program CSR JOB P-PEJ, namun melalui program kompensasi dan rekonsiliasi. Untuk bidang infrastruktur juga diarahkan pada perbaikan lingkungan serta penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pihaknya sendiri telah mengimplementasikan program CSR secara konsisten. Hal ini terlihat dari program yang berkelanjutan setiap tahunnya.

a) Bidang Sosial dan Ekonomi

Setiap tahunnya, JOB P-PEJ selalu memberikan bantuan di bidang ekonomi melalui program CSR yang telah diimplementasikannya. Beberapa bantuan ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah berupa bantuan penguatan modal yang difokuskan ke kegiatan dan usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Rahayu. Untuk tahun 2008, perusahaan memberikan sejumlah bantuan dan pelatihan yaitu bantuan pelatihan konveksi yang di berikan pada KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mekarjaya, bantuan pelatihan memasak kepada KUB Mekarjaya, dan bantuan budidaya ikan lele dan sapi pada KUB Sarirejo. Kemudian berlanjut di tahun 2009, dan 2010. Pada tahun 2011 masih terdapat bantuan modal usaha untuk sektor pertanian dan pedagang kecil menengah di Desa Rahayu, serta bantuan peralatan nelayan untuk masyarakat desa Rahayu. Dan di tahun 2012

terlihat adanya program CSR yang memberikan bantuan modal bagi UKM di Desa Rahayu.

b) Bidang Pendidikan

Selama 5 (lima) tahun terakhir, pihak JOB P-PEJ telah memberikan bantuan pendidikan untuk masyarakat Desa Rahayu, khususnya warga yang tidak mampu. Tahun 2008, terdapat bantuan bebas biaya sekolah untuk murid SMP dan SMA yang diberikan pada 4 (empat) anak, yaitu Suwarjono (SMPN 1 Rengel), Mulyono (SMPN 1 Rengel), Istri Rohmawati (SMAN 1 Rengel), dan Tutik (SMAN 1 Rengel). Namun bantuan ini tidak terlihat ditahun 2009. Pada tahun 2010, terdapat bantuan beasiswa pada murid SD, SMP, SMA serta bantuan renovasi gedung TK PKK Harapan. Kemudian di tahun 2011 tidak terlihat adanya bantuan beasiswa untuk anak yang tidak mampu, namun bantuan pendidikan yang terdapat di tahun 2011 adalah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada TK, TPQ, dan SD, serta pembangunan sekolah SDN Rahayu 1. Tahun 2012 juga tidak terdapat bantuan pemberian beasiswa, namun bantuan lebih difokuskan untuk sarana dan prasarana serta bantuan kegiatan karang taruna Desa Rahayu.

c) Bidang Kesehatan

Pada tahun 2008 hingga 2012, terdapat bantuan di bidang kesehatan untuk masyarakat Desa Rahayu. Untuk tahun 2008 dan 2009 adalah sama, yaitu adanya pengobatan massal. Kemudian di tahun 2010 lebih bervariasi yaitu terdapatnya bantuan pemberian makanan tambahan di SD, bantuan peralatan puskesmas, bantuan pengobatan katarak, serta pengobatan massal. Kemudian di tahun 2011

terdapat bantuan pemberian obat-obatan untuk ponkesdes. Sedangkan pada tahun 2012, bantuan di bidang kesehatan adalah pemberian obat-obatan di Poskesdes yang dilakukan pada bulan Juli hingga Desember (satu semester), perbaikan sarana olahraga, serta pembuatan sumur air bersih di Dusun Kayunan dan Dusun Gandu.

d) Bidang Infrastruktur

JOB P-PEJ telah melaksanakan program CSR di bidang infrastruktur secara konsisten untuk menunjang kebutuhan infrastruktur di Desa Rahayu. Hal ini dapat dilihat dari adanya program yang telah direalisasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2008 terdapat bantuan perbaikan jalan di Dusun Sarirejo, renovasi masjid Dusun Kayunan, dan pembuatan saluran air bersih di Dusun Sarirejo. Kemudian di tahun 2009 adalah melanjutkan program di tahun sebelumnya yakni peningkatan jalan di Dusun Sarirejo. Tahun 2010 terdapat bantuan perbaikan jalan di Dusun Kayunan, pembangunan plengsengan di Desa Rahayu, serta penerangan jalan desa. Sedangkan di tahun 2011 lebih difokuskan pada renovasi dan pembanungan, yaitu pembangunan kantor balai desa, pembangunan tembok penahan jalan, perbaikan tanggul, relokasi SDN 1 dam 2 Rahayu, serta perbaikan jalan dan normalisasi sungai. Kemudian untuk tahun 2012 juga terdapat bantuan keberlanjutan berupa renovasi kantor desa, masjid, dan sekolah, pavingisasi jalan, serta perbaikan saluran air.

e) Bidang Kompensasi dan Rekonsiliasi

Program kompensasi dan rekonsiliasi ini merupakan program yang dilakukan secara berkesinambungan tiap tahunnya. Adapun bantuan yang

diberikan dari tahun 2008 hingga 2012 adalah berupa kompensasi dampak flare CPA. Namun di tahun 2011, selain bantuan kompensasi dampak flare, juga terdapat bantuan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, bantuan sarana olahraga, serta penghijauan/ penanaman pohon. Kemudian kompensasi dampak flare juga dilanjutkan di tahun 2012. Kompensasi ini dilakukan sebanyak 7x dalam satu tahunnya dengan besaran Rp 500.000,- per KK untuk wilayah Ring 1, Rp 400.000,- per KK untuk wilayah Ring 2, dan Rp 300.000,- per KK untuk wilayah Ring 3.

f) Bidang *Government and Public Relation*

Bantuan di bidang *government and public relation* cukup banyak dilakukan dibandingkan dengan bidang yang lain. Pemberian bantuan ini diluar program CSR yang ditetapkan dikarenakan adanya permintaan masyarakat setempat dan juga pemerintah daerah atau kabupaten. Dari tahun 2008 s/d 2012 tidak ada perubahan yang signifikan tiap tahunnya, yaitu menjadi sponsorship kegiatan baik kegiatan masyarakat maupun pemerintah. Namun di tahun 2009 s/d 2012 terdapat tambahan yaitu pemberian bantuan material pembangunan dan di tahun 2010 terdapat bantuan sedekah pada masyarakat tertentu, bantuan korban banjir, dan donasi untuk korban bencana alam.

e. *Outcomes* Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu

Pelaksanaan program CSR telah memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Rahayu. Adanya perubahan sebelum dan setelah program tersebut dijalankan cukup signifikan. Berikut adalah *outcome* program CSR JOB P-PEJ.

a. Bidang Sosial-Ekonomi

Bantuan CSR JOB P-PEJ di bidang sosial-ekonomi telah memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang tergabung dalam KUB. Tabel 8 berikut memperlihatkan beberapa program bidang sosial-ekonomi dan dampaknya.

Tabel 9. Dampak Program CSR Bidang Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Desa Rahayu

Program	Dampak Positif	Dampak Negatif
Bantuan pelatihan bagi KUB	- Meningkatkan ketrampilan untuk mengembangkan usaha	- menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak tergabung dalam KUB
Bantuan penguatan modal untuk KUB	- Memberikan tambahan modal KUB untuk mengembangkan usaha	- menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak tergabung dalam KUB
Bantuan bagi UKM	- Mengembangkan usaha	-
Bantuan budidaya ikan lele dan sapi untuk KUB Sarirejo	- Memudahkan pengembangan usaha - Meningkatkan produktivitas usaha	- menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak tergabung dalam KUB

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya bantuan pelatihan berupa pelatihan konveksi, pelatihan memasak yang dilakukan oleh JOB P-PEJ dapat memberikan manfaat karena mampu meningkatkan ketrampilan mereka sehingga hal ini akan mampu menjadi stimulus untuk mengembangkan usahanya. Selain bantuan pelatihan, perusahaan juga memberikan bantuan penguatan modal

ke beberapa KUB dan UKM dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan produktivitas usahanya.

JOB P-PEJ juga memberikan bantuan budidaya ikan lele dan sapi pada KUB Sarirejo di tahun 2008 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 45.000.000,-. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Rahayu. Budidaya ikan lele dan sapi akan meningkatkan dan memperbanyak variasi usaha mereka. Hingga saat ini, budidaya ikan lele dan sapi masih berjalan di Desa Rahayu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan CSR di bidang sosial-ekonomi yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Di sisi lain, ada pula dampak negatif dari program CSR JOB P-PEJ yang hanya memberikan bantuan pada KUB. Sementara masih banyak pula warga yang tidak tergabung dalam KUB. Hal ini akan membuat perasaan tidak adil karena merasa bahwa bantuan hanya bisa dirasakan manfaatnya bagi KUB saja.

b. Bidang Pendidikan

Bantuan CSR JOB P-PEJ pada bidang pendidikan cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Rahayu. Tabel berikut memperlihatkan program CSR bidang pendidikan dan dampaknya untuk masyarakat Desa Rahayu

Tabel 10. Dampak Program CSR Bidang Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Rahayu

Program	Dampak Positif	Dampak Negatif
Pemberian beasiswa dan bebas biaya sekolah	- Meringkankan beban orang tua untuk menyekolahkan anak mereka	-

	- Memberikan motivasi pada siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan	
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	- Mendukung dan memperlancar kegiatan belajar mengajar	-
Relokasi gedung SDN 1 dan 2 Rahayu	- Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh flare yang mengganggu kegiatan belajar mengajar - Siswa siswi akan lebih nyaman dan konsentrasi dalam belajar	-
Renovasi gedung TK PKK Harapan	- Menbuat siswa siswi lebih nyaman dalam belajar	-

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa adanya pemberian beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu memberikan dampak positif karena dapat meringankan beban mereka sehingga dapat tetap melanjutkan sekolah. Selain pemberian beasiswa dan bantuan bebas biaya sekolah, perusahaan juga memberi bantuan sarana dan prasarana sekolah misalnya pemberian kipas angin untuk SD Rahayu 1. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoga S Utomo selaku security supv. yang mengatakan bahwa,

“kami juga memberi bantuan beberapa kipas angin untuk dipasang di kelas di SDN Rahayu 1. Karena lokasinya dekat dengan flare, jadi saat siang banyak siswa yang kepanasan dan akhirnya kami memberikan bantuan berupa kipas tersebut agar kegiatan belajar mengajar juga menjadi lebih nyaman dari sebelumnya” (wawancara tanggal 29 Januari 2014).

Selain program tersebut, perusahaan juga melaksanakan renovasi di TK PKK Harapan. Renovasi ini dilakukan karena sebelumnya TK tersebut kurang nyaman untuk ditempati, sehingga perlu ada perbaikan bangunan fisik sekolah. Pembangunan relokasi SDN Rahayu 1 dan 2 juga dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena SDN Rahayu 1 dan 2 sudah tidak nyaman lagi karena sangat dekat dengan lokasi Flare CPA sehingga perlu dipindahkan. Bangunan

sekolah tersebut sudah jadi dan akan beroperasi di tahun 2014 ini. Adanya relokasi ini juga sangat memberi manfaat pada masyarakat, terutama siswa siswinya agar tidak terganggu dampak flare saat jam pelajaran. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari beberapa orangtua murid yang salah satunya adalah Bapak Ahmad yang mengatakan bahwa,

“saya dan wali murid lain di sini senang terhadap respon JOB P-PEJ yang tanggap dalam menangani keluhan-keluhan orang tua yang anaknya sekolah di sini. Adanya relokasi ini membuat kami tenang dan senang, ya, meskipun lokasinya menjadi agak jauh dari rumah kami, namun kami puas karena JOB P-PEJ telah berkomitmen penuh melaksanakan tanggung jawabnya dengan merelokasi sekolah ini. Semoga cepat dioperasikan sehingga anak-anak kami bisa lebih tenang dan nyaman ketika belajar” (wawancara tanggal 4 Februari 2014).

Adanya relokasi SDN 1 dan 2 Rahayu tersebut sangat memberi manfaat pada masyarakat Desa Rahayu. Terutama bagi anak atau saudara mereka yang sekolah di sana, termasuk para pengajar. Hal ini dikarenakan dengan lokasi yang baru, letaknya cukup jauh dari flare, sehingga dampaknya tidak terasa secara langsung dan akan membuat semua warga sekolah menjadi lebih nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya program CSR di bidang pendidikan ini sangat memberi manfaat pada masyarakat Desa Rahayu serta tidak diidentifikasi mengenai dampak negatifnya bagi masyarakat.

c. Bidang Kesehatan

Program CSR di bidang kesehatan telah memberi manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Beberapa perubahan infrastruktur kesehatan yang terjadi di Desa Rahayu sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Perubahan Infrastruktur Kesehatan di Desa Rahayu

	<2000	>2000
Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya ada sumur manual - Kemudian mulai ada sumur bor di awal 2000 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sumur bor - Tandon air bersih
Sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya warga harus berobat di Puskesmas Kecamatan Soko yang lokasinya cukup jauh - Di tahun 1985 sudah muncul bidan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dioperasikannya Poskesdes di tahun 2010 - Dibangunnya Poskesdes

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebelum masuk tahun 2000, hanya ada sumur manual di Desa Rahayu, hal ini menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Kemudian mulai ada sumur bor di awal memasuki tahun 2000. Adanya JOB P-PEJ juga memberikan manfaat bagi mereka terutama bantuan pembangunan sumur air bersih dan tandon yang dilaksanakan di tahun 2011. Bantuan ini memudahkan warga Desa Rahayu untuk mendapatkan air bersih, karena tandon tersebut di pasang pipa-pipa yang dialirkan ke rumah warga.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa sebelum tahun 2000, masyarakat Desa Rahayu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ketikan akan berobat karena di desa mereka belum ada pos kesehatan. Namun, setelah tahun 2000, pemerintah mulai membangun pos kesehatan di desa Rahayu. Adapun kontribusi JOB P-PEJ adalah dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan sarana prasana poskesdes tersebut. Program CSR di bidang kesehatan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Desa Rahayu. Tabel 12 berikut menunjukkan dampak pelaksanaan program CSR JOB P-PEJ di bidang kesehatan di Desa Rahayu.

Tabel 12. Dampak Program CSR Bidang Kesehatan di Desa Rahayu

Program	Dampak Positif	Dampak Negatif
Pengobatan massal	- Meringankan biaya pengobatan yang harus ditanggung secara pribadi	-
Pemberian sarana dan prasarana poskesdes	- Mendukung kegiatan operasional poskesdes	-
Bantuan operasi katarak	- Memberikan kesempatan operasi katarak gratis bagi mereka yang tidak mampu	-
Pembangunan sumur air bersih	- Memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih	-
Pemberian makanan tambahan	- Meningkatkan gizi pada anak balita	-
Pemberian obat-obatan untuk poskesdes	- Meringankan beban biaya pembelian obat-obatan - Mendukung kegiatan operasional poskesdes	-

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa program CSR di bidang kesehatan yang dilaksanakan di Desa Rahayu memberikan manfaat bagi masyarakat desa tersebut. Adanya pengobatan massal dapat meringankan beban biaya pengobatan yang harus ditanggung dan akses bagi warga untuk mempermudah penyembuhan. Program bantuan operasi katarak juga memberikan kesempatan bagi mereka yang terkena katarak untuk melakukan operasi secara gratis. Kemudian program pemberian bantuan sarana dan prasarana serta obat-obatan untuk poskesdes juga dapat meringankan biaya pembelian obat-obatan maupun sarana lainnya. Pemberian makanan tambahan juga dirasakan manfaatnya untuk ibu-ibu yang memiliki balita, diharapkan melalui makanan tambahan ini, mampu memperbaiki gizi bagi para balita. Sedangkan program pembangunan sumur air bersih juga sangat membantu warga untuk mendapatkan air bersih. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR

di bidang kesehatan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat Desa Rahayu, dan tidak diketahui dampak negative yang muncul dari kegiatan di bidang tersebut.

d. Bidang Infrastruktur

JOB P-PEJ juga memberikan bantuan CSR di bidang infrastruktur untuk meningkatkan sarana dan prasana desa serta kemudahan akses. Program CSR tersebut telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa Rahayu. Tabel 13 berikut menunjukkan dampak program di bidang infrastruktur di Desa Rahayu.

Tabel 13. Dampak Program CSR Bidang Infrastruktur di Desa Rahayu

Program	Dampak Positif	Dampak Negatif
Perbaikan dan pembangunan jalan	- Memudahkan akses transportasi warga	-
Pembangunan saluran air bersih	- Memudahkan warga mendapat air bersih	-
Renovasi masjid dan kantor balai Desa Rahayu	- Perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan warga	-
Perbaikan tanggul	- Menahan luapan air sungai bengawan Solo	-
Penerangan jalan	- Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara	-
Pembuatan saluran air bersih	- Distribusi air bersih ke rumah-rumah warga	-
Perbaikan saluran air (sanitasi)	- Tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit berbahaya	-

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa banyak manfaat yang didapat oleh warga dari pelaksanaan program CSR di bidang infrastruktur. Program ini lebih diarahkan pada perbaikan fasilitas umum warga serta perbaingan lingkungan Desa Rahayu. Adanya perbaikan dan pembangunan jalan yang terdiri dari pavingisasi dan pengaspalan membuat warga mudah untuk

melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di Desa Rahayu. Pembangunan saluran air bersih akan memudahkan distribusi air bersih ke rumah-rumah warga. Adanya program perbaikan tanggul juga mampu menahan luapan sungai bengawan solo sehingga mencegah banjir di desa tersebut. Sedangkan program CSR dalam rangka penerangan di sepanjang jalan Desa Rahayu juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara terutama saat malam hari.

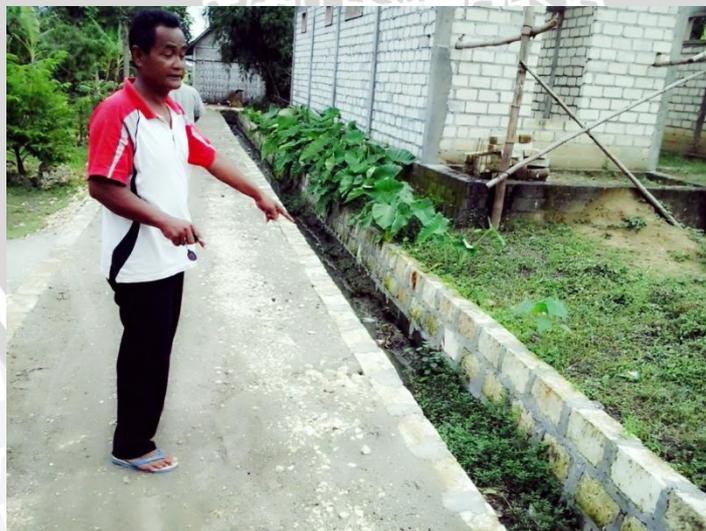
Adanya perbaikan saluran air atau sanitasi di rumah warga juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta mencegah munculnya penyakit berbahaya akibat limbah pribadi dan rumah tangga. Perbaikan saluran sanitasi ini juga disebabkan karena sudah sekitar 80% rumah warga Desa Rahayu yang sudah memiliki MCK. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum masuk tahun 2000, hanya sekitar 30% warga yang rumahnya mempunyai MCK. Sebelumnya, mereka buang air besar sembarangan, seperti di sawah atau di bawah pohon bambu. Memasuki tahun 1990an, mulai dibangun MCK umum di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu. Ini adalah fasilitas yang disediakan untuk masyarakat Desa Rahayu untuk MCK. Pembangunan MCK tersebut sangat membantu masyarakat yang pada saat itu masih jarang memiliki MCK di rumahnya. Warga juga mulai membiasakan hidup bersih dan teratur. Gambar berikut menunjukkan lokasi MCK umum yang dibangun di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu.



Gambar 11. MCK Umum di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu

Sumber: data primer

Gambar di atas menunjukkan lokasi MCK umum yang dibangun di Dusun Sarirejo, namun saat ini sudah banyak warga yang tidak menggunakannya karena sudah memiliki jamban/ MCK di rumah masing-masing. Karena pendapatan yang semakin meningkat, taraf hidup pun semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak warga yang sudah membangun MCK senfiri. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sanitasi yang baik untuk tiap rumah.



Gambar 12. Saluran Sanitasi yang dibangun dari dana CSR

Sumber: data primer

Gambar di atas adalah ketika Bapak Sutikno selaku bendahara LPMD Desa Rahayu sedang menunjukkan lokasi pembangunan saluran sanitasi yang sedang digarap oleh tim LPMD bersama-sama dengan masyarakat. Pembangunan saluran sanitasi tersebut merupakan salah satu program CSR JOB P-PEJ dalam rangka pengelolaan lingkungan, sanitasi ini juga memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat Desa Rahayu karena mampu mencegah munculnya berbagai macam penyakit berbahaya dari pengelolaan sanitasi yang buruk.

e. Bidang Kompensasi dan Rekonsiliasi

Pemberian kompensasi dampak flare pada masyarakat Desa Rahayu merupakan program CSR yang sudah dilakukan sejak JOB P-PEJ ini beroperasi. Pada dasarnya, pemberian kompensasi ini dilakukan sebagai bentuk ganti rugi perusahaan terhadap dampak flare yang mengganggu masyarakat dan lingkungan Desa Rahayu. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayar ganti rugi pada masyarakat, terutama bagi petani karena merasa paling dirugikan sebab banyak tanaman mereka yang mati dan gagal panen akibat adanya flare. Selain kompensasi, perusahaan juga melakukan program pemulihan dengan mengadakan penghijauan di sepanjang jalan Desa Rahayu. Penghijauan ini dilakukan selain untuk memperindah lingkungan, juga mampu mengurangi pencemaran serta panas. Tabel 14 berikut menunjukkan beberapa program CSR bidang kompensasi dan rekonsiliasi dan dampaknya yang dilaksanakan di Desa Rahayu.

Tabel 14. Dampak CSR Bidang Kompensasi dan Rekonsiliasi di Desa Rahayu

Program	Dampak Positif	Dampak Negatif
Kompensasi dampak flare	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai salah satu sumber pendapatan warga - Modal tambahan untuk mengelola tanaman 	- Warga menjadi “manja” dan menggantungkan diri pada kompensasi
Penghijauan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperindah lingkungan desa - Mengurangi polusi 	-

Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa manfaat dari kompensasi yang diberikan oleh JOB P-PEJ adalah sebagai sumber pendapatan warga. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi adalah satu bulan sekali, sehingga banyak warga yang sudah menganggap bahwa adanya kompensasi ini sudah menjadi hak mereka serta salah satu pendapatan mereka. Begitu pula dengan pernyataan yang dikatakan oleh Ibu Yati yang mengatakan bahwa.

“kompensasi yang diberikan perusahaan sudah merupakan hak kami sebagai warga desa yang terkena dampak flare. Ini juga menjadi salah satu pendapatan kita. Banyak tetangga yang bekerja sebagai petani tapi tidak bisa panen, jadi perusahaan memang sudah berkewajiban membayar kerugian pada mereka. Jika kompensasi tidak diberikan, maka kami akan melakukan protes” (wawancara tanggal 4 Februari 2014).

Adanya kompensasi menjadi salah satu sumber pendapatan warga. Selain untuk biaya mengelola tanaman petani yang rusak, kompensasi juga dimanfaatkan warga untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, adanya kompensasi ini tidak senantiasa berdampak positif pada warga Desa Rahayu. Hal ini menjadi boomerang bagi masyarakat sekaligus perusahaan karena adanya kompensasi yang diberikan secara berkelanjutan setiap bulannya, menjadikan warga menggantungkan diri pada kompensasi tersebut. Seolah-olah adanya kompensasi ini menjadi sumber utama pendapatan mereka. Ini akan membuat masyarakat sulit

untuk mandiri dan mengembangkan usahanya, serta menjadikan perusahaan sulit untuk melaksanakan program pemberdayaan pengganti kompensasi.

f. *Bidang Government and Public Relation*

Bidang *government and public relation* bisa dikatakan sebagai bidang kehumasan. Yakni bantuan CSR kepada instansi pemerintahan maupun untuk masyarakat ketika mengadakan acara seperti perayaan hari besar, ritual keagamaan, dan sebagainya. Peran dari CSR JOB P-PEJ adalah dengan menjadi sponsorship kegiatan. Selain mampu meningkatkan citra perusahaan, hal ini juga memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara karena mampu menjadi sumber pendanaan kegiatan.

2. Implementasi Program CSR JOB P-PEJ dalam Mewujudkan Sustainable Development Bidang Lingkungan di Desa Rahayu

Kegiatan industri migas yang dilakukan oleh JOB P-PEJ dapat dipastikan menghasilkan bahan-bahan yang mencemarkan lingkungan. Dampak yang akan diterima lingkungan tersebut akan terjadi baik pada proses produksi, proses pengolahan, maupun pada proses penyimpangan minyak bumi. Oleh karena itu sebagai wilayah lokasi operasional kegiatan JOB P-PEJ, Desa Rahayu masuk ke dalam wilayah ring 1 yang menjadi prioritas sasaran implementasi program CSR perusahaan. Mengingat adanya *flaring* yang berdampak langsung pada desa ini khususnya pada lingkungan Desa Rahayu, sehingga perusahaan wajib mengimplementasikan program-program CSR yang tujuannya adalah mengatasi dampak *flare* serta memperbaiki kondisi lingkungan di desa ini. Pada dasarnya,

lingkungan sendiri merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan karena lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selain itu, lingkungan hidup juga mempunyai pengaruh besar pada pembangunan.

Upaya JOB P-PEJ untuk tetap menjaga kelestarian dan mengelola lingkungan menjadi prioritas dan telah dituangkan ke dalam program CSR yang kemudian diimplementasikan di desa Rahayu. Mengacu pula pada anatomi *triple bottom line* dalam CSR yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan pada aspek *profit* (keuntungan) semata, melainkan juga meliputi aspek lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pihak JOB P-PEJ sendiri telah mengimplementasikan program-program CSR yang berorientasi pada lingkungan, terutama di Desa Rahayu. Tabel 15 berikut menunjukkan program CSR dari JOB P-PEJ di desa Rahayu yang berorientasi pada lingkungan.

BIDANG	2008	2009	2010	2011	2012
Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-
Pendidikan	-	-	-	- Pembangunan sekolah (relokasi)	-
Kesehatan	-	-	-	-	- Pembuatan sumur air bersih
Infrastruktur	- Perbaiki jalan di dusun Sarirejo, Desa Rahayu - Pembuatan saluran air Bersih Dsn.Sarirejo	- Peningkatan jalan dusun Sarirejo, Rahayu	- Perbaiki jalan di Dsn.Kayunan - Plengsengan	- Pembangunan tembok penahan jalan - perbaikan tanggul - Perbaiki jalan dan normalisasi sungai - Relokasi Sekolah	- Pembangunan sekolah - Pavingisasi jalan - Perbaiki saluran air
Kompensasi dan Rekonsiliasi	- Kompensasi dampak flare CPA	- Kompensasi dampak flare CPA	- Kompensasi dampak flare CPA	- Kompensasi dampak flare CPA - Penghijauan/ penanaman pohon	- Kompensasi dampak flare CPA

sumber: Data Realisasi Program CSR JOB P-PEJ tahun 2008 s/d 2012

Tabel tersebut menunjukkan beberapa program CSR JOB P-PEJ yang telah terealisasi dan di arahkan pada perbaikan lingkungan di Desa Rahayu. Beberapa program lingkungan di antaranya juga masuk dalam bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, kompensasi dan rekonsiliasi. Berikut penjelasan dari program CSR yang berorientasi pada lingkungan yang telah dilaksanakan JOB P-PEJ di Desa Rahayu.

a. Relokasi Bangunan Sekolah SDN Rahayu 1 dan 2

Adanya pembangunan sekolah (Relokasi SDN Rahayu 1 dan 2) yang mulai di laksanakan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil selama observasi, relokasi SD ini di latar belakang karena letak SDN 1 dan 2 Rahayu yang sangat dekat dengan lokasi CPA dengan jarak hanya 150 meter. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan di sekitar sekolah tersebut tidak *sustainable* karena langsung mendapat dampak negative dari adanya flare. Kegiatan belajar mengajar di SD ini terganggu karena suara bising, panas, dan bau setiap jam 10.00 WIB ke atas. Dampak yang ditimbulkan oleh flaring di lokasi CPA membuat siswa-siswi serta para guru tidak nyaman berada di lingkungan sekolah serta mengganggu konsentrasi belajar sehingga mereka menuntut adanya relokasi SD ke tempat yang lebih layak. Melalui komite, masyarakat menuangkan semua aspirasi yang kemudian dituangkan ke dalam proposal yang diajukan ke perusahaan. Kemudian melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pihak perusahaan memenuhi permintaan masyarakat dengan merelokasi SDN 1 dan 2 Rahayu. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Yoga S. Utomo yang mengatakan bahwa,

“tahun 2009 lalu, banyak sekali warga yang mengeluh akan dampak flare yang mengganggu lingkungan sekolah SD Rahayu 1 dan 2. Lokasi SD tersebut sangat dekat dengan CPA, sehingga wajar jika dampak dari flare sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di SD tersebut. Kemudian tahun 2011 lalu, pihak JOB P-PEJ merealisasikan permintaan masyarakat untuk memindah/ merelokasi SD Rahayu 1 dan 2 ke daerah yang jauh dari lokasi CPA agar siswa-siswi tidak terganggu adanya bising, panas, dan bau yang menurunkan konsentrasi mereka. Pembangunan sudah dilaksanakan dan saat ini masih tahap *finishing* dan pavingisasi, insyaallah tahun ini selesai semuanya dan akan segera dioperasikan”. (wawancara tanggal 29 Januari 2014)



Gambar 13. Lokasi SDN Rahayu 1 dan 2 yang berada di dekat lokasi CPA

Sumber: data primer

Kemudian, gambar 4.11 berikut memperlihatkan SDN 1 dan 2 Rahayu yang sudah direlokasi.



Gambar 14. Relokasi Pembangunan Gedung SDN 1 dan 2 Rahayu

sumber: data primer (dokumentasi)

b. Pembangunan Sumur dan Tandon Air Bersih

Program CSR yang berorientasi pada lingkungan juga terlihat pada tabel di kolom bidang kesehatan dengan adanya pembangunan sumur. Pada dasarnya, kesehatan juga ditentukan oleh lingkungan, karena kualitas lingkungan yang buruk akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, di tahun 2012 perusahaan membangun sumur dan tandon air bersih. Salah satu indikator lingkungan yang sehat adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Adanya pembangunan sumur air bersih sangat dirasakan manfaatnya bagi warga Desa Rahayu. Selain akibat dari musim kemarau dan *flaring* yang menyebabkan kondisi air di desa tersebut kering dan berbau belerang, adanya sumur dan tandon air bersih ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan air setiap harinya. Gambar di bawah ini menunjukkan sumur air dan tandon yang di bangun dengan dana CSR JOB P-PEJ. Dari sumur ini juga dipasang pipa-pipa yang disalurkan ke rumah-rumah warga.



Gambar 15. Tandon air di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu

Sumber: data primer (dokumentasi)

c. **Pembangunan Jalan dan Saluran Sanitasi**

Terdapat cukup banyak kegiatan dalam tabel pada kolom bidang infrastruktur yang mengarah pada lingkungan yang telah direalisasikan tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008 terdapat adanya perbaikan jalan serta pembuatan saluran air bersih. Untuk peningkatan dan perbaikan jalan dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan dari tahun ke tahun. Program ini dilaksanakan karena sebelumnya kondisi jalan di Desa Rahayu yang belum beraspal sehingga ketika banyak kendaraan perusahaan yang lalu-lalang maka akan menghasilkan debu yang cukup banyak sehingga mengganggu lingkungan wilayah tersebut.

Kemudian adanya perbaikan tanggul dan normalisasi sungai juga dilakukan pada tahun 2011. Sedangkan relokasi sekolah di tahun 2011 dan pembangunan sekolah di tahun 2012 merupakan program yang sama yaitu keberlanjutan dari program relokasi SD Rahayu 1 dan 2 untuk menghindari dampak dari adanya flaring di CPA. Kemudian perbaikan saluran air (pembangunan sanitasi air) juga dilaksanakan di tahun 2012. Pembangunan sanitasi air ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan kesehatan karena sanitasi sendiri pada dasarnya berhubungan dengan limbah, baik yang dikeluarkan oleh manusia maupun dari berbagai macam kegiatan manusia lainnya. Perbaikan saluran sanitasi juga erat kaitannya dengan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sanitasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari berbagai macam penyakit yang timbul akibat pengelolaan sanitasi yang buruk.



Gambar 16. Program pembangunan saluran sanitasi 2012 yang telah diselesaikan di tahun 2013

Sumber: data primer (dokumentasi)

d. Penghijauan dan Kompensai Dampak Flare

Adanya program penghijauan dan juga kompensasi dampak flare ini sebenarnya lebih fokus pada program yang dilaksanakan perusahaan untuk menyelamatkan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel pada kolom bidang kompensasi dan rekonsiliasi dari tahun 2008 s/d 2012, bahwa pemberian kompensasi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan JOB P-PEJ karena efek dari flare yang merusak lingkungan terutama tanaman padi dan palawija milik petani setempat. Pemberian kompensasi ini dimaksudkan sebagai ganti biaya perawatan tanaman yang rusak dan diharapkan supaya masyarakat mampu mengelola kompensasi dengan baik untuk membeli bibit serta peralatan untuk kegiatan

bercocok tanamnya. Namun, masyarakat pesimis akan hal ini sebab mereka yakin bahwa tanaman mereka tetap tidak akan tumbuh dan berbuah meskipun sudah menggunakan peralatan yang modern dari uang kompensasi. Hal serupa di kemukakan oleh Bapak Salim, warga desa Rahayu,

“petani di sini banyak yang pasrah, *mbak*. Meskipun kami sudah menggunakan uang kompensasi untuk menambah sarana bertani, tapi tetap saja tanaman tumbuhnya sangat lambat bahkan kadang tidak menghasilkan. Sebab itu, banyak pula warga di sini yang menggunakan uang kompensasi bukan untuk biaya pertanian justru digunakan untuk biaya hidup. Karena sudah banyak warga yang bergantung pada kompensasi yang sudah diberikan sejak awal timbul dampak dari flare ini”. (wawancara tanggal 5 februari 2014)

Masyarakat setempat telah bergantung pada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dana yang seharusnya sebagai ganti kerusakan tanaman, justru dipergunakan untuk biaya hidup, bahkan berdasarkan observasi, ada warga yang menggunakan uang kompensasi untuk memberi sepeda dan/ atau motor. Kompensasi ini dinilai kurang bernilai untuk orientasi lingkungan, karena lebih dimanfaatkan warga untuk hal lainnya. Namun, disamping pemberian kompensasi pada masyarakat terdampak, pihak JOB P-PEJ juga melaksanakan penghijauan/ penanaman pohon di wilayah desa Rahayu. Penghijauan sudah di programkan sejak tahun 2011, namun baru terlaksana sepenuhnya di pertengahan bulan februari 2014. Selain merujuk ke estetika wilayah, adanya penghijauan ini diharapkan mampu mengurangi polusi akibat asap dan debu dari kendaraan perusahaan, memberikan kesejukan sehingga mengurangi dampak panas dari flare, serta menciptakan lingkungan yang asri, dan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang sadar akan lingkungan (berbasis lingkungan).



Gambar 17. Penghijauan di sepanjang jalan Desa Rahayu

Sumber: data primer (dokumentasi)

Gambar di atas adalah kondisi penghijauan di sepanjang jalan Desa Rahayu.

Foto sebelah kiri menunjukkan kondisi tanah yang masih berlubang dan belum ditanami pohon, sedangkan foto sebelah kanan memperlihatkan keadaan setelah ditanami pohon. Ini dilakukan oleh tim LPMD beserta masyarakat setempat yang juga turut serta dalam penanaman pohon. Dana untuk penghijauan ini menghabiskan sebesar Rp 289.044.000,- yang di ambil dari anggaran program CSR JOB P-PEJ.

Beberapa program yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan di Desa Rahayu merupakan salah satu bentuk pengimplementasian CSR JOB P-PEJ yang tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi dan sosial terutama internal perusahaan, melainkan juga memberikan perhatian penuh pada

lingkungan sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program CSR JOB P-PEJ

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan, tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Dalam implementasi program CSR yang dilakukan oleh JOB P-PEJ ini juga ditemukan beberapa faktor pendukung serta penghambat baik dari internal perusahaan maupun eksternal. Tabel 16 di bawah ini menjelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi program CSR dari aspek internal maupun eksternal organisasi.

Tabel 16. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program CSR JOB P-PEJ

	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan - Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan - Proses administrasi - Struktur organisasi aktor pelaksana - transparansi - Komunikasi
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - tim KPMD/LPMD - Dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi - Budaya masyarakat - Kepentingan individu - Kualitas SDM - Sosialisasi

Sumber: data primer (olahan)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa selama observasi, banyak ditemukan faktor kendala baik secara internal maupun eksternal daripada faktor pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi program CSR di

JOB P-PEJ tidak selamanya berjalan dengan lancar. Namun, disamping banyaknya faktor penghambat, tetap terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu:

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal organisasi perusahaan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh pada keberhasilan suatu program yang akan dilaksanakan. Adapun faktor pendukung internal dalam implementasi program CSR di JOB P-PEJ ada dua, yaitu dukungan dan keberlanjutan program. Yang dimaksud dukungan adalah adanya *support* dan motivasi yang kuat dari pihak JOB P-PEJ, terutama *section* Govrel dan PR sebagai aktor utama pelaksana. Antar personil saling memberikan semangat dan memberikan dukungan penuh pada program yang akan dilaksanakan. Karena pada dasarnya semua program yang telah ditetapkan tersebut banyak memberikan manfaat baik untuk sisi internal perusahaan maupun masyarakat dan lingg lingkungan sekitar perusahaan sehingga tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR tersebut memberikan dukungan penuh agar program bisa terlaksana. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Yoga S.Utomo, selaku *security supv.* yang mengatakan bahwa,

“semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program di sini saling mendukung dan mengingatkan antar tim. Karena di sini kita semua adalah satu tim dari Govrel dan PR yang sudah semestinya memberikan dukungan penuh pada setiap program yang akan dijalankan. Karena program tersebut juga memberikan banyak manfaat untuk perusahaan serta masyarakat sekitar. Tidak hanya memberi nama baik dan meningkatkan citra perusahaan, namun juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar”. (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Adanya dukungan menjadi salah satu hal terpenting karena pelaksanaan suatu program akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor pendukung yang kedua adalah dana. Dana menjadi aspek terpenting dalam terlaksana atau tidak terlaksananya program CSR. Jika tidak ada dana yang dianggarkan untuk CSR, maka program CSR yang telah diagendakan tersebut tidak dapat diimplementasikan.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Selain faktor pendukung dari internal perusahaan, juga terdapat faktor pendukung eksternal yaitu adanya dukungan dan keikutsertaan dari tim komite (LPMD). Tim LPMD sendiri sangat membantu JOB P-PEJ baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun selama proses perencanaan program. Pada proses perencanaan, tim LPMD membantu perusahaan dalam hal penampungan aspirasi dari masyarakat, sinkronisasi dengan program pemerintah, serta penyusunan skala prioritas. Melalui rapat FGD (*Forum Group Discussion*), akan membentuk sinergitas antara aspirasi masyarakat, serta program yang ditawarkan oleh perusahaan. Bisa dikatakan bahwa LPMD ini memediasi antara masyarakat, pemerintahan desa, serta perusahaan.

LPMD adalah tim pelaksana yang dipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan program yang sudah disetujui JOB P-PEJ. Tidak hanya yang menjadi anggota LPMD saja, melainkan partisipasi dari semua masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program CSR. Meskipun dikatakan

masih dalam skala kecil atau minim, namun beberapa dari masyarakat yang telah berpartisipasi dan hadir pada saat rapat atau agenda forum menjadi salah satu faktor pendukung karena mereka dapat menyampaikan aspirasinya mewakili masyarakat lain. Pada dasarnya, kepentingan perusahaan dan masyarakat adalah sama, yaitu mencapai kesejahteraan, jadi adanya dukungan dan partisipasi dari mereka menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain faktor pendukung, kegiatan ini juga mengalami beberapa kendala atau hambatan dalam proses mencapai tujuan dari program CSR yang telah ditetapkan. Beberapa faktor kendalanya juga berasal dari internal perusahaan maupun eksternal.

c. **Faktor Penghambat Internal**

Faktor penghambat internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi perusahaan sendiri. Faktor penghambat yang disebutkan dalam tabel di atas sangat mempengaruhi berhasil tidaknya program CSR yang dilaksanakan. Adapun beberapa hal yang ditemukan selama observasi yang menghambat implementasi program CSR di JOB P-PEJ adalah:

1) Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi implementasi suatu program, khususnya CSR. Tidak ada implementasi suatu program jika tidak ada kebijakan yang mendasarinya. Sebagaimana yang mengatur adanya CSR adalah Undang-Undang serta peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini sudah seharusnya menjadi kewajiban

perusahaan untuk mengimplementasikannya. Namun, salah satu faktor penghambat dari segi kebijakan di sini bukanlah kebijakan dari pemerintah yang dimaksud, melainkan lebih ke kebijakan yang ditetapkan di lingkungan internal perusahaan. Peneliti menemukan bahwa di internal perusahaan, khususnya bagian yang mengurus CSR yaitu section Govrel dan PR, tidak ada kebijakan tertulis yang menjadi kesepakatan yang khusus mengatur CSR tersebut. Misal kebijakan mengenai visi dan misi section tersebut dalam mengelola CSR, kemudian cara manajemen program CSR, dan hal lain yang berhubungan dengan CSR. Hal ini diakui dengan pernyataan dari Bapak Dodi Ibnu Fajar yang mengatakan bahwa,

“salah satu hal yang menjadi kendala adalah karena di sini, khususnya bidang yang mengurus CSR tidak memiliki kebijakan sendiri yang sifatnya mengikat. Kebijakan tentang hal ini baru akan kami tetapkan dan masih dalam proses realisasi” (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Esensi dari sebuah kebijakan menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam implementasi. Jadi, jika tidak ada kebijakan yang menjadi dasar, maka implementasi akan bersifat maya, karena tidak ada aturan yang mengikat berdasarkan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Hal ini juga akan memungkinkan terjadinya penyelewengan jika tidak ada kebijakan yang bersifat legal.

2) Proses Administrasi

Proses administrasi untuk merealisasikan program CSR di JOB P-PEJ adalah mekanisme yang harus dijalani selama proses apakah program tersebut nantinya akan direalisasikan atau tidak. Proses administrasi di sini menjadi suatu

kendala internal perusahaan. Peralnya, proses ini akan memakan waktu yang cukup lama, terutama pada saat di SKKMIGAS. Proses administrasi di JOB P-PEJ sendiri sudah cukup lama karena harus melalui seleksi yang menjadi skala prioritas, kemudian penetapannya juga disesuaikan dengan anggaran, dan harus melalui proposal WP&B yang nantinya diusulkan ke SKKMIGAS. Proses di SKKMIGAS pun juga memakan waktu yang cukup lama karena program-program yang diajukan dalam WP&B juga harus diproses dan diseleksi menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Dodi Ibnu Fajar selaku section PR yang mengatakan bahwa,

“kendala yang lain adalah pada saat proses administrasi. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama, terutama ketika di proses di SKKMIGAS. Jadi pihak perusahaan juga tidak secara langsung menyetujui proposal yang diajukan oleh warga untuk kemudian langsung bisa direalisasikan”. (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Catur sebagai staff section Govrel & PR yang mengatakan bahwa,

“proposal yang diajukan nantinya masih kami seleksi dan diajukan WP&Bnya ke SKKMIGAS, jadi proses administrasi di sana juga memakan waktu yang cukup lama” (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Jadi, salah satu kendala lain yang ada di internal perusahaan adalah ketika proses administrasi terkait persetujuan program yang akan diimplementasikan.

Hal ini dikarenakan memakan waktu yang cukup lama.

3) Struktur Organisasi Pelaksana

Adanya struktur organisasi pelaksana juga menjadi penting dalam suatu perusahaan karena dengan adanya struktur, maka tanggung jawab, uraian tugas,

kedudukan, serta hubungan akan menjadi jelas. Pembagian potensi aktor pelaksana berdasarkan struktur organisasi ini tidak terlihat dalam section Govrel dan PR yang notabene sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintah, juga sebagai pihak yang mengelola CSR perusahaan. Di section ini tidak ada struktur organisasi yang khusus menangani CSR, misal mengenai penanggung jawab, koordinator internal, koordinator lapangan, dsb. Tidak adanya hal ini akan menjadikan tanggung jawab dan tugas aktor yang terlibat menjadi maya. Adanya struktur organisasi ini akan lebih mempermudah koordinasi saat pelaksanaan. Tugas dan tanggung jawab juga lebih jelas dan terarah. Hal ini juga diakui oleh Bapak Dodi selaku PR supervisor yang mengatakan bahwa,

“di sini juga belum ada struktur organisasi yang khusus menangani masalah CSR. Insyaallah dalam waktu dekat juga akan dibentuk, menyusul dengan kebijakan yang akan ditetapkan tadi”. (wawancara tanggal 27 Januari 2014)

Hal serupa mengenai aktor pelaksana juga disampaikan oleh Bapak Syamsuri selaku supervisor section PR and Land Condemn yang mengatakan,

“Untuk pelaksana sendiri kami semua terlibat dan turun ke lapangan untuk memantau. Belum ada struktur organisasi yang khusus menangani CSR. Jadi kami membagi misal 2 (dua) orang personil dari section PR & Govrel yang kita kirim ke desa A untuk memantau kegiatan CSR di sana, nanti dua orang lagi dari sini kita kirim ke desa B, dan terus begitu”. (wawancara tanggal 22 Januari 2014)

Oleh karena itu, aspek struktur organisasi menjadi penting dalam sebuah organisasi pelaksana sebab ini akan mempertegas tanggung jawab, fungsi, tugas, serta hubungan antar personil. Adanya struktur organisasi juga akan mempermudah komunikasi serta koordinasi antar personil.

4) Transparansi

Salah satu penghambat pelaksanaan program CSR adalah masalah transparansi. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat mengenai transparansi dari program yang dilaksanakan. Kurangnya transparansi ini diakibatkan oleh proses birokrasi dalam pemberian bantuan CSR yang terlalu berbelit-belit. Masyarakat juga menilai bahwa kurangnya transparansi ini mengindikasikan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran dan hanya dirasakan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Seharusnya, sebagai perusahaan yang menganut nilai-nilai dalam *Coporate Governance* dan prinsip CSR, transparansi harus menjadi salah satu prinsip yang diutamakan. Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Sukisno selaku Kepala Desa Rahayu yang mengatakan bahwa,

“untuk masalah transparansi sendiri, menurut kami masih sangat kurang. Banyak warga yang mengeluh karena pencairan dana yang tidak transparan dan disosialisasikan. Banyak pula opini warga terbentuk yang mengatakan jika pemberian CSR JOB P-PEJ ini hanya dirasakan manfaatnya oleh beberapa kelompok kepentingan tertentu. Harapannya, pihak perusahaan bisa lebih transparan lagi atas program-program CSR, terutama yang berkaitan dengan dana”. (wawancara tanggal 29 Januari 2014)

5) Komunikasi

Komunikasi menurut Soewarno Handaya Ningrat (1980:94) adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia. Proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki oleh seorang dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti antara sesamanya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah aspek yang paling krusial dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan

hubungan atau interaksi yang terjalin antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antar aktor internal pelaksana program harus berjalan dengan baik supaya tercapai keberhasilan program.

Untuk mencapai komunikasi yang efektif perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Effendy (1985), menjelaskan bahwa komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran, komunikasi harus lengkap, komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi, komunikasi perlu menghindari kata-kata yang tidak enak, serta adanya persuasi dalam komunikasi. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Effendy tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu faktor tersebut hilang, maka komunikasi akan menjadi tidak efektif karena bisa menimbulkan persepsi yang berbeda maupun menjadi sumber masalah karena ketidak tepatan waktu, sasaran, maupun pemilihan kata yang digunakan.

Selama observasi, peneliti menemukan bahwa komunikasi yang terjalin antar aktor pelaksana program CSR masih kurang efektif. Hal ini terbukti masih adanya beberapa pihak yang *miss-understanding* dan salah persepsi akan program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, komunikasi yang tidak efektif tersebut menjadi kendala dalam implementasi program CSR di JOB P-PEJ.

d. Faktor Penghambat Eksternal

Adanya faktor penghambat dari internal perusahaan harus menjadi perhatian penuh oleh semua anggota khususnya pimpinan (supervisor) agar bisa meminimalisir faktor penghambat internal tersebut. Di samping internal, faktor

penghambat dari eksternal perusahaan juga harus menjadi fokus para aktor yang terlibat untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat yang berasal dari eksternal perusahaan, yaitu partisipasi, budaya masyarakat, kepentingan individu dan kelompok, kualitas SDM, dan sosialisasi.

1) Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan dari masyarakat secara sukarela dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi warga terutama desa Rahayu menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program CSR JOB P-PEJ. Adanya inisiatif penuh dari perusahaan tanpa ada partisipasi dari masyarakat akan menghambat tujuan pelaksanaan program. Dari hasil observasi, keterlibatan warga masih sangat minim, bisa dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat saat rembuk atau musyawarah desa. Banyak warga yang tidak hadir pada saat musyawarah tersebut. Beberapa warga juga menyatakan bahwa telah dilaksanakan musyawarah desa yang membahas mengenai program CSR lingkungan yang hanya melibatkan ketua RT dan beberapa masyarakat yang menjadi perwakilan saja, masyarakat keseluruhan hampir menyatakan tidak tahu mengenai rembuk desa tersebut. Hal ini juga diakui oleh Bapak Tarmuji selaku ketua LPMD yang mengatakan bahwa,

“kalau musyawarah desa mengenai program CSR bersama pihak JOB P-PEJ memang kami tidak mengundang semuanya, mbak. Hanya perwakilan saja dan juga ketua RT. Karena kita juga tahu sendiri kalau ada rapat pastinya juga harus ada konsumsi, jadi untuk menghemat biaya juga makanya kami hanya mengundang beberapa perwakilan dari mereka”. (wawancara tanggal 4 Februari 2014)

Selain kehadiran saat rembug desa, keterlibatan warga pada saat pelaksanaan kegiatan juga masih sangat minim. Sebagian besar program masih dilaksanakan oleh anggota LPMD saja yang dibantu oleh segelintir masyarakat. Begitu pula dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tidak semua warga dilibatkan secara langsung bahkan beberapa yang lainnya tidak mengetahui tentang adanya monitoring ini. Hal ini juga ditengarai karena sosialisasi dan publikasi yang masih rendah. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui program CSR yang akan dilaksanakan. Apabila semua warga bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan (musyawarah) dan saat pelaksanaan, bisa dipastikan kegiatan akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Anggota LPMD juga tidak akan kuwalahan dan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.

2) Budaya Masyarakat

Salah satu penghambat eksternal dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat adanya budaya tradisional serta bentuk kegiatan religi yang masih dianut oleh mayoritas penduduk desa. Hal ini menjadikan kesulitan bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka. Terlebih lagi adalah budaya warga yang menggantungkan diri pada kompensasi dampak flare yang diberikan oleh JOB P-PEJ. Hal tersebut sudah membudaya di masyarakat karena sudah turun-temurun dan telah

diterapkan sejak perusahaan ini berdiri dan menimbulkan dampak bagi warga akibat flaring.

Budaya menggantungkan diri pada kompensasi membuat perusahaan cukup sulit untuk mengubah *mindset* masyarakat dan mengganti kompensasi tersebut menjadi program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh warga, khususnya Desa Rahayu. Penduduk juga lebih setuju apabila kompensasi tetap diberikan secara tunai daripada berupa barang atau jasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku warga desa Rahayu yang mengatakan bahwa,

“saya tidak setuju kalau perusahaan tidak memberikan kompensasi secara tunai. Karena ini sudah tanggung jawab mereka sebagai perusahaan yang beretika dan menganggap kami sebagai masyarakat yang harus diperhatikan. Kami sebenarnya juga sangat setuju apabila perusahaan memberi kami program-program pemberdayaan maupun ganti rugi berupa tanaman, namun kompensasi secara tunai juga harus ada, jangan dihapus karena darimana lagi kami dapat mengganti kerugian gagal panen dan tanaman yang rusak selain dari kompensasi itu? Mungkin jika kompensasi dihapus, banyak warga nanti akan melakukan demo ke perusahaan seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya”. (wawancara tanggal 4 Februari 2014)

Berbeda dengan pendapat dari Bapak Sukisno selaku Kepala Desa Rahayu yang mengatakan bahwa,

“sebenarnya saya juga ada keinginan untuk mengubah persepsi warga agar mau menerima kompensasi bukan berupa tunai, melainkan dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat yang lebih nyata dirasakan manfaatnya untuk mereka ke depan. Selain itu juga saya ingin agar perusahaan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi dari warga Rahayu sini. Namun kembali ke masyarakat lagi karena hal ini sudah menjadi budaya dan mereka jumlahnya sangat banyak, sepertinya akan menjadi sulit jika itu dapat direalisasikan” (wawancara tanggal 29 Januari 2014)

Hal tersebut sangat menjadi kendala dalam implementasi program CSR karena jika perusahaan tetap memberikan kompensasi, maka warga desa tidak

akan bisa mandiri dan maju. Perusahaan telah berinisiatif mengganti kompensasi dengan program lain yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Namun, hal ini kemungkinan sulit untuk diwujudkan mengingat bahwa masyarakat sudah sangat menggantungkan diri pada kompensasi dan tidak sedikit pula warga yang menggunakan kompensasi tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan, tetapi uang dari kompensasi tersebut dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Hal ini senada dengan pendapat Bapak Yoga S.Utomo selaku Security Supervisor yang mengatakan bahwa,

“sangat disayangkan sekali karena masyarakat sudah terlalu menggantungkan diri dengan kompensasi yang telah kami berikan sejak awal. Ternyata hal ini cukup membuat kami sulit untuk mengubahnya menjadi program pemberdayaan masyarakat. Dan yang menjadi kendala saat ini adalah banyak warga lebih memilih kompensasi berupa uang daripada berupa barang maupun program lainnya. Sebenarnya sudah banyak program yang ingin kami tawarkan pada warga seperti pelatihan ketrampilan, pemberian bibit ikan lele, dan lain-lain, namun tetap saja warga lebih memilih kompensasi berupa uang tunai”. (wawancara tanggal 24 Januari 2014)

3) Kepentingan Individu dan Kelompok

Pelaksanaan kegiatan CSR di Desa Rahayu ternyata masih diwarnai dengan adanya kelompok kepentingan. Hal ini menjadi salah satu penghambat karena menyebabkan banyak warga yang enggan ikut serta dalam pelaksanaan karena menganggap bahwa program tersebut hanya ditujukan oleh kelompok-kelompok berkepentingan saja, misalnya hanya untuk anggota LPMD atau perangkat daerah, maupun mereka yang bekerja di JOB P-PEJ saja. Banyak penduduk yang mengeluh bahwa sebagian besar proyek CSR dari JOB P-PEJ masih dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan di desa tersebut. Disamping hal tersebut,

warga juga mengeluh atas jumlah dana kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak JOB P-PEJ. Masyarakat menganggap adanya oknum yang berbuat curang dan digunakan untuk kepentingan mereka dengan memotong dana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan.

4) Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya pembangunan. Sebaliknya, kualitas SDM yang rendah akan menjadi penghambat bagi pembangunan. Yang terjadi di Desa Rahayu adalah masih banyaknya penduduk yang memiliki kualitas SDM rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penduduk yang tidak mengecap pendidikan sekolah. Rendahnya SDM di desa Rahayu ini sehingga menjadi penghambat implementasi program CSR JOB P-PEJ.

5) Sosialisasi

Faktor penghambat eksternal yang terakhir adalah sosialisasi. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ karena masih banyak warga yang tidak tahu mengenai program CSR dari perusahaan tersebut. Ketidaktahuan warga akan hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak JOB P-PEJ sendiri maupun LPMD yang memberitahukan warga mengenai program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi sendiri pada dasarnya adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan melalui komunikasi dari generasi ke generasi ke dalam kelompok atau masyarakat.

Adanya sosialisasi ini bermanfaat untuk menciptakan hubungan timbal balik komunikasi yang efektif di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi juga mampu memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai program CSR JOB P-PEJ. Rendahnya sosialisasi pada warga Desa Rahayu ini berdampak pula pada partisipasi warga yang tergolong masih rendah dalam setiap kegiatan CSR. Oleh karena itu, pihak perusahaan sudah seharusnya meningkatkan sosialisasi yang bersifat massif ke seluruh lapisan masyarakat apabila ingin meningkatkan partisipasi dari mereka.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat tersebut harus menjadi perhatian baik perusahaan maupun untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR. Adanya faktor pendukung dan penghambat inilah yang akan menentukan nasib program yang akan dilaksanakan selanjutnya serta menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan program.

C. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu

Sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan prinsip *corporate governance*, JOB P-PEJ telah menanamkan prinsip *responsibility* melalui pelaksanaan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Responsibility* sebagaimana yang dijelaskan oleh Daniri (2005:9-12) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan telah mengaplikasikan prinsip tersebut melalui program CSR dengan

berdasar pada perundang-undangan serta peraturan yang telah ditetapkan mengenai CSR, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta peraturan lain yang mengatur tentang CSR.

Definisi CSR menurut Lord Holme dan Richard Watt (dalam Hadi, 2011:46) sendiri yaitu, *“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large”*. CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas. Pendapat tersebut dibuktikan oleh JOB P-PEJ dengan melaksanakan berbagai macam program yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup seperti adanya program pemberdayaan, bantuan modal untuk KUB, dan lain-lain.

Program CSR yang telah ditetapkan oleh JOB P-PEJ tidak akan bisa dirasakan manfaatnya apabila tidak diimplementasikan. Hal ini juga sependapat dengan Sunggono (1994:137) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Oleh sebab itu, program CSR yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan untuk mengetahui

kebermanfaatannya baik bagi perusahaan maupun *target group*. Banyak manfaat yang akan didapat oleh perusahaan apabila melaksanakan CSR. Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan melakukan CSR sebagaimana pendapat Suhandri M. Putri dalam (Untung, 2009:6-7) yaitu:

1. Mempertahankan dan mendorong reputasi serta citra merek perusahaan

Dalam hal ini, JOB P-PEJ secara langsung dapat mendorong citra reputasi perusahaan baik di mata masyarakat maupun pemerintah. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan tersebut akan di nilai bahwa telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk warga yang tinggal di area perusahaan.

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial

Ketika perusahaan telah melakukan CSR, berarti ia telah mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan juga akan mendapat lisensi secara legal untuk beroperasi secara sosial.

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan

Tidak bisa dipungkiri apabila perusahaan telah melaksanakan CSR, maka resiko-resiko yang nantinya akan muncul dapat diminimalis misalnya saja ketika banyak masyarakat yang melakukan demo pada JOB P-PEJ karena dampak dari flare yang ditimbulkan, maka banyak warga yang terkena dampak tersebut akan menuntut ganti rugi pada perusahaan, bahkan beberapa ada yang mendemo agar perusahaan tersebut ditutup. Namun, adanya CSR yang dilakukan oleh JOB P-PEJ

akan menjadi pertimbangan bagi mereka yang menuntut agar tetap mempertahankan keberadaan perusahaan karena program CSR yang telah dilaksanakan membawa manfaat yang besar bagi sosial maupun lingkungan.

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha

Adanya program CSR juga akan memudahkan serta membuka akses sumber daya bagi operasional usaha. Ketika perusahaan ingin melakukan eksplorasi sumber daya minyak bumi di lokasi yang baru, maka dengan mengimplementasi program CSR, perusahaan tersebut akan dengan mudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk akses sumber daya minyak tersebut. Sebab masyarakat yang tinggal di lokasi yang tersebut akan menaruh kepercayaan bahwa perusahaan akan mampu mengelola sumber daya dengan baik serta ke depannya akan memberikan program CSR yang mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka.

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas

Implementasi CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan akan meningkatkan citra mereka sehingga secara langsung juga akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah

Dengan melaksanakan CSR, maka perusahaan akan dapat mereduksi biaya terutama terkait dengan pembuangan limbah. Seperti halnya pada JOB P-PEJ, ketika mereka melaksanakan program CSR, maka secara otomatis perusahaan akan membuat program yang tujuannya adalah mengelola pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Adanya CSR tersebut, selain dapat mengurangi

dampak negative dari limbah pada masyarakat, juga mampu mengurangi biaya perusahaan yang akan ditanggung nantinya apabila ada korban akibat limbah tersebut.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*

Perusahaan yang mengimplementasi CSR akan mampu memperbaiki hubungan dengan para *stakeholders*. Hal ini dapat tercipta karena pada dasarnya CSR sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders*. Seperti halnya JOB P-PEJ, karena ia telah melaksanakan CSRnya, maka hubungan perusahaan dengan masyarakat maupun pemerintah akan mejadi lebih baik karena masing-masing mendapatkan manfaat dari adanya CSR yang telah dilaksanakan.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.

CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan juga akan mampu memperbaiki hubungan dengan regulator. Hal ini juga terjadi dalam hubungan JOB P-PEJ dengan pemerintah sebagai regulator karena perusahaan tersebut telah mampu melaksanakan kebijakan CSR yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi positif bagi para *stakeholdersnya*.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Salah satu manfaat melaksanakan CSR adalah mampu meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan perusahaan. Begitu pula dengan karyawan JOB P-PEJ, mereka akan merasa bangga apabila telah berhasil melaksanakan CSR di lokasi sasaran dan hal tersebut akan meningkatkan semangat para

karyawan. Belum lagi CSR yang memang ditujukan untuk karyawan perusahaan, ini akan lebih meningkatkan lagi produktivitas mereka dalam bekerja.

10. Peluang mendapatkan penghargaan

Adanya program CSR yang dilaksanakan juga akan menjadikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya ketika perusahaan berhasil melaksanakan program CSR di bidang penyelamatan lingkungan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan penghargaan di bidang tersebut. Begitu pula apabila perusahaan berhasil melakukan pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat tersebut mampu secara mandiri dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka ini juga akan menjadi peluang perusahaan untuk mendapatkan penghargaan. Banyaknya penghargaan yang akan diperoleh ketika perusahaan berhasil mengimplementasikan program CSR, maka secara tidak langsung citra perusahaan di mata masyarakat maupun pemerintah juga akan naik.

Beberapa manfaat tersebut tidak akan tercapai apabila program CSR perusahaan tidak diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan program CSR juga terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dari proses perencanaan hingga evaluasi. Sebuah perencanaan sangat diperlukan agar program tersebut terarah dan jelas tujuannya. Untuk itu, dalam perencanaan terdapat beberapa tahapan sesuai dengan pendapat Wibisono (2007: 121-125) yang menjelaskan beberapa tahapan dalam implementasi CSR sebagai berikut.

a. **Perencanaan Program CSR JOB P-PEJ**

Menurut tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Wibisono (2007:121-125), terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yakni *awareness building*, *CSR assessment*, dan *CSR manual building*.

1. *Awareness building*

Tahap ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi, dan lain sebagainya. Langkah ini dilakukan pihak JOB P-PEJ sebelum menetapkan program CSR. *Awareness building* di sini dilakukan pertama kali di dalam internal perusahaan dengan menginjeksi komitmen kepedulian dan arti penting CSR bagi perusahaan serta masyarakat sekitar. Pihaknya juga sering melakukan diskusi internal untuk membahas CSR. Tahapan ini sudah dilakukan oleh pihak JOB P-PEJ sejak perusahaan didirikan untuk pertama kalinya. Dengan berpedoman pada perundang-undangan serta peraturan lain, perusahaan telah memasukkan CSR sebagai kebijakan internal yang harus dilaksanakan. Tidak terlepas pula dari kegiatan operasional JOB P-PEJ yang secara langsung berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan, maka perusahaan telah menetapkan bahwa CSR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan operasional.

2. *CSR Assesement*

Merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan

langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Untuk perusahaan JOB P-PEJ sendiri, hal ini sudah dilakukan dengan diadakannya *social mapping* di wilayah yang menjadi sasaran implementasi program CSR sebelum menetapkan program yang menjadi prioritas.

3. *CSR manual building*

Merupakan pedoman implementasi dari hasil assesment yang telah dilakukan. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman, dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Tahap perencanaan yang ketiga ini baru dilakukan oleh JOB P-PEJ di tahun 2013 yang bekerjasama dengan akademisi sebagai pihak independen untuk melakukan *mapping* kondisi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di wilayah sasaran CSR. Dari hasil *mapping* tersebut kemudian dibuat *masterplan* CSR yang nantinya menjadi pedoman perusahaan dalam menetapkan program baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pada tahap ini, perusahaan dibantu oleh beberapa akademisi dalam mengkaji lebih dalam mengenai *benchmarking*

serta mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan program CSR di JOB P-PEJ sesuai dengan tahap perencanaan yang dikemukakan oleh Wibisono (2007:121-125) yang mana ketiga tahapan perencanaan secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

b. Implementor Program CSR JOB P-PEJ

Darwin (1998) dalam Widodo (2012:89) menyebutkan bahwa persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi sering disebut sebagai aktor pelaksana kegiatan. Sedangkan menurut Dimock & Dimock dalam Tacjan (2006:28), pelaksana adalah implementor kebijakan yang merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Berdasarkan pendapat Tacjan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ, telah melibatkan semua aktor. Untuk pihak yang menjalankan kebijakan, analisis serta perumusan kebijakan dan

strategi organisasi adalah JOB P-PEJ yang bekerjasama dengan akademisi, sedangkan pihak yang melakukan pengambilan keputusan adalah JOB P-PEJ dan SKKMIGAS sebagai pihak penyetuju. Kemudian pada perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, dan pengawasan, aktor yang terlibat meliputi perusahaan JOB P-PEJ sendiri, tim KPMD yang telah dibentuk, serta masyarakat. Sedangkan untuk pengawasan dan penilaian, aktor yang melaksanakan adalah LPMD, masyarakat, serta ada control dari pemerintahan desa setempat.

c. Sasaran Implementasi Program CSR

Tachjan (2006:26) menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam implementasi adalah adanya kelompok sasaran atau *target group*. Sedangkan Widodo (2012:88) menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Adapun kelompok sasaran (*target group*) yang dimaksud oleh Widodo tersebut adalah kelompok yang mendapatkan manfaat dari implementasi

(kelompok pemanfaat). *Target group* tersebut telah ditetapkan oleh JOB P-PEJ sebelum melaksanakan program CSR yang dimaksud. Kelompok sasaran sendiri di bagi menjadi 3 yaitu wilayah ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 sendiri terdiri dari wilayah yang berlokasi langsung berdekatan dengan perusahaan sehingga menjadi prioritas dalam pelaksanaan CSR JOB P-PEJ. Adanya pembagian wilayah ini memudahkan perusahaan dalam implementasi program CSR agar lebih tepat sasaran serta semakin spesifik sasaran maka akan memudahkan dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan.

d. Hail Pelaksanaan Program CSR di desa Rahayu

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, serta *target group* atau kelompok sasaran. Senada dengan pendapat tersebut mengenai poin kedua yaitu adanya program yang dilaksanakan, maka program CSR di JOB P-PEH yang telah dilaksanakan meliputi 6 (enam) bidang yaitu bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kompensasi dan rekonsiliasi, serta *government and public relation*. Setiap bidang tersebut terdapat program-program penunjang seperti pada bidang sosial-ekonomi, JOB P-PEJ mengadakan program pemberdayaan untuk KUB, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan, terdapat program seperti pengobatan, pemberian sarana dan obat-obatan untuk poskesdes, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang pendidikan terdapat program beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Program yang dijalankan dibidang kompensasi dan rekonsiliasi

seperti penghijauan, pemberian kompensasi dampak flare, dan lain sebagainya. Untuk bidang infrastruktur meliputi program perbaikan dan pembangunan jalan, pembuatan saluran sanitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang government and public relation meliputi program sponsorship, pemberian dana korban bencana, dan lain sebagainya.

Keenam bidang CSR yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tersebut telah sesuai dengan pendapat Edi Suharto (2010:135) yang menjelaskan tentang program CSR yang meliputi CSR bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang modal sosial, serta bidang ekonomi dan kewirausahaan.

6. CSR Bidang Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan. Misalnya memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan yang menunjang pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pihak JOB P-PEJ telah menetapkan program yang menunjang pendidikan dalam program CSRnya. Program tersebut seperti pemberian beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan di Desa Rahayu khususnya.

7. CSR Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target Millenium Development Goals (MDGs). Dengan demikian, program-program CSR sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang kesehatan ini. Program-program CSR bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat. Misalnya memberikan pengobatan gratis, pemberian bantuan makanan tambahan untuk anak-anak dan balita, serta bantuan peralatan posyandu dan perbaikan infrastruktur Puskesmas di daerah operasional mereka dan lain sebagainya.

Sesuai dengan teori tersebut, program CSR JOB P-PEJ juga tidak terlepas dari perhatian pada kesehatan masyarakat sekitar. Berbagai macam program kesehatan telah diimplementasikan oleh perusahaan seperti pemberian makanan tambahan, pengobatan gratis, pemberian sarana dan obat-obatan untuk poskesdes, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan karena sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui CSRnya serta secara tidak langsung telah berkontribusi dalam mencapai target MDGs.

8. CSR Bidang Lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan seringkali dianggap berada dalam ranah publik. Di masa lalu, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui regulasi, saksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor swasta hanya

dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan. Namun, kecenderungan ini kini terbalik. Kiprah perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan global mulai nyata dan meluas.

Dalam hal ini, pihak JOB P-PEJ juga dianggap sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan karena dampak *flare* di CPA yang memberikan pengaruh negative secara langsung pada lingkungan. Namun, perusahaan selalu mengupayakan untuk mengurangi dampak tersebut melalui dua cara, yaitu secara teknologi melalui *deflaring* dan melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan. Beberapa program yang berkaitan dengan lingkungan masuk ke bidang-bidang CSR yang telah disebutkan, tidak ada kekhususan untuk penamaan dari bidang itu sendiri. Misalnya saja kegiatan penghijauan, masuk dalam bidang kompensasi dan rekonsiliasi, perbaikan jalan masuk pada bidang infrastruktur, pembangunan saluran sanitasi dan sumur air bersih masuk ke dalam bidang kesehatan, dan program-program lingkungan lainnya. Adapun tujuan dilaksanakannya program CSR yang berbasis lingkungan ini adalah upaya perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4. CSR Bidang Modal Sosial

Bidang sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang taruna,

sunatan masal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

Beberapa program yang disebutkan di atas juga dilaksanakan oleh JOB P-PEJ seperti pemberian bantuan pada korban bencana alam, pembangunan infrastruktu, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan sebagaimana yang dikemukakan teori di atas, yaitu dibidang modal sosial sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edi Suharto tersebut.

5. CSR bidang ekonomi dan kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang eonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan CSR. Untuk itu, perusahaan telah memberikan bantuan modal pada beberapa KUB untuk meningkatkan produktivitasnya serta mengadakan pelatihan pada mereka seperti pelatihan membuat konveksi, dan lain-lain dengan tujuan agar masyarakat mampu secara mandiri untuk meningkatkan perekonomian mereka. Adapun program di bidang ekonomi dan perusahaan tidak hanya berbicara masalah pemberian modal dan pelatihan, namun juga melaksanakan program seperti pemberian bibit ikan lele agar masyarakat mampu menjadi wirausaha dengan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh perusahaan, serta masih banyak program lain seperti pemberdayaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat Edi Suharto (2010:135) mengenai bentuk-bentuk program CSR perusahaan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ sesuai dengan yang dikemukakan oleh *theorist* tersebut. CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ sendiri pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi dari perusahaan yang diberikan kepada masyarakat serta lingkungan sekitar atas dampak dari kegiatan yang dilakukan. Adanya CSR ini juga bertujuan untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup. CSR ini diharapkan mampu menjadi simbiosis mutualisme bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan sekitar melalui program-program yang telah dilaksanakan.

e. **Outcomes Pelaksanaan Program CSR di Desa Rahayu**

Mengacu pada pendapat Widodo (2012:88) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*). Begitu pula halnya dengan pelaksanaan suatu program, Korten dalam bukunya Akib dan Tarigan (Akib dan Tarigan, 2000:12) menggambarkan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa

suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran maka pelaksanaan kegiatan yang nyata tersebut adalah upaya untuk mencapai tujuan, mengetahui dampak, serta manfaatnya untuk kelompok sasaran. Adapun kelompok sasaran dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ adalah masyarakat Desa Rahayu.

Dampak serta manfaat tidak akan dapat diketahui apabila sebuah program tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian selama observasi dan wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu banyak memberikan dampak positif serta manfaat untuk masyarakat setempat. Beberapa program memang mempunyai dampak negatif seperti adanya kompensasi yang membuat warga menjadi menggantungkan diri pada perusahaan. Ini akan membuat mereka tidak mandiri dan sulit mengembangkan usahanya. Namun sebagian besar program yang dilaksanakan memberi dampak positif pada warga Desa Rahayu serta mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Program CSR JOB P-PEJ yang berorientasi pada lingkungan juga telah memberikan manfaat pada *target group*, terutama pada masyarakat desa Rahayu. Terbukti bahwa dengan program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan cukup membawa dampak yang signifikan pada lingkungan desa Rahayu. Implementasi CSR juga berhasil memperbaiki kerusakan lingkungan secara fisik yang ada di desa Rahayu, misalnya saja kondisi yang panas akibat flare dapat dicegah dan dikurangi dengan adanya program penghijauan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan JOB P-PEJ sebagai BUMN, sudah berkontribusi dalam proses memajukan kesejahteraan bangsa sebagaimana tujuan negara yang tertuang pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, melalui pelaksanaan CSRnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi JOB P-PEJ sebagai BUMN adalah implementor kebijakan pemerintah melalui program-program yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pelaksanaan program-program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Analisis Implementasi Program CSR JOB P-PEJ dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Bidang Lingkungan di Desa Rahayu

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, tentu kegiatan operasionalnya membawa dampak buruk bagi lingkungan. Sudah menjadi kewajiban bagi JOB P-PEJ untuk melaksanakan CSR yang berorientasi

pada lingkungan. Hal ini senada dengan definisi CSR menurut Johnson dan Johnson yang dikutip oleh Hadi (2011:46) menyatakan bahwa: “*CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*“. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Pendapat tersebut sesuai dengan implementasi program CSR JOB P-PEJ yang tidak hanya menekankan pada keuntungan yang akan didapat di internal perusahaan, namun juga fokus pada permasalahan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan sendiri menjadi hal yang sangat penting, terlebih pada perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Maka, diharapkan agar kegiatan operasionalnya mampu diminimalisir akan dampak buruk yang ditimbulkan serta adanya kewajiban untuk melaksanakan program yang berbasis pada lingkungan. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1997, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU nomor 23 tahun 1997 adalah:

- g) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- h) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- i) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- j) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- k) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

- 1) terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, jelas bahwa pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Dalam suatu perusahaan, pengelolaan lingkungan salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan program CSR sebagaimana yang telah dilakukan oleh JOB P-PEJ untuk mengelola lingkungan dengan program CSR yang berorientasi pada perbaikan lingkungan.

Mengacu pula pada paradigma mengenai *triple bottom line* yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan pada aspek *profit* (keuntungan) semata, melainkan juga meliputi aspek lingkungan dan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Elkington yang dikutip oleh Wahyudi dan Busyra (2008:134) yang mengatakan bahwa 3BL (*triple bottom line*) yang diinterpretasikannya menjadi *triple P* (3P) sebagai suatu persyaratan jika perusahaan yang ingin berkelanjutan. Aspek ekonomi diungkapkan dengan *profit*, aspek sosial diungkapkan dengan *people*, dan aspek lingkungan diungkapkan dengan *planet*.

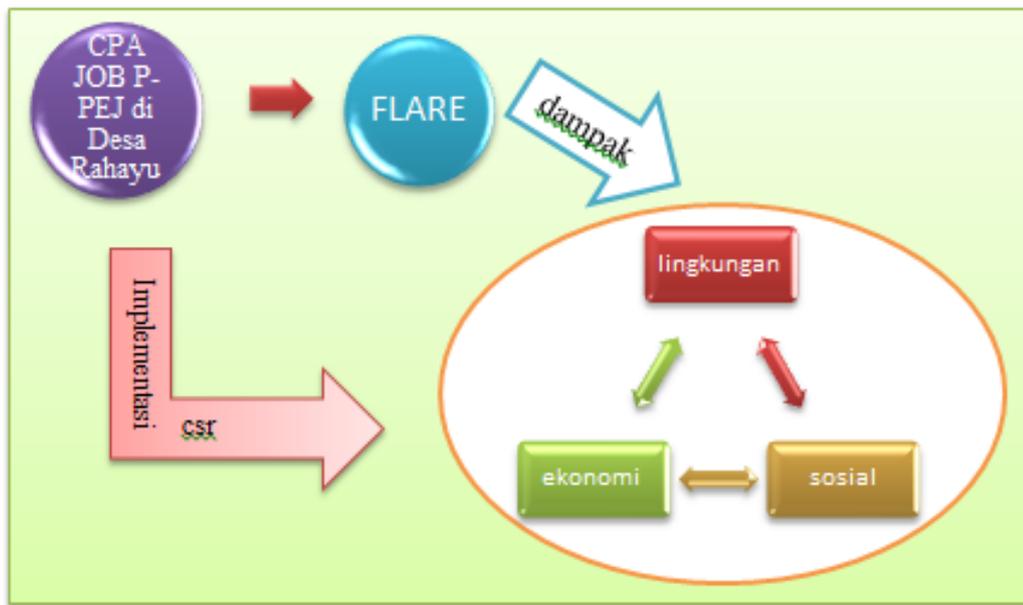
Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana yang di katakana oleh Wahyudi dan Busyra (2008:135) bahwa apabila perusahaan tidak mengimplementasikannya, hanya menekankan pada salah satu aspek saja, maka perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat

internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mampu beraktivitas secara berkelanjutan.

Mengacu pada hubungan ketiga aspek tersebut dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka untuk aspek ekonomi dan sosial telah diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan sosial-ekonomi serta membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, peneliti di sini lebih menekankan pada program CSR JOB P-PEJ yang berorientasi lingkungan karena pada dasarnya perusahaan tersebut bergerak dibidang sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi yang kegiatan operasionalnya secara langsung berdampak pada lingkungan dengan adanya *flaring*. Sebelum masuk pada analisis mengenai implementasi program CSR dalam mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan, peneliti akan memaparkan mengenai fenomena *flare* dan dampaknya di Desa Rahayu yang kemudian menjadi urgensi perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR yang berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.

a. Analisis Dampak *Flare* Kegiatan JOB P-PEJ di Desa Rahayu

Sebelum masuk ke analisis mengenai dampak flare yang menjadi keluhan mayoritas masyarakat ring 1 di Desa Rahayu dan implementasi program CSR JOB P-PEJ yang berbasis pada lingkungan, urgensi pelaksanaan program CSR dapat dilihat konsep pada gambar 18 berikut ini.



Gambar 18. Skema urgensi implementasi CSR JOB P-PEJ

Sumber: data olahan dari hasil wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan gambar skema di atas dapat diketahui bahwa desa Rahayu merupakan wilayah pusat kegiatan operasional JOB P-PEJ sehingga tidak bisa dipungkiri jika desa ini menerima dampak secara langsung dari kegiatan pertambangan. JOB P-PEJ sendiri sebagai salah satu industri hulu migas, dalam operasionalnya terdapat aktivitas pembakaran gas berbahaya sebelum dibuang ke atmosfer. Kegiatan operasi perusahaan ini meliputi kegiatan pengeboran eksplorasi, produksi minyak, dan gas, dan proses pemisahan minyak mentah dari gas utama dan gas lainnya yang mengandung racun yang akhirnya dikirim ke FSO melalui jalur pipa. Proses pemisahan minyak mentah ini dilakukan di *Central Processing Area* (CPA) di mana CPA ini berlokasi di desa Rahayu, kecamatan Soko.

Kemudian, gas ikutan yang dipisahkan dari proses minyak mentah yang dilakukan di CPA selain untuk pembangkit, dimanfaatkan oleh PT Gasuma dan sisanya dibakar berupa flare. Sesuai dengan Pasal 5 Kepmen Lingkungan Hidup

No. 129 Tahun 2003 menjelaskan bahwa *flaring* (pembakaran) adalah salah satu bentuk pengelolaan limbah dari usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang diolah secara *thermal* mengacu pada peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlaku.



Gambar 19. Flare CPA di Desa Rahayu

Sumber: JOB P-PEJ

Pembakaran berupa flare ini memberikan dampak panas, bising, dan bau di Desa Rahayu. Hal inilah yang kemudian mengganggu eksistensi lingkungan di desa tersebut. Terlebih lagi mayoritas penduduk Desa Rahayu menggantungkan pendapatan ekonomi mereka pada sektor pertanian yang notabene sektor ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Banyak penduduk desa Rahayu yang mengeluh atas dampak *flare* yang ditimbulkan dari kegiatan JOB P-PEJ. Ibu Yati salah satu warga dusun Sarirejo, desa Rahayu mengatakan,

“warga di sini banyak yang mengeluh dari dampak flare, *mbak*. Kehidupan kami di sini berubah sejak dibangunnya CPA di wilayah ini, jaraknya pun

sangat dekat dengan rumah kami. Sebelumnya kami tinggal di sini dengan tenang, nyaman, tidak sepanas sekarang. Kami juga sering mencium bau yang sangat mengganggu pernafasan, bahkan banyak juga warga lain yang keracunan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Lingkungan kami menjadi panas, bising, dan ini sangat mempengaruhi pendapatan kita. *Maklum*, kami di sini banyak yang bekerja sebagai petani, namun penghasilan kami menurun akibat dari dampak api flare yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan JOB P-PEJ. Banyak tanaman kami yang lama berbuah, bahkan tidak menghasilkan". (wawancara tanggal 5 Februari 2014)

Dampak flare yang ditimbulkan dari kegiatan operasional JOB P-PEJ sangat mengganggu warga desa Rahayu terutama lingkungan fisik. Berdasarkan pengamatan (observasi) peneliti selama dilapangan, ditemukan beberapa pengaruh buruk dari *flaring* serta kegiatan operasional lain perusahaan bagi lingkungan di Desa Rahayu yaitu:

1. Kebisingan, panas, bau, yang ditimbulkan dari *flaring* sangat mengganggu warga. Bau gas H_2S yang membuat masyarakat mual sehingga banyak yang dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit serta asap dan debu yang menimbulkan gangguan pernafasan. Selain itu juga mengganggu kegiatan belajar-mengajar di SDN 1 Rahayu yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi CPA.
2. Panas yang ditimbulkan dari *flaring* mejadi semakin mengganggu ketika musim kemarau, bahkan ketika musim ini keadaan suhu di siang dan malam hari tidak dapat dibedakan.
3. Setiap hari warga dihinggapi kecemasan dan kekhawatiran akan bahaya gas H_2S yang tiba-tiba muncul.

4. Kadang muncul getaran dari dalam tanah akibat kegiatan operasional JOB P-PEJ. Getaran ini sangat mengganggu warga ketika beristirahat.
5. Debit air menurun, banyak sumur warga yang menjadi kering.
6. Air untuk irigasi ke sawah berwarna hitam karena kandungan belerang yang tercampur.
7. Banyak tanaman palawija milik warga yang tidak berbuah bahkan mati karena efek sinar atau cahaya dan panas dari api flare. Selain itu juga menyebabkan tanaman lain sulit untuk berbuah bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Hal ini secara langsung mengurangi pendapatan warga karena mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.
8. Kekhawatiran akan terjadinya bencana seperti pada PT.Lapindo Brantas

Flare sendiri sudah menjadi *common-issues* pada masyarakat Desa Rahayu dan dampaknya yang dapat mengganggu lingkungan, tak heran apabila banyak warga yang menuntut perusahaan untuk melaksanakan program guna mengurangi efek buruk dari *flare* tersebut. Melihat pengaruh buruk dari flare yang ditimbulkan dari kegiatan JOB P-PEJ, sudah menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Sebagai salah satu perusahaan yang berprinsip pada *Good Corporate Governance* (GCG), JOB P-PEJ sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan di mana pada permasalahan ini adalah mengenai *responsibility* atau tanggung jawab. Prinsip ini kemudian melahirkan gagasan CSR yang dimaksudkan agar kegiatan perusahaan bisa tetap berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar (lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan). Dan salah satu bentuk program tanggung jawab

perusahaan yang dikatakan oleh Zimmerer dalam (Suryana, 2006:232) adalah tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu perusahaan harus ramah lingkungan, artinya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Bentuk dan program CSR yang berbasis lingkungan oleh JOB P-PEJ sudah ditetapkan dan telah berjalan. Cukup banyak program CSR yang sudah terealisasi di desa Rahayu untuk mengurangi dampak *flare* yang ditimbulkan.

b. Analisis Implementasi Program CSR dalam Mewujudkan Sustainable Development Bidang Lingkungan di Desa Rahayu

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, kegiatan operasional JOB P-PEJ tentunya juga menimbulkan dampak yang buruk pada lingkungan seperti yang terlihat secara nyata adalah proses *flaring* dari CPA yang dampaknya langsung mengarah pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negative dari *flaring* tersebut, perusahaan melaksanakan program CSR. Adanya implementasi program CSR yang berorientasi pada lingkungan adalah sebagai roda penggerak yang diharapkan dapat menyelamatkan lingkungan untuk mencapai *sustainable development* pada aspek lingkungan khususnya.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan

terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Arah pembangunan berkelanjutan tersebut juga tertuang dalam kebijakan perusahaan pada poin melaksanakan tujuan dan target yang berkelanjutan dengan penyediaan sumber daya yang memadai termasuk program pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, mengontrol pemakaian bahan-bahan yang berbahaya, perlengkapan alat pelindung diri serta mengusahakan tempat kerja yang aman, nyaman dan sehat.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, harus mencakup 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Munasinghe (2013) mengenai konsep “*Sustainable Development Triangle*”. Ketiga hal ini merupakan dimensi yang berkaitan dan merupakan pilar pendorong dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

a. Aspek Ekonomi

Munasinghe (2013) menjelaskan bahwa “*Economic progress is evaluated in terms of welfare (or utility) – measured as willingness to pay for goods and services consumed*”. Yaitu kemajuan ekonomi dapat dievaluasi pada tingkat

kesejahteraan atau kebutuhan yang diukur sebagai ketersediaan untuk membayar barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, salah satunya bisa diukur dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kemampuan mereka untuk membayar barang dan jasa yang dikonsumsi. Perwujudan dalam pembangunan ekonomi ini dilakukan oleh JOB P-PEJ melalui program CSR dibidang ekonomi dengan salah satunya melalui pemberian modal untuk KUB. Diharapkan dengan adanya modal yang diberikan, mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dalam kelompok tersebut dalam memajukan usahanya.

b. Aspek Lingkungan

Costanza yang dikutip oleh Munashinge (2013) mengatakan bahwa “*The environmental interpretation of sustainability focuses on the overall viability and health of living systems—defined in terms of a comprehensive, multi-scale, dynamic, hierarchical measure of resilience, vigor and organization*”. Dalam terjemahan biasa yaitu interpretasi dari keberlanjutan lingkungan berfokus pada kelangsungan hidup secara keseluruhan dan kesehatan sistem kehidupan—didefinisikan dalam istilah yang komprehensif, multi-skala, dinamis, ukuran hirarkis ketahanan, kekuatan dan organisasi. Hal ini dapat dipersingkat bahwa untuk mencapai keberlanjutan ekologi, setidaknya fokus pada kelangsungan hidup dan terciptanya sistem kehidupan yang sehat. Pada aspek ini, JOB P-PEJ telah mengimplementasikan program-program yang berorientasi pada lingkungan dan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat seperti dilaksanakannya program

penghijauan, pembuatan saluran sanitasi, pembangunan sumur air bersih, dan sebagainya yang merupakan perwujudan untuk menciptakan lingkungan sehat.

c. Aspek Sosial

Munashinge (2013) mengatakan bahwa “*Social development usually refers to improvements in both individual well-being and the overall social welfare*”.

Yaitu pembangunan sosial biasanya mengacu pada perbaikan, baik pada kesejahteraan individu maupun kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hal ini hampir sama esensinya dengan pembangunan ekonomi. JOB P-PEJ sendiri telah berkontribusi dalam pembangunan sosial dengan melaksanakan program-program pemberdayaan dan program sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Rahayu.

Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan tersebut diwujudkan oleh perusahaan melalui CSR. Secara tidak langsung, adanya CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah mampu menciptakan *sustainability* pada ketiga unsur pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Gregory C. Unruh yang mengatakan bahwa *sustainability* harus merupakan tujuan akhir perusahaan. Tujuan akhir tersebut diantaranya adalah menyeimbangkan antara kinerja ekonomi, kesejahteraan sosial (*well-being*), dan peremajaan serta pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan-hidup melalui kegiatan *corporate social responsibility* ini. Jadi hubungan antara CSR dengan pembangunan berkelanjutan

dapat disimpulkan bahwa proses mencapai tujuan akhir disebut sebagai *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sedangkan CSR adalah “*vehicle*” (kendaraan) untuk mencapai tujuan akhir tersebut, jadi CSR merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Dan di dalam pembangunan berkelanjutan ini terdapat indikator yang sangat penting yakni tercapainya *sustainability* yang mencakup beberapa aspek di dalamnya. Untuk mencapai keberlanjutan, maka program dan komitmen perusahaan akan CSR harus diimplementasikan.

Kembali pada permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada upaya-upaya perusahaan melalui implementasi program CSRnya dalam mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan sebab JOB P-PEJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang kegiatannya secara langsung membawa dampak pada lingkungan. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengimplementasikan program sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sendiri adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terpeliharanya keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta anggota masyarakat, yang dapat di salurkan melalui perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain untuk memelihara dan meningkatkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mendukung yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya alam yang cukup, serta lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai (Soemarwoto, 1989:149).

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini telah diwujudkan oleh JOB P-PEJ dengan terus melaksanakan kegiatan CSR dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan secara konsisten dari tahun ke tahun (*sustainable*).

Untuk mencapai keberlanjutan ekologi, ada beberapa tolok ukur yang menjadi acuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Redaksi (2009) mengungkapkan bahwa tolok ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra

(2007) mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

5. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi

Pada dasarnya, pembangunan lokasi perusahaan JOB P-PEJ ini tidak sesuai dengan kaidah ekologi karena perusahaan ini berdiri di tengah-tengah lingkungan yang memiliki cukup banyak penduduk yang mayoritas dari mereka bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan perusahaan tersebut tentunya membawa dampak buruk bagi lingkungan karena tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan operasional perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam minyak dan gas bumi pasti akan menimbulkan dampak yang langsung menimpa lingkungan. Seperti adanya flare yang menjadikan lingkungan di sana menjadi bau, panas, bising, dan sebagainya yang kemudian merusak tanaman-tanaman warga sehingga secara langsung akan menurunkan pendapatan mereka dari sektor pertanian.

Menanggapi hal ini, perusahaan harus mampu menanggung segala macam resiko yang ditimbulkan akibat kegiatannya. Mau tidak mau perusahaan harus memberikan ganti rugi akibat dampak tersebut. Sampai saat ini, pihaknya selalu melakukan program CSR yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak adanya flare. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk point indikator yang pertama, perusahaan belum bisa dikatakan telah menempatkan kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara benar menurut kaidah ekologi. Namun, bagaimanapun juga perusahaan tidak sepenuhnya bersalah karena pada dasarnya mereka juga memanfaatkan dan mengelola sumber daya

yang kebetulan ada dilokasi tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan selama ini, perusahaan juga banyak melaksanakan program CSR di wilayah tersebut dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti merelokasi SD Rahayu 1 dan 2 yang lokasinya sangat dekat dengan *flare*, serta program lain yang bertujuan untuk mengurangi dampak tersebut.

6. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan tidak boleh melebihi potensi lestarnya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya takterbarukan

Dalam indikator ini, dapat diketahui bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non-renewable resources*). Oleh sebab itu, harus dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mensejahterakan hajat hidup masyarakat. Dan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut adalah negara melalui BUMN seperti Pertamina dan dalam hal ini adalah JOB P-PEJ sebagai operator. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik dan tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat yang berada di lokasi perusahaan melalui implementasi program CSR.

Pelaksanaan CSR perusahaan ini juga dimaksudkan sebagai upaya ganti rugi atas kegiatan operasional untuk masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada poin kedua ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perusahaan merupakan pihak yang memang sudah berkewajiban untuk mengelola sumber daya yang terbatas (minyak dan gas bumi) serta telah memberikan ganti rugi pada masyarakat setempat melalui program CSR yang telah dilaksanakan. Indikator ini telah terpenuhi sebagai salah satu upaya mewujudkan *environmental sustainability*.

7. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran

Untuk indikator ini, perusahaan telah mempunyai sistem pembuangan limbah yang baik. Sisa gas yang masih bisa dipakai, di kelola oleh perusahaan lain yang bekerjasama dengan JOB P-PEJ yaitu PT.Gasuma. Limbah lain yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kemudian dibakar di CPA. Pembakaran (*flare*) ini memang seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir gas H₂S dan gas ikutan lainnya terbawa atmosfer dan mengganggu kesehatan masyarakat. Namun, ini menjadi dilema perusahaan karena dampak dari *flare* ini mengakibatkan lingkungan di sana menjadi panas, dan bising. Sebaliknya, jika *flare* dimatikan maka gas H₂S dan lainnya akan menjadi racun yang berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, JOB P-PEJ selalu memberikan kompensasi bagi masyarakat terdampak serta melaksanakan program yang mampu mengurangi emisi gas berbahaya serta panas melalui program penghijauan. Perusahaan juga berkontribusi dalam program pembangunan saluran sanitasi di rumah-rumah warga setempat. Pembangunan sanitasi ini juga dimaksudkan agar pembuangan limbah rumah tangga mempunyai pengelolaan yang baik dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, perusahaan telah mampu membuktikan indikator *environmental sustainability* yang ketiga.

8. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*)

Hal ini merupakan indikator terakhir yang menjadi tolok ukur untuk menciptakan *sustainable development* di bidang lingkungan. Tidak bisa dipungkiri apabila lingkungan di Desa Rahayu sebagai pusat lokasi JOB P-PEJ mengalami perubahan. Sebelum perusahaan dibangun, kondisi ekologis di wilayah ini masih sangat alami dan belum tercemar. Namun, setelah perusahaan ini berdiri, kondisi lingkungan fisik menjadi jauh berbeda, menjadi lebih panas, bau, dan bising. Perubahan ini tentunya juga mempengaruhi daya dukung lingkungan terutama daya dukung untuk menjadi lahan yang dapat ditanami tumbuh-tumbuhan. Hal ini terbukti pada banyaknya tanaman petani yang rusak bahkan mati akibat dari dampak flare yang dihasilkan oleh JOB P-PEJ.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi program CSR JOB P-PEJ telah sesuai dan memenuhi ketiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun JOB P-PEJ yang notabene adalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam, namun implementasi program CSR JOB P-PEJ di desa Rahayu telah mampu mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas lingkungan yang telah terealisasi di Desa Rahayu secara berkelanjutan seperti perbaikan saluran sanitasi, pembangunan sumur dan tendon air bersih, peningkatan dan perbaikan jalan, dan penghijauan. Semua program tersebut bersifat *sustainable*. Meskipun tidak dilakukan tiap tahunnya, namun program ini berjangka dan tetap berlanjut karena disesuaikan dengan prioritas warga. Adanya flare yang ditimbulkan oleh JOB P-PEJ di CPA yang

berlokasi di Desa Rahayu memang memberikan pengaruh buruk, namun pihaknya terus melakukan upaya secara teknis yaitu penggunaan teknologi mahir untuk mengurangi dampak *flaring* serta melalui upaya pelaksanaan program CSR.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

CSR di JOB P-PEJ

Proses implementasi suatu program tidak selamanya mampu dilaksanakan tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, perlu adanya faktor-faktor pendukung agar proses implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Faktor pendukung tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari internal serta eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ sendiri, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari internal perusahaan maupun eksternal yang mengakibatkan pelaksanaan program CSR tersebut tidak bisa optimal.

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung implementasi program CSR yang berasal dari internal perusahaan meliputi dua variabel, yaitu dukungan dan dana. Sunggono (1994:152) mengatakan berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi adalah dukungan di mana pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan pendapat tersebut,

dukungan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sangat mempengaruhi keberhasilan dan ketepatan implementasi. Dalam hal ini, aktor pelaksana CSR internal perusahaan khususnya bidang Govrel dan PR sangat memberikan dukungan pada program CSR yang akan dilaksanakan. Memang sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengimplementasikan program CSR sehingga semua aktor yang terlibat harus memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Selain menguntungkan perusahaan sendiri, program CSR juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Faktor kedua yang mendukung implementasi CSR di JOB P-PEJ adalah ketersediaan dana. Dana menjadi modal utama perusahaan agar mampu melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Tersedianya dana akan memudahkan perusahaan dalam merealisasi program, sebaliknya apabila tidak ada dana yang dianggarkan (minimal 2% dari keuntungan), maka perusahaan tidak akan mampu merealisasi program CSRnya. Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) pada PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang berbunyi “Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Berdasarkan PP tersebut sudah jelas bahwa suatu perusahaan atau PT, harus membuat rencana kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan CSR.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung yang berikutnya berasal dari eksternal perusahaan. Dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ, keberhasilan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh aktor internal saja, melainkan juga beberapa faktor yang datang dari eksternal. Adapun faktor pendukung eksternal yaitu adanya tim KPMD yang dibentuk serta dukungan masyarakat. Keberadaan tim KPMD sangat membantu perusahaan dalam implementasi program CSR. Sebab, perusahaan tidak mampu menangani semua kegiatan mulai perencanaan hingga evaluasi tanpa ada pihak yang bekerjasama. Dalam hal ini, tim KPMD sangat membantu perusahaan dalam implementasi program CSR dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Faktor berikutnya adalah dukungan dari masyarakat. Program CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ tidak akan berhasil dengan optimal apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Bisa dibayangkan apabila perusahaan sudah memiliki beberapa program yang dirasa bermanfaat untuk masyarakat, namun jika masyarakat sendiri tidak memberikan dukungan dan tidak setuju program tersebut dilaksanakan, maka program CSR yang sudah ditetapkan tersebut tidak akan bisa terealisasi.

c. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ teridentifikasi cukup banyak. Yang pertama adalah kebijakan internal, khususnya section Govrel dan PR yang belum ada. Menurut Sunggono (1994:149) salah satu

faktor yang menghambat implementasi adalah dari isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Hal yang menjadi permasalahan dalam JOB P-PEJ saat ini adalah tidak adanya kebijakan yang khusus mengatur CSR perusahaan. Oleh karena itu, tidak adanya kebijakan ini akan membuat pelaksanaan menjadi tidak optimal karena tidak ada standart atau pedoman untuk pelaksanaan.

Faktor penghambat internal kedua adalah proses adminitrasi yang memakan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan pelaksanaan program tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketiga adalah struktur organisasi aktor pelaksana. Menurut Sunggono (1994:152) yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya



pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Permasalahannya adalah, di JOB P-PEJ tidak dibentuk struktur organisasi yang bertugas menangani CSR. Bahkan yang sudah ada struktur organisasinya saja masih dapat menjadi penghambat karena ketidaksesuaian potensi, lebih lagi perusahaan yang tidak memiliki struktur organisasi kepengurusan CSR, ini akan membuat tugas dan tanggung jawab menjadi kabur dan menyulitkan untuk koordinasi.

Faktor penghambat yang keempat adalah transparansi. Apabila transparansi program CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ itu sangat rendah, akan menjadi celah bagi kelompok-kelompok yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan program CSR khususnya yang berkaitan dengan dana. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip penyusunan CSR JOB P-PEJ pada poin ke delapan mengenai tertib dan transparan yang mengutamakan disiplin dan keterbukaan dalam setiap proses dan pelaporan dengan pendekatan P4E (Perencanaan- Pengorganisasian- Pelaksanaan- Pengendalian dan Evaluasi).

Kemudian faktor penghambat internal yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi secara langsung juga berkaitan dengan informasi yang di peroleh setiap aktor pelaksana. Sebagaimana pendapat Sunggono (1994:151) mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Jadi, komunikasi adalah salah satu hal mendasar yang mampu memberi pengaruh besar pada implementasi program CSR. Terlihat bahwa

komunikasi beberapa aktor di lingkup internal perusahaan masih belum efektif dan efisien sehingga menjadi penghambat pelaksanaan program CSR.

d. Faktor Penghambat Eksternal

Minimnya partisipasi menjadi salah satu penghambat dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ. Partisipasi sendiri pada dasarnya adalah keikutsertaan setiap orang dalam proses pelaksanaan secara sukarela. Namun, yang menjadi kendala adalah warga Desa Rahayu yang diluar anggota KPMD masih sedikit yang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan CSR. Hal ini menjadikan pelaksanaan menjadi tidak optimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyusunan CSR di JOB P-PEJ yang menekankan pada partisipatif, yaitu melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses kegiatan.

Selain partisipasi, faktor penghambat eksternal lainnya adalah budaya masyarakat yang menggantungkan diri pada kompensasi yang diberikan JOB P-PEJ untuk masyarakat terdampak. Kompensasi yang telah berlangsung sejak awal dari generasi ke generasi membuat warga tidak bisa mandiri untuk meningkatkan ekonomi mereka selain dari kompensasi. Budaya seperti ini sulit untuk dihapus, sehingga menjadi penghambat implementasi program. Program CSR yang seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih bisa mandiri, menjadi tidak berarti karena masyarakat lebih menuntut adanya kompensasi secara tunai daripada program pemberdayaan.

Di samping budaya menggantungkan diri pada kompensasi, adanya kepentingan individu atau kelompok juga menjadi kendala implementasi program

CSR JOB P-PEJ. Sebab, masih ada program yang hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan program yang dilaksanakan tidak bisa menyeluruh dan mencapai sasaran ke semua masyarakat. Faktor penghambat eksternal berikutnya adalah kualitas SDM yang masih rendah di Desa Rahayu. Rendahnya kualitas SDM ini dilatarbelakangi karena banyaknya penduduk yang tidak mengenyam pendidikan sekolah akibat minimnya biaya yang mereka miliki untuk sekolah. Faktor ini menjadi penghambat implementasi program CSR karena perusahaan akan cukup mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan program-program terutama pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan sebagainya.

Faktor penghambat yang terakhir adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan faktor penting dalam suatu implementasi program. Hal ini berkaitan dengan informasi yang nantinya akan di dapat oleh masyarakat. Adanya sosialisasi yang baik akan mendukung keberhasilan pelaksanaan program, sebaliknya sosialisasi yang kurang akan menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi mengenai program CSR di masyarakat Desa Rahayu masih tergolong rendah. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui program-program CSR JOB P-PEJ yang akan dilaksanakan. Akibatnya, masyarakat yang tidak tahu tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program. Analisis fokus penelitian implementasi program CSR JOB P-PEJ dalam mewujudkan sustainable development di bidang lingkungan secara ringkas dapat dilihat pada tabel 17 berikut.

Fokus Penelitian	Analisis Data	
	Normatif dan Teoritis	Empirik
1. Implementasi Program CSR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, dan PP No. 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program CSR. - Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137). - implementasi merupakan upaya yang dilaksanakan setelah program atau kebijakan ditetapkan kemudian untuk mengetahui manfaatnya harus melalui implementasi secara nyata melalui pelaksanaan program. - Adanya konsep <i>corporate governance</i> seperti yang dijelaskan di bab 2 melahirkan adanya konsep CSR yang menjadi kewajiban perusahaan untuk mencapai <i>Good Corporate Governance</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menerapkan prinsip <i>Corporate Governance</i> dengan mengimplementasikan program CSR dengan berdasarkan pada Undang-Undang serta Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan CSR dalam perusahaan. Implementasi program CSR dilaksanakan sejak tahun 2002 ketika JOB melaksanakan kontrak dengan petroChina (JOB P-PEJ)
a. Perencanaan Program CSR	<ul style="list-style-type: none"> - Alur perencanaan CSR yang ditetapkan oleh JOB P-PEJ pada tabel 6 - Kebijakan JOB P-PEJ dalam penyusunan program CSR - implementasi CSR meliputi beberapa tahapan menurut Wibisono (2007: 121-125) salah satunya adalah tahapan perencanaan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Awareness building</i> 2. <i>CSR Assesement</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - proses perencanaan program CSR di JOB P-PEJ sesuai dengan aspek normative dan teoritis di mana sebelum menetapkan program, perusahaan melakukan <i>social mapping</i> kemudian CSR <i>planning</i>, dan pelibatan masyarakat melalui rebug desa untuk menyusun skala prioritas.

3. CSR manual building		
b. Implementor	<ul style="list-style-type: none"> - Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada salah satunya adalah unsur pelaksana. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementor pelaksanaan kegiatan CSR meliputi perusahaan sendiri, masyarakat yang menjadi sasaran CSR, SKKMIGAS, pihak akademisi sebagai aktor independen dalam melakukan <i>economic, social, and environmental mapping</i>, serta pemda.
c. Target group	<ul style="list-style-type: none"> - Tachjan (2006:26) juga menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam implementasi adalah adanya kelompok sasaran atau <i>target group</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yang menjadi kelompok sasaran CSR JOB P-PEJ adalah masyarakat di sekitar lokasi perusahaan yang dibagi menjadi 3 ring. Untuk ring 1 mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaan CSR sebab lokasi berdirinya perusahaan berada di wilayah tersebut
d. Hasil Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tachjan (2006:26) menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam implementasi adalah adanya program yang dilaksanakan - Edi Suharto (2010:135) menjelaskan tentang program CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, modal sosial, dan ekonomi & kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program CSR di JOB P-PEJ mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kompensasi dan rekonsiliasi, serta <i>government and public relation</i>. Adapun program lingkungan sudah masuk dalam bidang-bidang CSR di JOB P-PEJ.
e. Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> - Untung, (2009:6-7) mengemukakan adanya 10 keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama observasi, peneliti menemukan

	<p>yang dapat diperoleh jika perusahaan melakukan program CSR. Sedangkan Radyati (2008:74) juga mengungkapkan beberapa manfaat melaksanakan CSR. Adanya CSR akan memberi manfaat baik bagi perusahaan sendiri, terutama juga pada kelompok sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam teori implementasi juga dijelaskan bahwa suatu kebijakan atau program tidak akan dirasakan manfaatnya jika tidak diimplementasikan. 	<p>berbagai macam dampak positif maupun negative yang ditimbulkan dari pelaksanaan CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu. Namun, dampak positif & manfaatnya lebih banyak ditentukan daripada dampak negatifnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaat ini diperoleh karena program CSR JOB P-PEJ telah berhasil diimplementasikan sehingga dapat diketahui kebermanfaatannya pada kelompok sasaran.
<p>2. Implementasi CSR dalam mewujudkan <i>Sustainable Development</i> bidang lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ISO 26000 - beberapa macam pertanggung-jawaban perusahaan menurut Zimmerer yang dikutip oleh Suryana (2006:232) mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu perusahaan harus ramah lingkungan, artinya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. - Wahyudi dan Busyra (2008:36) tentang lima pilar aktivitas CSR pada pint ke-5 yaitu <i>Protecting the environment</i> adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan. - Anatomi <i>Triple P</i> dalam CSR yang dijelaskan oleh Wahyudi dan Busyra (2008:135) mengenai “Planet” yang menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptabel untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawabnya kepada lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan operasional JOB P-PEJ menghasilkan <i>Flare</i> di area CPA yang dapat menimbulkan dampak negative secara langsung bagi lingkungan yaitu panas, bau, dan bising. Oleh sebab itu, perusahaan berkewajiban untuk merekonsiliasi lingkungan (perbaikan lingkungan) dengan melaksanakan program yang berorientasi pada lingkungan. Beberapa program lingkungan yang telah terealisasi adalah penghijauan, pembuatan saluran sanitasi, relokasi sekolah ke tempat yang jauh dari CPA, pembuatan saluran air bersih, pembuatan sumur dan tandon air bersih, serta perbaikan dan

	<ul style="list-style-type: none"> - Munasinghe, 2013) menjelaskan bahwa segitiga pembangunan berkelanjutan terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial - Soemarwoto (1989:146) yang mengatakan bahwa “pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi Antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Oleh karena itu, tidak akan terjadi sebuah pembangunan dalam kehidupan manusia jika tidak ada lingkungan yang mendukung kearah terwujudnya pembangunan tersebut”. - Askar Jaya (2004) menegaskan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan memelihara integritas tatanan lingkungan. 	<p>pembangunan jalan. Adanya program ini juga dilaksanakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang nantinya dapat menjadi manfaat tidak hanya untuk saat ini, namun juga generasi yang akan datang.</p>
<p>3. Faktor Pendukung implementasi program CSR JOB P-PEJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> g) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. h) Sumber-sumber Kebijakan i) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan j) Karakteristik badan-badan pelaksana k) Kondisi ekonomi, sosial dan politik l) Kecenderungan para pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor pendukung dalam implementasi program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu baik dari internal maupun eksternal perusahaan teridentifikasi terdapat 3 faktor yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan. Adanya dukungan dari pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan CSR sehingga program dapat terealisasi 2. Dana. Adanya dana CSR yang disediakan JOB P-PEJ (yang ditetapkan SKKMIGAS) menjadi stimulus untuk realisasi program.

		<p>3. tim KPMD/LPMD. Keberadaan tim komite ini sangat membantu perusahaan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kegiatan CSR.</p>
<p>4. Faktor Penghambat implementasi program CSR JOB P-PEJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bambang Sunggono (1994:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Isi kebijakan b. Informasi c. Dukungan d. Pembagian Potensi - James Anderson yang dikutip Bambang Sunggono (1994:144-145) juga menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan adalah Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor penghambat implementasi program CSR baik dari internal maupun eksternal teridentifikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan (tidak ada spesifikasi kebijakan CSR) 2. Proses administrasi (memakan waktu yang cukup lama) 3. Struktur organisasi aktor pelaksana (tidak ada struktur organisasi khusus menangani CSR) 4. Transparansi (kurang transparan) 5. Komunikasi (masih terjadi miss-komunikasi) 6. Partisipasi (minimnya paristisipasi masyarakat dalam pelaksanaan) 7. Budaya masyarakat (menggantungkan diri pada kompensasi) 8. Kepentingan individu (masih ada kegiatan yang hanya di terima manfaatnya oleh kepentingan baik individu maupun kelompok)

		<p>tertentu)</p> <p>9. Kualitas SDM (kualitas SDM Desa Rahayu yang masih rendah)</p> <p>10. Sosialisasi (kurangnya sosialisasi dari perusahaan & LPMD ke masyarakat mengenai program CSR)</p>
--	--	---

Sumber: Data primer dan sekunder yang sudah diolah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap temuan di lapangan, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java* sebagai perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang sumber daya alam minyak dan gas bumi telah mengimplementasikan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional. Program CSR yang diimplementasikan meliputi bidang pendidikan, sosial-ekonomi, kesehatan, infrastruktur, kompensasi dan rekonsiliasi, serta *government relation and public relation*.
2. Implementasi program CSR di JOB P-PEJ memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan, implementor, penetapan sasaran, hasil pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
 - a. Perencanaan. Pada tahap ini diawali dengan proses mapping kondisi masyarakat sekitar, kemudian dari hasil mapping tersebut perusahaan menawarkan sejumlah program beserta anggaran untuk kemudian dimusyawarahkan oleh tim LPMD bersama dengan masyarakat. Program yang ditawarkan kemudian ditindak lanjuti pada saat rembung desa untuk ditetapkan skala prioritas yang kemudian dituangkan ke dalam proposal dan diajukan ke JOB P-PEJ. Sebelumnya juga ada

penyinkronan antara program perusahaan dengan program pemerintah desa agar tidak tumpang tindih. Setelah proposal warga masuk ke perusahaan, pihak JOB P-PEJ menyeleksi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan anggaran kemudian dibuatkan WP&B untuk diajukan ke SKKMIGAS. Lembaga tersebutlah yang berhak menyetujui atau menolak WP&B yang telah diajukan oleh JOB P-PEJ. Jika SKKMIGAS menyetujui, maka program CSR bisa terlaksana.

- b. Implementor. Selain pihak JOB P-PEJ dan SKKMIGAS sebagai pihak utama, implementor lain yang juga bekerja sama dalam pelaksanaan adalah masyarakat dan tim LPMD, pihak akademisi, serta pemerintah daerah.
- c. Sasaran. Untuk penetapan sasaran, telah di bentuk wilayah Ring 1, Ring 2, dan Ring 2 sesuai dengan lokasi wilayah dengan perusahaan. Wilayah Ring 1 menjadi prioritas pelaksanaan program CSR dikarenakan berada di lokasi operasional kegiatan JOB P-PEJ yang secara langsung terkena dampak.
- d. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tim JOB P-PEJ bekerjasama dengan komite (LPMD) serta masyarakat lainnya. Program CSR yang telah dilaksanakan di Desa Rahayu selalu ada tiap tahun dan hampir tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun. Program yang dilaksanakan meliputi 6 bidang yaitu bidang sosial dan ekonomi, bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, kompensasi dan rekonsiliasi, dan government and public relation.

- e. Pelaksanaan CSR di Desa Rahayu banyak memberikan dampak positif dan manfaat daripada dampak negatif pada masyarakat di desa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, JOB P-PEJ telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Rahayu serta mampu memperbaiki lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui implementasi program CSR.
3. Implementasi program CSR JOB P-PEJ di desa Rahayu telah mampu mewujudkan *sustainable development* di bidang lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas lingkungan yang telah terealisasi di Desa Rahayu secara berkelanjutan seperti perbaikan saluran sanitasi, pembangunan sumur dan tendon air bersih, peningkatan dan perbaikan jalan, dan penghijauan. Semua program tersebut bersifat *sustainable* serta terbukti mampu membawa perubahan serta perbaikan lingkungan yang cukup signifikan. Meskipun tidak dilakukan tiap tahunnya, namun program ini berjangka dan tetap berkelanjutan.
4. Pelaksanaan kegiatan CSR yang diimplementasikan di desa Rahayu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun eksternal. Dari faktor pendukung internal adalah adanya dukungan, program yang berkelanjutan, dan dana. Sedangkan dari faktor dukungan dari eksternal adalah adanya dukungan dari masyarakat dan tim LPMD. Sedangkan dari faktor penghambat internal adalah tidak adanya

kebijakan khusus yang ditetapkan perusahaan dalam melaksanakan CSR, proses administrasi yang memakan waktu cukup lama, tidak adanya struktur organisasi aktor pelaksana program CSR yang mengakibatkan kaburnya tugas, fungsi dan tanggung jawab, masih rendahnya transparansi program CSR, serta ketidak efektifan dan efisiensi komunikasi antar aktor. Di samping faktor penghambat internal, juga ditemukan beberapa faktor penghambat dari eksternal yaitu, minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan dan monitoring, masih melekatnya budaya menggantungkan diri masyarakat terhadap kompensasi JOB P-PEJ, masih banyaknya program yang hanya dapat dirasakan manfaatnya pada sebagian kelompok kepentingan, kualitas SDM Desa Rahayu yang masih rendah, serta minimnya sosialisasi perusahaan kepada warga masyarakat.

B. Saran

Dalam pelaksanaan implementasi CSR JOB P-PEJ guna mewujudkan sustainable development masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar pelaksanaan dapat efektif dan efisien serta dapat mencapai sebuah sustainability.

1. Internal perusahaan terutama section Govrel dan PR harus membuat kebijakan serta struktur organisasi yang jelas yang menangani kegiatan CSR. Hal ini dimaksudkan agar pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab tiap personil menjadi jelas serta memudahkan koordinasi antar aktor

internal. Kebijakan yang ditetapkan harus terarah dan sesuai dengan prosedur CSR menurut legalitas secara normatif.

2. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak akademisi dalam melakukan *mapping* dan *masterplan* CSR tidak semata-mata hanya formalitas belaka, disamping akademisi merupakan pihak yang independen. Harus ada keberlanjutan dari kerjasama ini dan perusahaan mampu menganalisa hasil kajian mereka untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dan mampu direalisasikan.
3. Pihak internal harus aktif dan intensif dalam memberikan sosialisasi kepada warga agar masyarakat memberikan perhatian terhadap program CSR sehingga mampu meningkatkan partisipasi mereka. Sosialisasi ini harusnya dilaksanakan secara *massif* ke seluruh masyarakat di setiap perusahaan akan melaksanakan program, paling tidak satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
4. Hubungan antara JOB P-PEJ dengan LPMD dan masyarakat harus dibina agar lebih baik lagi, tidak hanya terjalin ketika pelaksanaan saja, namun diluar kegiatan CSR juga harus ditingkatkan lagi. Tim LPMD juga lebih sering mengikutsertakan warga dalam pelaksanaan kegiatan CSR sehingga tidak hanya anggota LPMD saja yang mendominasi, namun dengan banyaknya warga yang ikut berpartisipasi, maka kegiatan akan lebih tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Hal ini juga nantinya bisa mengurangi keluhan-keluhan negative dari warga.

5. Melaksanakan program lingkungan secara berkelanjutan, misalnya mengadakan penghijauan setiap 6 (enam) bulan sekali secara bertahap namun menyeluruh, mengadakan sosialisasi akan pentingnya melestarikan lingkungan dan penghijauan pada masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Selain itu juga mengadakan program pelatihan pengelolaan limbah dan sampah yang dilaksanakan oleh perusahaan bekerjasama dengan dinas terkait atau LSM pada masyarakat. Juga membentuk tim yang beranggotakan masyarakat setempat untuk melakukan pengecekan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A-consultant. Iso 26000. 2011. Diakses pada tanggal 20 November 2014 melalui: <http://a-consultant.webs.com/iso26000.htm>

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik

Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin, Sutawinangun, dan M Doddy Kusadrianto. 2004. *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. Forum for Corporate Governance in Indonesia

Ambadar J. 2008. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2005. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Indonesia Center for Sustainable Development

Djajadiningrat, T Surna. 2005. *Sustainable Future, Indonesia Center for Sustainable Development*. Jakarta: ICSD

Djamarah, S.B. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta

Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT Ray Indonesia

Dwi, Wenny. 2013. Peran CSR dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2014 Melalui: <http://wennydw hrynt.wordpress.com/2013/05/14/peran-csr-dalam-pembangunan-dan-pengembangan-masyarakat/>

Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.

- Effendy Onong Ichjana, 1985. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Remaja Karya
- Fajar, Mukti. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indoneisa: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Global, Britanica. Welfare State. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2014, melalui global.britanica.com/welfarestate/
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jaya, Askar. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian IPB*
- Makmur, Mochammad. 2009. *Ekologi Administrasi Publik: Dalam Pespeltif Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: UB Press
- Maria R. Nindita Radyati. 2008. *CSR dan Sustainable Development*. diakses pada tanggal 25 Oktober 2014 melalui <http://cect-usakti.org/news.php?Ln=en&Mn=4&A=1&Kd=38>
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Munasinghe, M. 2013. *Sustainable development triangle*. Diakses pada tanggal 3 April 2014 melalui <http://www.eoearth.org/view/article/156365>
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- _____. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Ningrat, Soewarno Handaya, 1980. *Pengantar Ilmu Studi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Pertamina. Tentang CSR. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2013 melalui <http://www.pertamina.com/social-responsibility/tentang-csr/>
- Radyati MRN. 2008. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Business Links
- Redaksi, Dewan. 2009. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Di akses pada tanggan 3 April 2014 melalui http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=123

- Siagian, Sondang P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemarwoto, Otto. 1989. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Suharto, Edi. 2010. *CSR & Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surachmad, Winarno. 1993. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Sutamihardja, 2004. *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB*
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Tjager, I Nyoman. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahab. Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press

Welfare State. 2013. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 melalui <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/639266/welfare-state>

Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

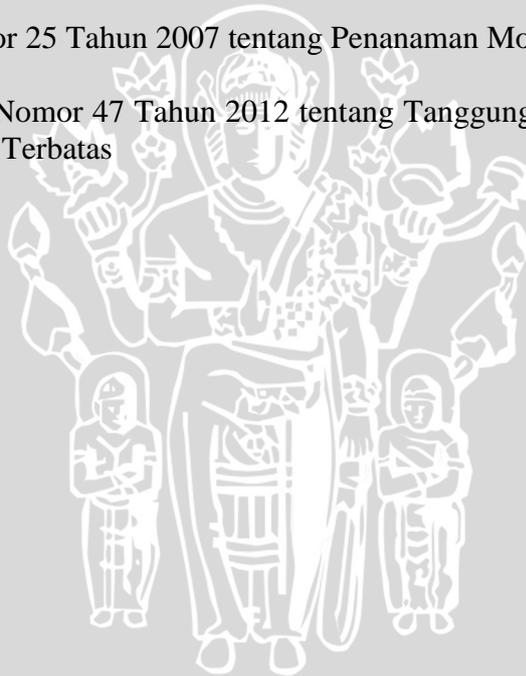
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

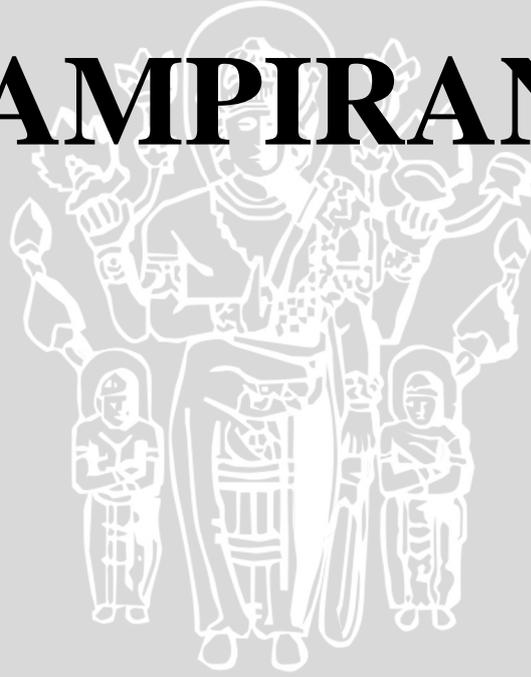
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di *Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java*



Joint Operating Body
Pertamina-PetroChina East Java



SURAT KETERANGAN

No : 028 /LTR/P-PEJ/TF-FA/14

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hananto Aji
Jabatan : Field Admin Superintendent.

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Rifka Auliya
No. Mahasiswa : 105030100111137
Jurusan : Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir pada :

Tanggal : 22 Januari 2014 sampai dengan 21 Pebruari 2014
Tempat : Field Administration / PR & LC

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 22 Pebruari 2014
JOB Pertamina - PetroChina East Java



Hananto Aji
Field Admin Superintendent

Tembusan :
• HRD Supv.
• File



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Ket: Lokasi Sumur dan Tandon
Dsn. Sarirejo, Desa Rahayu



Ket: Penghijauan di sepanjang
jalan Desa Rahayu



Ket: Bersama Bapak Tarmuji
(Ketua LPMD Rahayu)



Ket: Bersama Bapak Sutikno
(Bendahara LPMD Rahayu)



Ket: Ibu Kasmi salah satu warga Dsn. Sarirejo, Desa Rahayu



Ket: Bersama dengan Bapak Endik selaku staff Govrel & PR



Ket: Bersama Bapak Dodi Ibnu Fajar (kanan) selaku Sr. Govrel & PR Supv. dan Bapak Syamsuri (kiri) selaku Security & Land Condemmm Supv.

Lampiran 3. *Interviews Guide* (Pedoman Wawancara)

1. Sejak kapan perusahaan JOB P-PEJ ini melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan?

Jawab:

.....

2. Bagaimana persepsi Anda mengenai urgensi pelaksanaan CSR di JOB P-PEJ ini?

Jawab:

.....

3. Bagaimana proses penetapan dan perencanaan program CSR di JOB P-PEJ?

Jawab:

.....

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan CSR JOB P-PEJ? (implementor program CSR)

Jawab:

.....

5. Siapa sajakah yang menjadi sasaran implementasi program CSR di JOB P-PEJ?

Jawab:

.....

6. Bagaimanakah hasil pelaksanaan program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu?

Jawab:

.....

7. Terkait dengan masalah *flare* yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan dan berdampak pada lingkungan Desa Rahayu, adakah program-program khusus yang ditujukan untuk perbaikan dan pengurangan dampak tersebut?

Jawab:

.....

8. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung implementasi program CSR JOB P-PEJ di Desa Rahayu ini?

Jawab:

.....

9. Apa sajakah kendala yang pernah dan saat ini dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR?

Jawab:

.....

*Ditujukan kepada Staff Govrel dan PR JOB P-PEJ

Interview Guide (Pedoman Wawancara)

1. Sejak kapan perusahaan JOB P-PEJ ini melaksanakan CSR di Desa Rahayu?
Jawab:
.....
2. Apakah CSR itu merupakan sesuatu hal yang penting bagi Anda dan apa manfaatnya bagi Anda dan masyarakat lainnya?
Jawab:
.....
3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai *flare*?
Jawab:
.....
4. Program apa saja yang sudah dilaksanakan di desa ini?
Jawab:
.....
5. Bagaimana keterlibatan Anda dan masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program CSR yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Apakah Anda juga pernah dilibatkan dalam kegiatan CSR?
Jawab:
.....
6. Bagaimana persepsi dan tanggapan Anda mengenai kompensasi dampak flare yang selama ini diberikan oleh JOB P-PEJ?
Jawab:
.....
7. Apakah Anda setuju dengan adanya program lain untuk menggantikan kompensasi, dalam hal ini berarti kompensasi akan dihapus dan diganti dengan program lain yang nantinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan warga?
Jawab:
.....
8. Program CSR apa yang paling Anda sukai dan menjadi unggulan di desa ini?
Jawab:
.....
9. Apakah perusahaan sudah melaksanakan program CSR untuk lingkungan dengan baik dan berkelanjutan di desa ini?
Jawab:
.....

*ditujukan kepada masyarakat Desa Rahayu

Interview Guide (Pedoman Wawancara)

1. Sejak kapan LPMD ini dibentuk?
Jawab:
.....
2. Siapakah yang membentuk LPMD ini?
Jawab:
.....
3. Apa saja tugas dan fungsi dari LPMD?
Jawab:
.....
4. Kapan dan berapa kali tim LPMD mengadakan rembung desa dengan masyarakat dan perusahaan JOB P-PEJ?
Jawab:
.....
5. Bagaimana hubungan LPMD dengan JOB P-PEJ?
Jawab:
.....
6. Apakah LPMD ini menjadi tim pelaksana yang mendapat kepercayaan penuh dari perusahaan dalam pelaksanaan CSR di Desa Rahayu? Bagaimana dengan melibatkan masyarakat sendiri?
Jawab:
.....
7. Adakah program CSR yang sampai saat ini sudah diajukan dan belum terealisasi?
Jawab:
.....
8. Apa sajakah yang menjadi kendala tim LPMD selama pelaksanaan kegiatan CSR?
Jawab:
.....

*ditujukan kepada anggota tim LPMD Rahayu

Interview Guide (Pedoman Wawancara)

1. Sejak kapan perusahaan JOB P-PEJ mulai melaksanakan CSRnya di Desa ini?

Jawab:

.....

2. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pelaksanaan CSR?

Jawab:

.....

3. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan CSR di desa ini?

Jawab:

.....

4. Bagaimana persepsi Anda mengenai CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ?

Jawab:

.....

5. Apakah kegiatan CSR sudah diterima manfaatnya oleh semua masyarakat? Ataukah masih yang melaporkan bahwa CSR hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja?

Jawab:

.....

6. Terkait dengan permasalahan lingkungan, apakah menurut Anda JOB P-PEJ sudah melaksanakan program yang berbasis lingkungan?

Jawab:

.....

7. Menurut Anda, program CSR seperti apa yang paling penting dan sesuai dengan prioritas warga yang seharusnya dilakukan oleh JOB P-PEJ?

Jawab:

.....

*ditujukan kepada perangkat Desa Rahayu

CURRICULUM VITAE

Nama : Rifka Aulya

Nomor Induk Mahasiswa : 105030100111137

Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 31 Mei 1991

Pendidikan :

1. SDN 1 Rengel Tamat Tahun 2004

2. SMPN 1 Rengel Tamat Tahun 2007

3. SMAN 1 Bojonegoro Tamat Tahun 2010

Karya Ilmiah/ Publikasi : *“Local Economic Resource Development (LERD) melalui Budidaya Jamur Tiram sebagai Upaya Penguatan Perekonomian Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten) (Ket: diseminarkan & dibukukan ketika Konferensi Nasional Administrasi Publik IV di Universitas Indonesia, 11 Maret 2014)*

